

PELAJARAN DARI PENGALAMAN PROYEK PESISIR 1997 - 2002

Lessons from Proyek Pesisir Experience in 1997 - 2002

Prosiding Lokakarya
Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir
Bogor, 14 Februari 2002

Editor:

**M. Fedi A. Sondita
Neviaty P. Zamani
Burhanuddin
Amiruddin Tahir**

Kerjasama:

**PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN - INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DAN**

**PROYEK PESISIR - COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT
COASTAL RESOURCES CENTER - UNIVERSITY OF RHODE ISLAND**

**PELAJARAN DARI PENGALAMAN
PROYEK PESISIR 1997 - 2002**

Lessons from Proyek Pesisir Experience in 1997 - 2002

Prosiding Lokakarya
Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir
Bogor, 14 Februari 2002

CITATION

M.F.A. Sondita, N.P. Zamani, Burhanuddin dan A. Tahir (editors). 2002. Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 2002. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 14 Februari 2002. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor, Proyek Pesisir - Coastal Resources Management Project dan Coastal Resources Center - University of Rhode Island.

CREDITS

Maps and photos : Learning Team (cover)
Cover design : Pusus Legowo
Layout : Burhanuddin dan Pusus Legowo
Style editor : Learning Team
ISBN : 979-9336-20-1

**PELAJARAN DARI PENGALAMAN
PROYEK PESISIR 1997 - 2002**

Lessons from Proyek Pesisir Experience in 1997 - 2002

**Prosiding Lokakarya
Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir
Bogor, 14 Februari 2002**

Editor:

**M. Fedi A. Sondita
Neviaty P. Zamani
Burhanuddin
Amiruddin Tahir**

Kerjasama:

**Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Institut Pertanian Bogor**

dan

**Proyek Pesisir - Coastal Resources Management Project
Coastal Resources Center - University of Rhode Island
2002**

SAMBUTAN LOKAKARYA PEMBELAJARAN

Oleh:
Pimpinan Proyek CRMP Indonesia
Coastal Resources Center - University of Rhode Island

Para hadirin sekalian,

Selamat datang dan selamat pagi.

Hari ini saya sangat gembira melihat Anda semua hadir dalam lokakarya yang penting ini. Seperti Anda ketahui, Proyek Pesisir melakukan berbagai kegiatan untuk menerapkan pengelolaan pesisir secara nyata di lapangan, yaitu di Propinsi Sulawesi Utara, Lampung dan Kalimantan Timur. Dalam lokakarya ini akan disajikan makalah hasil pendokumentasian kegiatan proyek dalam rangka berbagi pengalaman. Saya berharap Anda semua dapat membahasnya, kemudian menggali bersama apa saja yang dapat kita angkat sebagai pelajaran penting bagi penerapan dan praktek pengelolaan pesisir di Indonesia di masa sekarang dan yang akan datang.

Kehadiran para peserta Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri, BPPT, Bakosurtanal, P3O LIPI, akademisi, perwakilan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, perwakilan para mitra kami dari lokasi proyek, serta para staf proyek menjadikan lokakarya ini semacam forum untuk mengkomunikasikan permasalahan pengelolaan pesisir yang menjadi perhatian kita semua. Kami berharap para praktisi, instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat serta pihak-pihak lain dapat melanjutkan komunikasi ini mengingat strategi pengelolaan di Indonesia perlu disesuaikan dengan keaneka-ragaman sosial, kondisi alamiah pesisir dan permasalahannya.

Saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada penyelenggara, yaitu *Learning Team* Proyek Pesisir PKSPL IPB yang telah mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran dan mempersiapkan lokakarya ini.

Selamat berlokakarya.

Bogor, 14 Februari 2002

Maurice Knight
Chief of Party
Proyek Pesisir

SAMBUTAN LOKAKARYA PEMBELAJARAN

Oleh :
**Kordinator Program Proyek Pesisir
PKSPL - IPB**

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Hadirin peserta lokakarya yang saya hormati,
Pertama, kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas kepulangan seorang staf Proyek Pesisir Kalimantan Timur dan kami mohon kepada semua peserta untuk mendoakan semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT. Amin.

Selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME atas segala rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu di tempat ini untuk mengikuti Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir Tahun 1997 - 2002.

Lokakarya sekarang ini merupakan lanjutan dari lokakarya internal yang telah dilakukan oleh Learning Team PKSPL IPB dengan para staf lapangan Proyek Pesisir pada tanggal 15 - 16 Januari 2002. Tujuan lokakarya ini adalah sama dengan tahun lalu, yaitu mendapatkan masukan guna penyempurnaan dan tukar menukar informasi untuk menyusun sebuah dokumen yang memuat sejumlah informasi pengalaman Proyek Pesisir ini menjadi bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Seperti kita ketahui bersama, lokakarya ini adalah puncak dari runtutan kegiatan *Learning Team* Proyek Pesisir PKSPL IPB di tahun keempat proyek (2001/2002).

Kami berharap dalam lokakarya ini para peserta dapat berinteraksi lebih aktif dalam memberikan masukan, saran maupun kritikan terhadap hasil pendokumentasian yang telah dilakukan. Semoga hasil lokakarya ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta lokakarya hari ini yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti lokakarya ini hingga selesai.

Bogor, 14 Februari 2002

Dr Ir Dietrich G. Bengen, DEA
Kordinator Program
Proyek Pesisir PKSPL-IPB

In general, the above discussion highlights criteria of good practice of planning, e.g. the importance of integration, opportunity of grass-root stakeholders to express their concerns and interests during planning process, long-term ecologically sustainable oriented-planning, transparent and participatory planning process, and legal status of each stakeholder role. To some extent, such criteria have been included in a general guidelines of integrated coastal management published by Department of Marine Affairs and Fisheries. The application of the guideline implies the needs of competent human resources who will be involved in policy making process, research activities, planning, and implementation of management strategies in the field where intensive communication among stakeholders may be dominant in its early activities.

These human resources can be produced in various types of formal and informal education programs. Various forum in which participants can share their experience, such as workshop and training programs, can accelerate the creation of competent human resources. Some effort to identify lessons learned should be made by every person, both resources managers and academics, to prepare 'teaching' materials for the various types of education. Such experience exchange and identification of lessons learned are invaluable to promote integrated coastal management in practice since there is a great ecological and social variability among coastal areas in Indonesia. Therefore, coastal management programs should include learning strategies that will directly and indirectly improve the capacity of program implementers, community and other stakeholders.

rectly and indirectly determine political supports during policy and decision making process in prioritizing coastal programs for regional development agenda. This issue is relevant to current mechanism of decision making that involves legislative bodies, i.e. local house of representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah and Badan Perwakilan Desa).

The success of plan implementation depends strongly on resources, *i.e.* human resources, fund and materials. In the context of governance, formal statement that adopts a management plan is a legal basis to apply and implement integrated coastal management plan. Formal adoption of the plan should reflect commitment of government and community members to manage coastal resources for the maximum benefit of community. Such formal statement must be accompanied with a secured budget allocation for implementation programs.

As planning process can be done in bottom-up sequence, interactive communication among central and regional governments and other national agencies is vary important. Proyek Pesisir has introduces the application of simultaneous bottom-up and top-down approaches in planning the management of coastal area. The project has tried to ensure that coastal stakeholders are given great opportunity to express their concern, input for management plan and to contribute during decision making process, from early stage of identification and assessment of local coastal issues.

Some factors that can determine sustainability of the model process and practice of coastal management that are introduced by the project include:

- Existence of working group and its capability
- Commitment and supports from government (central and regional) and legislative body to include coastal management programs in development agenda. The commitment is a strong statement that the coastal management plan will be used as a guideline for development of coastal areas.
- Established community groups that continuously promote and support integrated coastal management.

- Independence of community and stakeholders in the implementation of strategic plan or management plan is an indicator of coastal management success. Their contribution and is a key factor of the success that reflects they are not only the object of development but also the subject.

The above discussion leads to the following remarks on how coastal management should be practiced; these are:

- Coastal management program must be accompanied with institutional strengthening programs that include improvement of existing institutions and to institutionalize coastal management among community members, government officials and other stakeholders. Indicator of institutionalized coastal management is government commitment accompanied by budget allocation approved by legislative body.
- Government is expected to facilitate coastal management planning process that applies simultaneous top-down approach dan bottom-up approach.
- Collaboration experienced by government agencies, NGOs and other stakeholders working group activities should be utilized. Therefore, new working group may not necessary for each new project
- Continuous development of staff carrier and organizational re-arrangement implies that existing working group may need a refreshing program to maintain staff's awareness and institutional capacity. Such program is very important to secure sustainability of effort and practices introduced by a project.
- All participants collaborated and developed during the process of a coastal project activities are critical mass that can accelerate the practice of integrated coastal management.
- The practice of coastal management needs adaptive approach since there is always limitation of knowledge and capacity to understand the dynamic of coastal ecosystem. Such approach implies a technical consequence on the managerial process that needs to be accommodated by accountability system.

ficials, and other stakeholders in meetings, workshops and other activities.

Development of institutional aspects include strategies to promote the establishment of integrated management of Balikpapan Bay among local stakeholders. These activities include facilitation of Forum Sahabat Teluk Balikpapan, Task Force for Coastal Management and Joint Working Groups to handle erosion/sedimentation and application of environment friendly fish culture. For time being, no new institution needs to be established since empowerment of some coordinating agencies is considered an appropriate strategy to accommodate integrated Balikpapan Bay management. The Task Force and Joint Working Groups are given responsibility to implement management programs proposed by Pasir Districts and Balikpapan City and organization of community initiatives to promote public awareness on the importance of integrated management.

Activities of these ad-hoc institutions are strongly dependent on the annual budget government projects hence longer-term budget must be secured to ensure its continuity and effectiveness. Some staffs of the working groups have a limitation to conduct intensive communication and strongly dependent on facilitator initiatives (*i.e.*, Proyek Pesisir). These problems can be addressed by encouraging local agency leaders to be more progressive by taking into account that Proyek Pesisir will finish soon while responsibility of local coordination is on the hand of local government.

The Friends of the Balikpapan Bay was established to build local constituency and supporters for implementing integrated management plan of Balikpapan Bay. However, there has been an indication of decreasing participation of its members. This problem may be attributed to the nature of their membership which is voluntary, physical distance between their residential address and the meeting point (*i.e.*, Balikpapan) and low coordinating function of the committee.

Lessons Learned

Regardless of its geographical scale and types of coastal issues being addressed by management plan, existence and formal status of an institution which coordinates the implementation

of coastal management plan is very important. Establishment of working group as a seed of such formal institution is important to promote the success of management application in the field. During its development, such working group should involve persons that are representatives of agencies relevant to handle coastal issues.

A working group can function as coordinator of development projects in the locality to ensure their integration with existing plans and effort. This is very important to maximize the benefits and positive impacts while increase the efficiency of the utilization of development resources. Many projects are designed to provide demonstration or small-scale effort with an expectation that in the future these will be scaled-up by local government or stakeholders. Therefore, a working group should be designed to receive transfer of technology and experience hence capable to sustain the initiatives introduced by the project in the form of local development programs.

Status of a working group run should be formalized to ensure it functions properly. A regional regulation (Peraturan Daerah – Perda) which describes its structure and staff composition, scope of responsibility, mission and source of fund, can accommodate it. Such regulation is needed when local government needs to have a special institution or when existing coordinating body has not sufficient capability to handle ‘new’ identified coastal issues.

After a project being closed, roles and functions of the ad-hoc working group can be taken over by local government. Experience obtained by staffs of the working group is invaluable to the formal coordinating body. Therefore, each local government should make some effort to ensure that such experience is transferred to the coordinating body which may apply it in the future programs.

Effort to institutionalize coastal management in the locality should not only establishment of coordinating body. Working groups, discussion forums and effective outreach strategies are also needed to institutionalized coastal management among public and other stakeholders.

Popularity of the importance of coastal management among community members can di-

of natural resources management. To handle such problem, a regional regulation (Peraturan Daerah) may be useful to provide legal basis for government officials to use the Renstra. Another problem identified is low capacity and awareness of government officials on coastal issues.

Implementation of village level coastal management plan in Minahasa, North Sulawesi

Village level coastal management plans are meant to be guidelines for village community, government and other stakeholder in addressing some coastal issues. The plans clearly distribute responsibility of coastal management among community, government and other stakeholders. The plans are strategic since they reflect community commitment based on some understanding on the importance of coastal resources management to secure sustainability of its use, hence community welfare.

The plans are good examples of decentralized coastal resources management in Indonesia. Contribution of Kabupaten dan village working groups consisting government executives was significant in the refinement of the village plans. Therefore, the process of plan development provides opportunity for local government to design their programs more properly, especially for coastal villages in Minahasa district. Another impact of such process is greater understanding of government officials on the importance of participatory and community needs to be addressed in their programs.

At village level, coastal management seems relatively easy to be institutionalized among villagers. This is mainly due to direct involvement and support of village leaders to their staffs and community members to be involved in the implementation of Proyek Pesisir. The coastal management plans are part of Annual Village Development Plan that was approved by Village Legislative Body to be executed by village leaders. In each village, a management unit has been established in each village to implement the coastal management plan.

Budget for implementing the coastal management plan is established in a meeting at-

tended by village officials and the management unit. The main source of fund is expected from the village. Additional fund to compensate the shortage should be obtained by the management unit through formal request to district government, funding agencies and others.

So far, programs to address village main issues have been implemented in four project location in Minahasa. The programs include development of domestic water supply, sanitation facilities, coastal flood and protection wall, establishment of village regulation, trainings to create new sources of income, and fish restocking, etc.

Implementation of coastal programs in the villages has some positive impacts, such as improvement of public infrastructures that promotes community welfare, reduction of community damage due to floods and erosion, protection of coastal resources that are directly utilized by the community. Above all, the main impact of implementation of the plan on the community and village officials is their awareness to establish good governance on existing coastal resources.

One of main constraints identified from the implementation of village management plan is related with community dynamics, such unnecessary intervention by unauthorized persons on decision making process, relationship between institutions, and problems in the use of allocated fund.

Institutional and funding preparation to implement Teluk Balikpapan management plan

The progress of project activities in East Kalimantan is different from the other two sites; the management plan still in the process of completion. However, institutional preparation and budgeting process to anticipate official integrated Teluk Balikpapan Management Plan has been carried out simultaneously by Pasir District and Balikpapan City.

Though development of plan document is still progressing, some programs of Pasir District and Balikpapan City are relevant to the issues identified in the draft of management plan. Such relevance occurs due to communicative interaction among Proyek Pesisir, local government of-

EXECUTIVE SUMMARY

This learning workshop was held to discuss reports of documentation activities on implementation of coastal management plans in the three project sites, *i.e.* village coastal management plan (North Sulawesi), integrated bay management plan (East Kalimantan) and provincial strategic coastal management plan (Lampung). Papers presented in the workshop do not only describe the implementation process of such management plans but also some discussion to identify some lessons learned from their implementation. The lessons learned are presented by describing problems, factors that created the problems and recommended solutions to handle the problems. The papers were developed through some discussion in an internal workshop held in Bogor, 15-16 January 2002. This proceedings presents the papers and their discussion during an external workshop held in Bogor, 14 February 2002. Participants of the external workshop discussed the following issues:

- Effort to institutionalize coastal management in each of three project sites.
- Relationship between the coastal management plan and local or regional development plan.
- Implication of some identified lessons learned on coastal management program in Indonesia.
- Recommendation to government (national and regional) to sustain integrated coastal management initiatives that are introduced by Proyek Pesisir.

Implementation of Strategic Plan of Coastal Management of Lampung Province

Strategic Plan of Coastal Management of Lampung Province is a compilation of formulated plan that is relevant to Annual Regional Development Program, Regional Development Program, Reform Agenda of Regional Development, National Development Guidelines and National Reform Agenda. The strategic plan was developed through simultaneous top-down and bottom-up process with a series of stakeholder consulta-

tion from provincial, district and community levels. The strategic plan identifies 11 coastal issues and programs to address the issues. For the year of 2001, the plan recommends 25 programs to address coastal degradation issues, 9 programs to address low quality of human resources, 7 programs to address some issues of forest, national parks and marine protected area.

Effort to institutionalize the Renstra includes: (1) development of formal institutions, such as working groups, at provincial and district levels; (2) project assistance to help provincial and district agencies in developing their programs by suggesting inclusion of some coastal programs recommended by the Renstra; (3) direct involvement of local NGOs in meetings, workshops, training and courses that are relevant to coastal issues in order to develop their capacity to support the implementation of programs recommended by the Renstra.

Evaluation in 2001 indicates that many local government agencies have not completely used the Renstra in developing their coastal programs. The existing government plan addressed 7 of 11 coastal issues with 24 of 77 recommended programs. These programs were supported by development funds of about Rp 4,3 billions from regional development budget, national development budget and grants. At the same time, Department of Marine Affairs and Fisheries implemented three coastal programs, *i.e.* ecosystem rehabilitation and island community empowerment, spatial planning of Lampung Bay, and coastal community empowerment program in East Lampung. Constraints identified from implementation of such programs include misunderstanding and interpretation of some officials on formal position of the Renstra in regional planning procedure. Such problem is not necessary since development of Renstra had started in June 1999 with participatory process, launched in May 2000 while the Law No. 22/1999, which was effective from Januari 2001, gives an opportunity for decentralization

untuk tataran pengambilan kebijakan, penelitian, perencanaan, dan tataran praktek di lapang yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Penyediaan sumberdaya manusia ini dapat dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Berbagai forum untuk berbagi pengalaman, misalnya lokakarya dan pelatihan-pelatihan, dapat mempercepat penyediaan sumberdaya manusia tersebut. Upaya-upaya penggalan *lessons learned* hendaknya dilakukan oleh semua pihak, baik para praktisi maupun akademisi, dalam upaya menyiapkan ‘materi’ berbagai ragam bentuk pendidikan tersebut. Pendekatan penggalan *lessons learned* dan bertukar pengalaman ini sangat strategis mengingat keragaman pesisir dan karakteristik sosial yang ada di Indonesia memerlukan berbagai pendekatan khusus. Oleh karena itu, setiap program-program pengelolaan pesisir perlu mencakup program pembelajaran yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kapasitas pelaksana program, masyarakat dan para *stakeholder* lainnya.

Dalam proses perencanaan yang berjenjang dari bawah, dalam arti masukan atau usulan, komunikasi interaktif antara pemerintah dan pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) serta jajaran pemerintahan lainnya sangat penting. Proses perencanaan pengelolaan pesisir yang diperkenalkan sudah menerapkan *bottom-up approach* dimana para *stakeholder* telah diberi kesempatan berperan aktif, mulai dari tahap identifikasi permasalahan dan mengkaji setiap permasalahan tersebut, memberikan masukan terhadap rencana pengelolaan dan lain-lain.

Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelanjutan dari model proses dan praktek pengelolaan pesisir yang diperkenalkan oleh suatu proyek adalah:

- Keberadaan *working group* dan kapasitasnya
- Komitmen serta dukungan dari pemerintah (pusat dan daerah) dan DPR/DPRD untuk memasukkan program pengelolaan pesisir ke dalam rencana pembangunannya. Komitmen ini berupa ketegasan bahwa rencana pengelolaan yang dibuat akan dijadikan pedoman untuk pembangunan di wilayah pesisir.
- Terciptanya kelompok-kelompok masyarakat yang secara terus-menerus mendukung terwujudnya pengelolaan pesisir terpadu.

Kemandirian masyarakat dan *stakeholder* dalam menerapkan substansi rencana strategi ataupun rencana pengelolaan pesisir merupakan indikator sukses penting proses pengelolaan. Kontribusi yang besar dari masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan upaya-upaya pengelolaan. Kemandirian ini merupakan indikator bahwa masyarakat tidak semata-mata sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa catatan yang mencakup bagaimana sebaiknya pengelolaan pesisir secara terpadu dipraktekkan. Catatan-catatan tersebut adalah:

- Program pengelolaan pesisir harus dibarengi dengan program penguatan kelembagaan yang mencakup peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang ada dan melembagakan atau mensosialisasikan pengelolaan pesisir di tengah masyarakat umum, staf pemerintahan dan *stakeholder*. Indikator dari adanya pengelolaan yang sudah melembaga adalah komitmen peme-

rintah yang didukung oleh para wakil rakyat untuk mengalokasikan dana.

- Pemerintah dalam proses pembangunan diharapkan dapat memfasilitasi terwujudnya proses perencanaan pengelolaan pesisir yang menerapkan *top-down approach* dan *bottom-up approach* secara bersamaan.
- Pengalaman kerjasama instansi dan LSM dalam *working group* yang ada perlu dimanfaatkan. Oleh karena itu suatu *working group* yang baru tidak selalu perlu dibentuk untuk setiap proyek.
- Adanya perkembangan karier dan restrukturisasi menyebabkan *working group* yang ada memerlukan program penyegaran untuk menjaga *awareness* dan kapasitasnya. Program seperti ini sangat diperlukan untuk menjaga *sustainability* dari upaya-upaya yang diperkenalkan proyek.
- Semua pihak yang pernah bekerjasama dan terbina oleh aktifitas proyek merupakan *critical mass* yang dapat mendorong kelancaran proses penerapan pengelolaan pesisir secara terpadu.
- Proses pengelolaan pesisir terpadu memerlukan pendekatan *adaptive management*. Hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan dan kapasitas untuk pemahaman terhadap permasalahan pesisir yang dinamis. Pendekatan ini memberikan konsekuensi teknis yang terkait dengan proses pengelolaan yang perlu diakomodasi oleh sistem pertanggung-jawaban program/proyek yang biasa diterapkan oleh pemerintah.

Secara umum, hal-hal di atas menggaris-bawahi bahwa pengelolaan pesisir hendaknya mengutamakan keterpaduan, kesempatan kepada para *stakeholder* mulai dari tingkat bawah (akar rumput – *grass root*) untuk berperan aktif dalam proses perencanaan, perencanaan yang berdampak positif dalam jangka panjang (*ecologically sustainable*), sistem perencanaan yang bersifat terbuka dan bersifat partisipatif, kejelasan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat. Hal-hal tersebut sudah tercakup dalam dokumen Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu yang diterbitkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Untuk menerapkan pedoman umum tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan penerapan pengelolaan pesisir yang terpadu antara lain adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang handal yang diperlukan

partisipasi anggota. Hal ini diperkirakan berkaitan erat dengan keanggotaan yang bersifat sukarela, faktor jarak geografi yang merupakan kendala bagi anggota yang berada di lokasi yang cukup jauh dari Balikpapan serta belum optimalnya pengurus forum dalam menjalankan fungsi koordinasi.

Pelajaran

Terlepas dari skala geografi wilayah pesisir yang dikelola ataupun cakupan isu, kejelasan adanya lembaga pengelolaan pesisir merupakan persyaratan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kelanjutan pengelolaan pesisir. Pendirian *working group* sebagai cikal bakal lembaga pengelolaan merupakan hal penting yang perlu dimulai untuk mendukung kelancaran proses penerapan pengelolaan di lapang. Dalam proses pembentukannya, cikal bakal tersebut seharusnya melibatkan sejumlah orang yang merupakan perwakilan instansi atau unit kerja yang diperkirakan relevan untuk menangani permasalahan yang ada di wilayah pesisir.

Working group dapat berperan dalam mengkoordinasikan ‘proyek-proyek’ pembangunan yang ada di wilayah kerjanya dalam rangka keterpaduan antar proyek. Hal ini penting untuk memaksimalkan manfaat dan dampak positif proyek sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan, termasuk untuk pengelolaan pesisir. Tidak jarang proyek-proyek yang ada bertujuan untuk melaksanakan percontohan atau demonstrasi penerapan dalam skala kecil dengan maksud contoh penerapan tersebut dikemudian hari diterapkan dalam skala sesuai dengan kebutuhan setempat. Oleh karena itu *working group* juga diharapkan dapat berperan sebagai ‘lembaga’ yang siap menerima transfer pengalaman sehingga setelah proyek-proyek percontohan tersebut usai, upaya yang diperkenalkan proyek dapat berlanjut sebagai program-program pembangunan.

Agar suatu *working group* dapat bekerja dengan baik, ada usulan bahwa *working group* tersebut perlu diresmikan oleh pimpinan pemerintahan setempat, misalnya dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Terbitnya perda ini memberikan landasan hukum bagi *working group* tentang susunan *working group*, tugas dan fungsinya, serta sumber pembiayaan untuk

kegiatannya. Perda semacam ini diperlukan jika pemerintah setempat memerlukan adanya lembaga ‘khusus’ untuk menangani proyek pengelolaan pesisir, atau karena kelembagaan yang ada dianggap belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani permasalahan yang baru.

Dalam masa setelah proyek ataupun program percontohan selesai, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh *working group* dapat diadopsi oleh pemerintah setempat. Pengalaman yang diperoleh para anggota *working group* merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga koordinasi yang sebenarnya. Persoalan berikutnya adalah bagaimana pengalaman tersebut dapat dipelajari dan disampaikan kepada pimpinan dan staf lembaga tersebut.

Upaya untuk melembagakan pengelolaan pesisir tidak cukup hanya dengan membentuk lembaga-lembaga koordinatif. Pendirian kelompok-kelompok kerja khusus dan forum-forum serta pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi/penyuluhan kepada masyarakat luas. Hal ini perlu dilakukan agar pengelolaan pesisir tersosialisasi atau melembaga di tengah masyarakat umum dan para *stakeholder* lainnya.

‘Popularitas’ pentingnya pengelolaan pesisir di tengah masyarakat secara langsung dan tidak langsung akan menentukan dukungan politis terhadap pengambilan kebijakan (*policy*) yang memprioritaskan program pengelolaan pesisir dalam agenda pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan setempat yang melibatkan wakil rakyat dalam badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Perwakilan Desa).

Sukses implementasi rencana pengelolaan tidak terlepas dari kesediaan sumberdaya, yaitu sumberdaya manusia, dana dan material. Dalam konteks *governance*, pernyataan resmi tentang diterimanya suatu rencana pengelolaan adalah salah satu landasan untuk mewujudkan rencana pengelolaan pesisir secara terpadu. Adopsi formal tersebut harus menggambarkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sumberdaya pesisir untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Pernyataan tersebut harus disertai dengan pengalokasian dana pembangunan untuk program-program implementasi rencana pengelolaan tersebut.

memenuhkan kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi, pembuatan bangunan pelindung dari bahaya banjir, pembuatan aturan-aturan, pelatihan untuk membuat sumber penghasilan tambahan atau alternatif, pemulihan sumberdaya perikanan, dan lain-lain.

Manfaat dari adanya pelaksanaan program-program pesisir di desa adalah tersedianya sarana/prasarana umum yang meningkatkan tingkat kesejahteraan umum, mengurangi ancaman bahaya atau bencana alamiah, pemeliharaan sumberdaya alam yang dapat dinikmati langsung oleh penduduk. Selain itu, manfaat yang tidak kalah pentingnya adalah terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintahan setempat untuk menerapkan *governance* pada sumberdaya pesisir yang tersedia.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pengelolaan mencakup aspek sosial yang berkaitan dengan dinamika masyarakat, seperti intervensi terhadap pengambilan keputusan oleh pihak yang tidak berwenang, hubungan antar lembaga-lembaga di tingkat desa, serta masalah teknis yang berkaitan dengan penggunaan dana.

Penyiapan Kelembagaan dan Rencana Pendanaan untuk Implementasi Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan

Berbeda dengan perkembangan yang terjadi di dua propinsi lokasi proyek lainnya, rencana pengelolaan untuk Teluk Balikpapan belum selesai tersusun. Namun tanpa menunggu sampai selesai tersusun, proses persiapan pembentukan kelembagaan untuk menangani rencana pengelolaan secara bersamaan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi setelah rencana pengelolaan nantinya diresmikan sebagai pedoman pengelolaan. Selain itu dilakukan juga proses persiapan pendanaan untuk penerapan rencana pengelolaan.

Walaupun dokumen Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan belum siap, sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan telah sesuai dengan sebagian program-program yang direncanakan untuk menangani sejumlah isu atau permasalahan pesisir setempat. Hal ini dapat dikatakan sebagai akibat dari interaksi atau komunikasi antara Pengelola Proyek Pesisir di Balikpapan dan para *stakeholder* Teluk Balikpapan,

termasuk staf pemerintahan daerah, dalam lokakarya dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pengembangan aspek kelembagaan mencakup proses atau strategi agar pengelolaan Teluk Balikpapan dapat melembaga di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi pembentukan Forum Sahabat Teluk Balikpapan. Gugus Tugas Pengelolaan Pesisir dan Kelompok Kerja Gabungan untuk permasalahan erosi/sedimentasi dan pengelolaan tambak ramah lingkungan. Pertimbangan bahwa pemberdayaan komponen dinas/instansi pemerintahan yang ada sebagai koordinator merupakan strategi yang dapat diterima oleh *stakeholder* dari kalangan pemerintahan merupakan indikasi bahwa tidak perlu dibentuk lembaga baru. Untuk itu, dinas/instansi yang mengemban tugas koordinasi, seperti Bappeda dan Bapedalda, memperoleh prioritas sebagai lembaga yang akan melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pengelolaan. Sementara ini Gugus Tugas dan Kelompok-kelompok kerja gabungan diberi peran sebagai uji coba pelaksanaan program-program pengelolaan, baik dalam kegiatan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan maupun pengorganisasian gerakan masyarakat peduli terhadap Teluk Balikpapan.

Dari perkembangan lembaga-lembaga, telah diidentifikasi bahwa kelanjutan operasional tim-tim yang bersifat *ad-hoc* tersebut sangat tergantung pada anggaran pembangunan tahunan (proyek). Untuk menjamin kelangsungan dan efektivitas peran mereka, jaminan pendanaan yang berjangka waktu lebih panjang sangat diperlukan. Sebagian personil *working group* tersebut memiliki keterbatasan untuk melakukan komunikasi yang intensif dan sangat tergantung pada upaya yang dilakukan oleh fasilitator (dalam hal ini Proyek Pesisir). Untuk mengatasi hal ini, inisiatif dari pemerintah daerah harus ditingkatkan berdasarkan pemikiran bahwa proyek akan berakhir sementara tanggungjawab koordinasi pengelolaan teluk ada ditangan pemerintah daerah.

Forum Sahabat Teluk Balikpapan (*Friends of Balikpapan Bay*) dibentuk untuk membangun konstituen sekaligus pendukung yang akan berpartisipasi dalam pengelolaan ekosistem Teluk Balikpapan. Dalam perkembangan forum tersebut terlihat adanya kecenderungan penurunan

mencakup 7 dari 11 permasalahan utama. Sekitar 30% atau 24 dari 77 program yang dicantumkan dalam renstra telah dilaksanakan. Ke-24 program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp 4,3 milyar, berasal dari APBN, APBD dan dana hibah. Sementara itu, Departemen Kelautan dan Perikanan melaksanakan 3 program di Lampung, yaitu rehabilitasi ekosistem dan pemberdayaan masyarakat pulau, penyusunan tataruang pesisir Teluk Lampung, dan pemberdayaan masyarakat pesisir Lampung Timur; Proyek Pesisir melaksanakan program pengembangan daerah perlindungan laut dan pengembangan tambak ramah lingkungan.

Kendala utama yang teridentifikasi dalam implementasi Renstra adalah ketidak-jelasan posisi renstra dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif staf pemerintahan daerah. Hal ini seharusnya tidak terjadi mengingat proses pembuatan renstra dimulai sejak Juni 1999 dan diluncurkan pada bulan Mei 2000 sementara Undang-undang nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah baru berlaku sejak Januari 2001. Untuk mengatasinya, ada pemikiran bahwa Renstra tersebut perlu memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu sebuah peraturan daerah yang menyatakan bahwa Renstra Pesisir harus menjadi acuan perencanaan pembangunan di wilayah pesisir. Kendala utama kedua adalah terbatasnya kemampuan dan kepedulian staf pemerintahan di tingkat kabupaten maupun propinsi. Hal ini dapat diatasi dengan program sosialisasi dalam bentuk lokakarya dan lain-lainnya.

Implementasi Rencana Pengelolaan Pesisir Desa di Minahasa, Sulawesi Utara

Rencana pengelolaan pesisir di desa dimaksudkan untuk sebagai pedoman bagi masyarakat desa, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wilayah pesisir. Dengan adanya rencana pengelolaan, tanggung jawab dan peran berbagai pihak, yaitu masyarakat, pemerintah dan *stakeholder* lainnya, cukup jelas. Rencana pengelolaan pesisir tersebut sangat strategis karena mencerminkan komitmen masyarakat yang dilandasi oleh pemahaman pentingnya pengelolaan untuk kelestarian sumberdaya alam dan

kesejahteraan keluarganya. Tersusunnya rencana pengelolaan pesisir tingkat desa merupakan indikasi dari adanya praktek desentralisasi pengelolaan pesisir di Indonesia.

Proses penyempurnaan rencana pengelolaan ini tidak lepas dari peran *working group* tingkat kabupaten yang anggotanya adalah perwakilan dari dinas-dinas terkait dan kecamatan. Oleh karena itu, rencana pengelolaan yang dibuat oleh masyarakat desa secara langsung dan tidak langsung berkaitan erat dengan program-program pengelolaan pesisir yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. Dampak lain dari keterlibatan *working group* (*Kabupaten Task Force-KTF*) tersebut adalah pemahaman para staf pemerintahan terhadap proses yang dilalui selama proses penyusunan rencana pengelolaan yang sangat mengutamakan aspirasi atau keinginan masyarakat desa.

Di tingkat desa, pengelolaan pesisir relatif dapat melembaga dengan cepat. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintahan desa yang sejak awal memberikan dukungan dan kesempatan kepada stafnya (yaitu, para kepala urusan ataupun kepala dusun) dan anggota masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pelaksanaan proyek rencana pengelolaan tersebut. Rencana pengelolaan pesisir tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang disahkan oleh Badan Perwakilan Desa, sebuah lembaga legislatif tingkat desa yang memberikan amanat tanggungjawab kepada Kepala Desa.

Rincian anggaran biaya untuk pelaksanaan rencana pengelolaan ditetapkan melalui rapat Pemerintah Desa dan Badan Pengelola yang akan melaksanakan program-program sesuai dengan rencana pengelolaan. Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan program-program pengelolaan ini sebagian diupayakan untuk dapat dipenuhi secara swadaya. Kekurangan dana diupayakan oleh Badan Pengelola dan Pemerintah Desa dari sumber di luar, seperti dana pembangunan APBN, APBD dan hibah dari pihak lain yang tidak mengikat (misalnya perusahaan swasta ataupun lembaga donor).

Sejauh ini penanganan masalah utama yang diprioritaskan dalam setiap rencana pengelolaan sudah dilaksanakan di empat desa proyek. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mencakup

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lokakarya tahun 2002 ini bertujuan untuk membahas hasil pendokumentasian terhadap implementasi rencana pengelolaan (*management plan*) yang dilaksanakan di 3 propinsi lokasi proyek, yang Rencana Pengelolaan Pesisir Desa di Minahasa (Sulawesi Utara), Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan dan Rencana Strategi Pengelolaan Pesisir Propinsi Lampung. Makalah-makalah yang disajikan tidak hanya menggambarkan proses yang terjadi, tetapi juga pembahasan untuk mengidentifikasi pelajaran yang diperoleh dari pengalaman (*lessons learned*). Penyajian *lessons learned* dalam setiap makalah dilengkapi dengan persoalan yang dihadapi, faktor penyebab persoalan tersebut, dan solusi untuk menangani kendala-kendala tersebut. Penyusunan makalah-makalah tersebut melewati proses pembahasan dalam lokakarya internal di Bogor pada tanggal 15-16 Januari 2002. Prosiding ini menyajikan makalah-makalah dan pembahasannya dari lokakarya eksternal di Bogor pada tanggal 14 Februari 2002. Dalam lokakarya eksternal tersebut, beberapa hal penting yang dibahas peserta antara lain:

- Upaya-upaya untuk melembagakan pengelolaan pesisir di tiap lokasi proyek .
- Hubungan antara rencana pengelolaan pesisir yang ada di tiap lokasi dengan rencana pembangunan lokal.
- Implikasi dari pengalaman proyek dan *lessons learned* yang teridentifikasi terhadap kegiatan-kegiatan program pengelolaan pesisir di Indonesia.
- Saran untuk Pemerintah (Pusat dan Daerah) agar praktek pengelolaan pesisir terpadu yang diperkenalkan oleh suatu proyek dapat efektif dan berlanjut.

Implementasi Rencana Strategi Pengelolaan Pesisir Propinsi Lampung

Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Propinsi Lampung merupakan kompilasi rumusan perencanaan yang sejalan dengan Program Pembangunan Tahunan Daerah (Propetada), Pro-

gram Pembangunan Daerah (Propeda), Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah, GBHN dan Pokok-pokok Reformasi. Proses perumusan rencana strategis ini menerapkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* secara simultan, lengkap dengan konsultasi dengan para *stakeholder*, baik di tingkat propinsi, kabupaten maupun masyarakat dan pengusaha. Renstra tersebut mengidentifikasi adanya 11 permasalahan utama yang terjadi atau berkaitan dengan pesisir dan program-program untuk mengatasinya. Untuk tahun 2001, Renstra menyajikan 25 program untuk mengatasi permasalahan degradasi wilayah pesisir, 9 program untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas sumberdaya manusia, 7 program untuk mengatasi permasalahan pencemaran wilayah pesisir, 6 program untuk mengatasi permasalahan kerusakan hutan, taman nasional dan cagar alam laut, 6 program untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya pengelolaan perikanan dan satu program untuk mempelajari intrusi air laut.

Upaya untuk melembagakan Renstra Pesisir dilakukan dengan: (1) pembentukan lembaga-lembaga formal seperti *working group*, baik untuk cakupan propinsi, kabupaten (sementara ini di Kabupaten Lampung Selatan); (2) program fasilitasi berupa saran masukan program-program yang tercantum dalam renstra dalam proses penyusunan rencana program-program yang akan dibuat oleh dinas-dinas pemerintah daerah untuk tahun 2001-2005, baik propinsi maupun kabupaten; (3) program pelibatan masyarakat/LSM dalam pertemuan, lokakarya, pelatihan, kursus yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir untuk menyiapkan kader-kader yang dapat mendukung pelaksanaan program-program yang tercantum dalam Renstra.

Evaluasi di tahun 2001 menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah daerah di tingkat kabupaten di Propinsi Lampung belum sepenuhnya menggunakan Renstra Pesisir dalam menyusun program-program yang berkaitan dengan permasalahan di wilayah pesisir. Program-program yang dilaksanakan tersebut baru

UCAPAN TERIMA KASIH

Learning Team PKSPL IPB menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan berbagai pihak sejak dari persiapan pendokumentasian hingga tersusunnya prosiding ini kepada:

- Kordinator Program Proyek Pesisir PKSPL IPB serta seluruh staf Proyek Pesisir PKSPL IPB;
- Kepala Pusat Kajian dan Sumberdaya Pesisir dan Laut IPB serta seluruh staf PKSPL IPB;
- Chief of Party dan seluruh staf Proyek Pesisir di Jakarta;
- Para manajer dan seluruh staf Proyek Pesisir Lampung, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur atas bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan pendokumentasian, baik pada saat internal dan eksternal workshop maupun dalam proses penulisan prosiding;
- Pimpinan dan staf Coastal Resources Center, University of Rhode Island
- Para peserta Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir pada tanggal 14 Februari 2002.

Kami berharap bahwa prosiding ini akan bermanfaat bagi Proyek Pesisir dan berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Indonesia.

Bogor, 8 April 2002

Dr. Ir. M.Fedi A. Sondita, MSc
Kordinator Learning Team Proyek Pesisir
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Institut Pertanian Bogor

1.3 Fokus Tahapan Siklus Perencanaan Pengelolaan Saat Ini	23
2. Metodologi	24
2.1 Sumber-sumber Data/Informasi	24
2.2 Metode Analisis	24
3. Substansi Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan	25
3.1. Alasan Pentingnya Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan	25
3.2 Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan dan Implementasinya	26
3.3 Isu Utama dan Visi Pengelolaan Lingkungan Hidup teluk Balikpapan	27
3.4 Cakupan Wilayah Pengelolaan dan Tingkat Perencanaan	27
3.5 Prinsip Pendekatan Perencanaan Pengelolaan Teluk Balikpapan	29
4. Penyiapan Kelembagaan bagi Implementasi Rencana Pengelolaan	29
4.1 Penyiapan Sistem dan Struktur Kelembagaan	29
4.2 Pengembangan Model Mekanisme Kelembagaan	34
5. Pelajaran dari Proses Penyiapan Kelembagaan	36

IMPLEMENTASI RENCANA PENGELOLAAN TINGKAT DESA DI KABUPATEN
MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA

41	41
1. Pendahuluan	41
2. Metodologi	44
3. Rencana Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa	44
3.1 Pengertian	44
3.2 Proses Penusunan	45
3.3 Hubungan Rencana Pengelolaan Desa dengan Rencana Pembangunan Kabupaten dan Propinsi	47
3.4 Strategi Melembagakan Rencana Pengelolaan Desa	47
3.4.1 Kelembagaan	47
3.4.2 Biaya	49
4. Implementasi Rencana Pengelolaan	51
4.1 Lembaga Pelaksana	51
4.2 Tahapan Kegiatan Implementasi	51
4.2.1 Persiapan dan Persetujuan Rencana Tahunan	51
4.2.2 Pelaksanaan Rencana Tahunan	52
4.3 Kegiatan yang Dilaksanakan	53
4.4 Hasil dan Dampak Kegiatan	53
4.5 Permasalahan dan Pemecahannya	54
5. Pelajaran yang Diperoleh	55
Lampiran	57

PELAJARAN DARI PENERAPAN PENGELOLAAN PESISIR DI LAPANG:

MAKALAH RANGKUMAN	63
1. Pendahuluan	63
2. Lembaga Pengelola	63
3. Pelembagaan Pengelolaan Pesisir di Tengah Masyarakat/ <i>stakeholder</i>	65
4. Pendanaan untuk Implementasi Rencana Pengelolaan	65
5. Kelanjutan Pengelolaan Pesisir	66
6. Implikasi terhadap Program-program Pengelolaan Pesisir	67
7. Implikasi terhadap Kebijakan Nasional	67

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
EXECUTIVE SUMMARY	x
SAMBUTAN LOKAKARYA PEMBELAJARAN OLEH KORDINATOR PROGRAM PROYEK PESISIR PKSPL IPB	xv
SAMBUTAN LOKAKARYA PEMBELAJARAN OLEH <i>CHIEF OF PARTY</i> PROYEK PESISIR	xvi
PROGRAM PEMBELAJARAN PROYEK PESISIR (1997-2002).....	1
1. Pendekatan Proyek Pesisir	1
2. Kerangka umum program pembelajaran Proyek Pesisir	2
2.1 Topik pembelajaran	2
2.2. Metode yang diterapkan	3
2.3. Evolusi tim pembelajaran	4
3. Strategi melembagakan pembelajaran	5
4. <i>Lessons learned</i> dari pembelajaran dengan pendekatan pendokumentasian	5
5. Penutup: Lokakarya Pembelajaran 2002	6
KAJIAN IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN PESISIR PROPINSI LAMPUNG	7
1. Pendahuluan	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Tujuan dan Manfaat	8
2. Metodologi	8
3. Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Lampung	8
3.1. Pengertian dan Peran Renstra Pesisir Lampung	8
3.2. Proses Penyusunan	9
3.3. Kedudukan Renstra dalam Pengelolaan Pesisir Lampung	9
3.4. Isu-isu Pengelolaan Pesisir Lampung	10
3.5. Implementasi Program Renstra Pesisir	10
3.6. Strategi Pelembagan Renstra Pesisir	11
4. Evaluasi Implementasi Renstra	12
4.1. Relevansi Program Kabupaten dengan Program dalam Renstra	12
4.2. Program Pengembangan Pesisir Propinsi	12
4.3. Contoh Implementasi Renstra	13
5. Kendala yang Dihadapi	14
Lampiran	15
PENYIAPAN STRUKTUR KELEMBAGAAN BAGI IMPLEMENTASI RENCANA PENGELOLAAN TELUK BALIKPAPAN	22
1. Pendahuluan	23
1.1 Proyek Pesisir KalTim Sebagai Fasilitator	23
1.2 Definisi Perencanaan Pengelolaan Teluk Balikpapan	23

PROGRAM PEMBELAJARAN PROYEK PESISIR (1997-2002)

Oleh:

M. Fedi A. Sondita, Neviaty P. Zamani, Amiruddin Tahir,
Burhanuddin dan Bambang Haryanto
Learning Team – Proyek Pesisir IPB, Bogor
email: learningtm@bogor.indo.net.id

ABSTRAK

Tulisan ini menyajikan perkembangan kegiatan pembelajaran yang dilakukan Proyek Pesisir mengenai topik, mekanisme yang diterapkan, pelaku pembelajaran dan isu kelanjutan pembelajaran dalam konteks pengelolaan pesisir secara nasional. Proses pembelajaran yang dilaksanakan proyek merefleksikan upaya-upaya yang dilakukan proyek dalam memperkenalkan dan menerapkan *good practice* pengelolaan pesisir. Kelanjutan (*sustainability*) merupakan salah satu isu penting untuk setiap jenis proyek, termasuk proyek pesisir yang akan segera berakhir.

Kata Kunci : pembelajaran, *good practice*, kelanjutan

ABSTRACT

This paper describes development of learning activities conducted by Proyek Pesisir, e.g. selection of topics of learning activities, procedure, persons, involved, and sustainability of learning agenda in the context of national coastal management. These learning activities reflect Proyek Pesisir effort in introducing and implementing 'good' practice of coastal management concept. Sustainability is one of important issues to any project at the final stage of its implementation, including Proyek Pesisir.

Keywords: lesson learn, good practice, sustainability

1. Pendekatan Proyek Pesisir

Proyek Pesisir memiliki visi terciptanya pengelolaan sumberdaya pesisir yang terdesentralisasi. Proyek Pesisir dilaksanakan untuk memberikan sumbangan berupa kumpulan praktek teladan (*good practice*) pengelolaan pesisir serta proses pengambilan kebijakan atau pembuatan keputusan. Proyek Pesisir sangat menyadari bahwa keberhasilan dari manfaat adanya proyek ini sangat tergantung kepada proses yang diterapkan dalam perumusan pengalaman sebagai *good practice* yang teruji dan layak dipromosikan lebih lanjut, strategi yang diterapkan

untuk mempromosikan *good practices* tersebut dan tentu saja keinginan lembaga-lembaga pengambil keputusan untuk mengkaji dan memanfaatkan informasi *good practice* tersebut.

Dalam rangka menerapkan model pengelolaan pesisir di lapang (tingkat desa, kabupaten dan propinsi) Proyek Pesisir telah menerapkan dua jenis strategi yang dilakukan secara simultan, yaitu strategi pengelolaan proyek secara keseluruhan dan strategi penerapan *good practice* di desa. Strategi jenis pertama lebih bersifat makro dengan tujuan khusus menyiapkan aspek kelembagaan yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek.

Strategi makro untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan proyek¹:

- Memfasilitasi pembentukan kelompok kerja tingkat propinsi
- Membangun proses perencanaan yang bersifat konsultatif dan partisipatif
- Mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu utama pengelolaan pesisir
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan implementasi awal (*early actions*)
- Menyusun kerangka monitoring proyek dan menetapkan kondisi awal sebelum proyek melakukan kegiatan
- Membangun kapasitas *stakeholder* lokal untuk perencanaan pengelolaan pesisir

Keterangan: dapat dilaksanakan secara berurutan ataupun secara simultan

¹ Diadopsi dari Working Plan Proyek Pesisir Year One (April 1997-March 1998)

Strategi mikro untuk penerapan model atau best practice pengelolaan pesisir :

- Penentuan desa (yang akan dijadikan lokasi proyek percontohan)
- Memastikan masyarakat memiliki orientasi dan siap untuk terlibat dan melakukan proses perencanaan
- Mengidentifikasi kondisi setempat sebelum proyek atau upaya pengelolaan diterapkan
- Mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu lokal
- Memastikan bahwa setiap isu tersebut adalah benar dan menyusun urutan kepentingannya
- Menyusun strategi penanganan isu-isu yang terpilih
- Memilih strategi penangan isu dan kemudian mengadopsinya
- Memulai penanganan isu
- Melaksanakan pengkajian ulang, evaluasi langkah-langkah yang telah dilaksanakan dan penyesuaian rencana

Keterangan: dilaksanakan secara berurutan

Strategi jenis kedua bersifat mikro dengan tujuan khusus proses penerapan model atau *good practices* yang diperkirakan sesuai untuk kondisi lokal. Secara filosofis, kedua jenis strategi ini dapat dipertimbangkan sebagai *good practice* untuk dipelajari dan bermanfaat bagi lembaga donor, pemerintah ataupun LSM yang berminat untuk menerapkan pengelolaan pesisir.

2. Kerangka umum program pembelajaran Proyek Pesisir

2.1 Topik pembelajaran

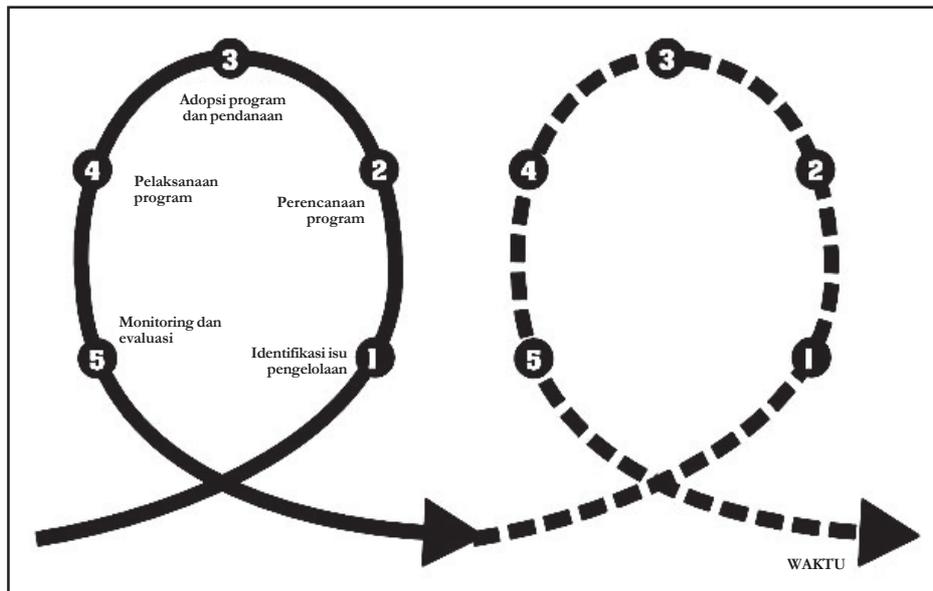
Proyek Pesisir memiliki agenda pembelajaran, komponen penting yang dianggap oleh CRC-URI sebagai cara terbaik untuk menyelenggarakan proyek yang secara serius akan memperkenalkan penerapan *good practices* kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia. Agenda pembelajaran ini penting karena sejumlah alasan. Pertama, *stakeholder* dan penentu kebijakan atau pengambil keputusan harus secara aktif memikirkan apa yang terbaik untuk menangani persoalan-persoalan lokal dan belajar dari pengalaman. Kedua, *good practice* yang pernah diterapkan oleh pihak lain dan direkomendasikan belum tentu sesuai dengan kondisi lokal. Ketiga, proyek 'serupa' banyak dilakukan di Indonesia namun kesempatan untuk mempelajari pengalaman-pengalaman mereka sangat jarang. Setelah proyek berakhir, jarang tersimpan dokumentasi yang baik tentang apa yang berhasil dan apa yang gagal, persoalan-persoalan yang dihadapi dan cara

mengatasinya. Padahal informasi sejenis itu sangat bermanfaat jika kita ingin melakukan hal-hal serupa ('proyek-proyek baru' di lokasi lain).

Secara ringkas Tobey (2000) merangkum bahwa kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk menghasilkan model pengelolaan pesisir yang lebih baik, transfer pengetahuan pengelolaan pesisir, replikasi praktek-praktek teladan pengelolaan pesisir, mengurangi upaya pencarian ulang model-model pengelolaan untuk setiap proyek baru dan melanggengkan dampak upaya-upaya yang diperkenalkan oleh proyek. Hasil kegiatan pembelajaran tersebut merupakan landasan untuk:

- Menentukan kekuatan, kelemahan, kendala dan kemajuan program-program pengelolaan,
- Mempromosikan kegiatan pembelajaran bagi staf proyek/program, lembaga donor, dan masyarakat yang berkepentingan dengan pesisir,
- Menjelaskan teori-teori perubahan, asumsi dan dampak adanya pengelolaan pesisir
- Menyebarkan praktek-praktek teladan dan pengalaman ke daerah lain ataupun proyek-proyek lain
- Menyempurnakan konsep dan instrumen pengelolaan pesisir
- Memperbaiki rancangan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pesisir yang sesuai dengan tantangan di masa yang akan datang.

Sebagai konsekuensi dari pendokumentasian yang dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan proyek, urutan topik-topik yang didokumentasikan sesuai dengan tahapan



Gambar 1. Siklus program pengelolaan wilayah pesisir (Sumber: Olsen et al., 1999).

dari siklus perencanaan yang diadopsi oleh proyek (Gambar 1). Siklus ini diawali dengan identifikasi permasalahan dan pengkajiannya, penyusunan rencana pengelolaan, adopsi rencana secara formal dan alokasi anggaran, implementasi rencana, kemudian diakhiri dengan penyesuaian dan evaluasi (Olsen *et al.*, 1999). Pendokumentasian tahun pertama (kegiatan 1997-1999) mencakup topik *early implementation action*, *provincial working group* dan kerangka umum monitoring. Topik pada tahun kedua (kegiatan 1997-2000) mencakup daerah perlindungan laut, pengembangan tambak ramah lingkungan, penyusunan profil wilayah pengelolaan. Topik pada tahun ketiga (kegiatan 1997-2001) mencakup penyusunan rencana pengelolaan di tiga skala wilayah administrasi yang berbeda dan *co-management*. Sedangkan topik pada tahun keempat (kegiatan 1997-2002) mencakup proses implementasi rencana pengelolaan dengan bahasan upaya-upaya yang dilakukan untuk melembagakan pengelolaan pesisir di setiap lokasi proyek.

2.2 Metode yang diterapkan

Agenda pembelajaran dari pengalaman proyek di lapangan dilaksanakan dengan pendekatan pendokumentasian oleh staf proyek ketika proyek sedang berlangsung. Pendekatan ini dianggap sangat tepat karena sejumlah alasan. Pertama, para pelaku proyek dan pihak-pihak yang terkait masih memiliki ingatan yang segar tentang

peristiwa atau pengalaman dengan proses pelaksanaan proyek. Kedua, pendokumentasian terkesan lebih ‘ramah’ dibandingkan dengan evaluasi. Aktivitas evaluasi dapat membuat seseorang merasa ‘terancam’ karena tidak siap dengan konsekuensi dari hasil evaluasi. Ketiga, para pelaku proyek (khususnya pengelola proyek) memiliki kesempatan untuk mengkaji-ulang strategi yang telah atau sedang diterapkan dalam kegiatan proyek. Hal ini memberikan kesempatan kepada pengelola dan staf proyek untuk menyesuaikannya dengan kondisi lokal atau perkembangan terakhir secara lebih tepat. Dengan pendekatan ini proyek secara tidak langsung menerapkan filosofi pengelolaan yang bersifat adaptif. Keempat, pendokumentasian kegiatan yang dilakukan memberi kesempatan kepada setiap pihak yang terlibat untuk mempelajarinya sehingga terbentuk tim yang memiliki orientasi yang jelas dan kritis untuk memastikan bahwa proyek ini berkembang sesuai dengan tujuannya.

Dalam pendokumentasian ini dilakukan analisis terhadap kumpulan dokumen dan publikasi yang berkaitan, wawancara dengan informan kunci, *internal workshop* dan *external workshop*. Peserta *internal workshop* terbatas hanya pimpinan dan staf proyek. *Internal workshop* dilaksanakan sebagai upaya validitas informasi dan proses penarikan kesimpulan tentang *best prac-*

tices. *External workshop* dilakukan untuk menjaga obyektivitas penarikan kesimpulan tentang *best practices*. *External workshop* tersebut dihadiri oleh berbagai *stakeholder* proyek. Mereka antara lain perwakilan lembaga donor (USAID), mitra kerja proyek dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan dari anggota masyarakat lokasi proyek, perwakilan LSM serta cendekiawan pengelolaan pesisir. Dalam lokakarya tersebut, bukan hanya informasi pengalaman yang diuji tetapi juga rumusan *best practice* dan *lessons learned* yang diusulkan staf proyek dibahas ulang oleh peserta.

2.3 Evolusi tim pembelajaran

Secara filosofis, pembelajaran harus dilaksanakan oleh setiap unit atau komponen proyek, mulai dari *Chief of Party* hingga penyuluh lapangan di desa-desa. Oleh karena itu pembelajaran harus dianggap sebagai kultur dari proyek ini dan pelaksana pembelajaran adalah semua staf proyek. Untuk memudahkan pelaksanaan agenda pembelajaran ini, kegiatan pembelajaran dari pengalaman di lapang dikoordinasikan oleh *Learning Team* IPB, Bogor. Kapasitas proyek dalam pendokumentasian ini direpresentasikan oleh kapasitas *Learning Team* dan kapasitas staf lapangan

dalam pembagian tanggungjawab selama proses penggalan *lessons learned* (Tabel 1).

Learning Team adalah kelompok staf inti yang mengembangkan kapasitas diri dengan bimbingan seorang *technical assistant* (Prof Kem Lowry dari Hawaii University). Pada tahun pertama, *Learning Team* bertanggungjawab mendokumentasikan kegiatan lapang hingga dokumen tersusun sementara staf lapang lebih berperan sebagai sumber informasi. Pada tahun kedua, tanggungjawab *Learning Team* dalam pendokumentasian sedikit dikurangi dengan memberi peran baru kepada staf lapangan sebagai pengumpul dan penyaji informasi serta mulai aktif dalam penyusunan dokumen *lessons learned* yang masih menjadi tanggungjawab penuh *Learning Team*. Pada tahun ketiga, staf lapangan mendapat peran yang lebih besar yaitu sebagai pengumpul dan pengolah informasi dan sekaligus sebagai penulis utama dokumen *lessons learned* sementara *Learning Team* lebih berperan sebagai supervisor atau pembimbing. Pada tahun keempat, staf lapangan semakin mantap dan mandiri sebagai tim pendokumentasian dan *Learning Team* lebih berperan sebagai koordinator yang menyiapkan panduan.

Tabel 1. Peran dan tanggung jawab *Learning Team* dan para staf lapangan dalam pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir (1998-2001)

Tahun	Learning Team	Staf lapangan
1998/99	Menyiapkan panduan, mengumpulkan informasi, menyiapkan informasi, menyusun tulisan, presentasi tulisan, pengembangan diri (<i>building capacity</i>)	Menyiapkan informasi
1999/00	Menyiapkan panduan, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, menyusun tulisan, presentasi tulisan, pengembangan diri (<i>building capacity</i>), transfer pengetahuan	Menyiapkan informasi, mengumpulkan informasi, presentasi tulisan
2000/01	Menyiapkan panduan, menyusun tulisan	Mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, menyusun tulisan, presentasi tulisan
2001/02	Menyiapkan panduan, menyiapkan dan presentasi <i>summary paper</i>	Mengumpulkan informasi, menganalisis, menyusun tulisan, presentasi tulisan.

Pemahaman pengelola dan staf proyek terhadap pentingnya belajar dari pengalaman secara keseluruhan menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendokumentasian. Pemahaman ini akan menentukan apakah pembelajaran merupakan budaya dari proyek atau tidak. Pengalaman kami dalam melaksanakan kegiatan pendokumentasian menemui sejumlah kendala, antara lain:

- Pemahaman staf proyek terhadap kegiatan pendokumentasian dan tujuannya,
- Pemahaman staf proyek terhadap filosofi metodologi yang diterapkan,
- Kapasitas staf proyek untuk melakukan pendokumentasian,
- Kelancaran kerjasama antar *Learning Team* dan staf lapangan yang dipengaruhi oleh kesibukan staf lapangan dengan kegiatan-kegiatan lainnya,
- Waktu pelaksanaan,
- Penyusunan *publishable paper*,

3. Strategi melembagakan pembelajaran

Untuk kelancaran pelaksanaan program, Proyek Pesisir membangun kapasitas mitra-mitranya. Persiapan dan pembinaan khusus dilakukan oleh Proyek Pesisir untuk memperkuat PKLSPL IPB sebagai mitra pembelajaran. *Learning Team* merupakan unit kerja yang melakukan koordinasi pembelajaran melalui kegiatan pendokumentasian. Sepintas tugas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat dianggap sangat mudah. Namun pada saat membahas maksud pembelajaran dan bagaimana cara melakukannya, disadari bahwa banyak sekali masalah mengingat kegiatan ini relatif baru untuk sebagian besar anggota *Learning Team* dan staf proyek. *Learning Team* menghabiskan sebagian besar waktunya dalam awal tahun kedua proyek (1998/1999) untuk memahami pembelajaran dengan membaca dan membaca ulang literatur, membahas dan berdiskusi tentang tujuan pembelajaran sesuai dengan keperluan proyek. Dengan bantuan *technical advisor*, maka pada 6 bulan berikutnya, *Learning Team* bekerjasama dengan staf lainnya baru mampu memformulasikan tujuan dan metode pembelajaran tersebut.

Saat ini kegiatan *Learning Team* IPB merupakan bagian dari program-program Proyek Pesisir IPB yang dijalankan oleh Divisi

Pengelolaan Pesisir. *Learning Team* ini dapat dikatakan sebagai 'staf' divisi tersebut. Dengan demikian, sebuah *learning unit* telah ada dan kelangsungannya antara lain tergantung pada pengelola PKSPL-IPB.

4. *Lessons learned* dari pembelajaran dengan pendekatan pendokumentasian

Kegiatan pembelajaran memberikan sumbangan dalam memperbesar dampak proyek secara positif. Proyek Pesisir merencanakan kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari desain proyek, sehingga setiap tahun rencana kegiatan ini selalu merupakan bagian dari rencana proyek dan sejumlah dana disiapkan untuk pelaksanaannya. Dengan perencanaan proyek seperti itu, berbagai pihak dapat mengambil pelajaran dari pengalaman yang dihadapi proyek.

Evolusi yang terjadi dengan tim pembelajaran proyek tersebut sedikit banyak mencerminkan strategi proyek dalam melakukan intervensi positif dalam proses desentralisasi pengelolaan pesisir. Ketergantungan staf lapangan terhadap *Learning Team* dapat dianalogikan sebagai ketergantungan masyarakat ataupun pemerintah daerah terhadap proyek. Menjelang berakhirnya proyek, *critical mass* pembelajar telah terbentuk melalui proses interaksi yang kondusif antara *Learning Team* dan staf lapangan. Kemandirian staf lapangan dalam melaksanakan pendokumentasian merupakan contoh desentralisasi yang dibarengi dengan penguatan mereka.

Kelanggengan budaya pembelajaran (*learning culture*) dalam arena pengelolaan pesisir seyogyanya terjamin. Kumpulan individu yang berpengalaman (*learning critical mass*) merupakan potensi berharga untuk upaya-upaya pengelolaan pesisir Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. *Sustainability* merupakan isu penting yang sangat menantang setiap proyek. Dampak penting yang dapat menjamin *sustainability* ini adalah seberapa jauh pembelajaran ini melembaga ditengah masyarakat atau para *stakeholder*.

Dalam tahap menjelang berakhirnya Proyek Pesisir ini, kiranya perlu disiapkan strategi untuk melembagakan upaya pembelajaran pengelolaan pesisir Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak jika ingin

melaksanakan kegiatan pembelajaran antara lain topik yang akan didokumentasikan, relevansi agenda pembelajaran dengan tujuan dan tahapan proyek/program serta perkembangan pengelolaan pesisir secara nasional, dan sumberdaya yang tersedia.

5. Penutup: Lokakarya Pembelajaran 2002

Lokakarya Pembelajaran (*Learning Workshop*) tahun 2002 bertujuan untuk membahas hasil pendokumentasian terhadap sejauh mana rencana pengelolaan (*management plan*) telah dilaksanakan di tingkat desa di Minahasa (Sulawesi Utara), ekosistem teluk Balikpapan dan daerah aliran sungainya serta tingkat propinsi di Lampung. Penyajian laporan pendokumentasian dilakukan oleh perwakilan dari lokasi proyek yang telah menganalisis kegiatan dan menyusun laporan. Pedoman pelaksanaan kegiatan pendokumentasian ini disusun oleh Learning Team. Untuk menggali *lessons learned*, laporan tersebut dilengkapi dengan persoalan yang secara faktual dihadapi, kendala penyebab persoalan, dan solusi untuk menangani kendala-kendala tersebut. Laporan-laporan tersebut merupakan hasil lokakarya intern proyek yang diselenggarakan pada tanggal 15-16 Januari 2002. Dalam lokakarya hari ini (14 Februari 2002), para peserta diharapkan dapat membahas beberapa hal penting, seperti:

- Se jauh mana upaya pengelolaan pesisir yang ada di tiap lokasi proyek telah melembaga (aspek kelembagaan dan pendanaan untuk implementasinya)?
- Bagaimana hubungan antara rencana pengelolaan pesisir yang ada di tiap lokasi dengan rencana pembangunan lokal?
- Apa implikasi dari *lessons learned* yang teridentifikasi terhadap proyek dan praktek pengelolaan pesisir di Indonesia?
- Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) agar praktek-praktek teladan yang diperkenalkan oleh suatu proyek dapat efektif secara berkelanjutan?

PUSTAKA

- Crawford, B.R. and J. Tulungen. 1998. Methodological Approach of Proyek Pesisir in North Sulawesi. Working paper. Proyek Pesisir, Jakarta.
- Lowry, K. 1998. Building a coastal management learning capacity at IPB: Progress Report. Working Paper. Proyek Pesisir, Jakarta. 9 hal.
- Olsen, S.B., K. Lowry dan J. Tobey. 1999. A manual for assessing progress in coastal Management. URI-CRC, Narragansett. 56 hal.
- Tobey, J. 2000. Across portfolio learning. Coastal Resources Center – University of Rhode Island. (slide presentation).

KAJIAN IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN PESISIR PROPINSI LAMPUNG

Oleh :

Budy Wiryan, Ali K. Mahi, Ediyanto,
Amiruddin Tahir dan Bambang Haryanto

ABSTRAK

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung didasarkan pada isu-isu pengelolaan pesisir yang muncul di propinsi dan kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir. Proses penetapan isu utama yang perlu segera ditangani dan proses penyusunan Renstra Pesisir telah melibatkan berbagai komponen *stakeholder* yaitu pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi-instansi sektor di daerah, perguruan tinggi, konsultan, swasta, Proyek Pesisir Lampung, dan masyarakat.

Renstra Pesisir menyajikan berbagai strategi dalam menangani sepuluh isu utama pengelolaan pesisir sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, merupakan acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Propinsi Lampung untuk jangka waktu sepuluh tahun (tahun 2001-2010). Sebelum dilaksanakan Renstra Pesisir disosialisasikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Lampung yang difasilitasi oleh Proyek Pesisir Lampung. Dalam jangka waktu satu tahun setelah Renstra disetujui oleh Gubernur pada tahun 2000, Renstra Pesisir Lampung telah menjadi acuan bagi sebagian kecil pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam menyusun program pengelolaan sumberdaya pesisirnya.

Dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir sesuai Renstra, pemerintah dan masyarakat di daerah masih menghadapi berbagai kendala antara lain kejelasan substansi Renstra untuk dituangkan kedalam program kabupaten/kota, legalisasi Renstra serta kemampuan dan kepedulian sumberdaya manusia di instansi/dinas di daerah.

Kata Kunci: Rencana strategis propinsi, pengelolaan sumberdaya pesisir, rencana partisipasi

ABSTRACT

The coastal management strategic plan of Lampung Province (Renstra Lampung) was developed by taking into account some management issues that were raised by coastal stakeholder from both coastal provincial and district levels. The process of selection of some issues involved intensive participatory process of stakeholder consisting representatives of provincial and district governments/sectoral agencies, academics from local university, consultants, public, private sectors, and Proyek Pesisir. Renstra Lampung provides strategies to address 10 most prioritized coastal issues that are relevant to objectives of development of Lampung. Renstra Lampung provides 10 year guidelines for government agencies and community of Lampung to manage Lampung coastal areas (2001-2010). Its implementation was proceeded by activities carried out by provincial government and community to introduce the Renstra; these activities were facilitated by Proyek Pesisir.

Within one year after Lampung Governor approval in year 2000, the Renstra had been used as guidelines or reference to develop coastal programs by a small portion of district government agencies and community. There are some constraints identified from the implementation of the Renstra, such as lack of clarity if coastal programs listed in the Renstra should be adopted as district coastal programs, legal aspect of Renstra implementation, capacity and awareness of local government agency staffs.

Keywords: Provincial strategic plan, coastal resources management, participatory planning

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pengelolaan sumberdaya pesisir (*Coastal Resources Management Project*) di Propinsi Lampung dimulai pada bulan Agustus 1998 yang bertujuan membantu pemerintah dan masyarakat Propinsi Lampung dalam mengelola dan pembangunan wilayah pesisir secara lestari dan berkelanjutan. Kehadiran Proyek Pesisir Lampung

merupakan langkah konkrit dari Proyek Pesisir di Indonesia dalam membantu Pemerintah Indonesia untuk melakukan proses desentralisasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut, Proyek Pesisir menggunakan pendekatan dua arah (*two-track approach*). yaitu, dari bawah (tingkat desa, kabupaten dan propinsi) mengembangkan *working models* (proyek percontohan) tentang penerapan pengelolaan

pesisir secara terpadu (di Propinsi Sulawesi Utara, Lampung, dan KalTim), sementara itu, pada tingkat nasional dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran nasional tentang pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Dalam kurun waktu 4 tahun, Proyek Pesisir Lampung saat ini telah berada pada tahap implementasi siklus perencanaan pengelolaan pesisir. yang pada tahun 2000 berhasil membantu pemerintah dan masyarakat Lampung menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Wilayah Pesisir secara partisipatif oleh segenap komponen *stakeholder* di Propinsi Lampung. Renstra ini disepakati oleh *stakeholder* Propinsi Lampung untuk (1) memberikan arahan formasi, pengendalian dan bantuan dalam penyusunan prioritas program rencana aksi lintas sektoral; (2) mengarahkan dan memprioritaskan pengelolaan di suatu wilayah pesisir dan rencana *zonasi*; dan (3) memberikan sumbangan dalam perumusan sasaran/rencana nasional.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Renstra ini, perlu dilakukan kajian terhadap proses dan implementasi yang telah dilakukan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Kajian implementasi Renstra Pesisir bertujuan (1) mengetahui program-program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah dan masyarakat Lampung, (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh *stakeholders*, dan (3) mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada. Manfaat kajian adalah hasil yang didapat akan menjadi masukan bagi perbaikan proses implementasi selanjutnya, mengingat implementasi program ini baru pada tahap awal.

2. METODOLOGI

Kajian implementasi program-program renstra pesisir dilakukan baik tingkat propinsi maupun di enam kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir pada bulan Oktober - Desember 2001.

Pertanyaan utama dalam evaluasi ini adalah apakah program-program yang telah disusun dalam Renstra Pesisir Lampung tahun 1999, telah dilaksanakan oleh dinas/instansi propinsi,

kabupaten, kota, pusat, maupun dilakukan oleh dinas/instansi propinsi, kabupaten, kota, pusat maupun swadana oleh masyarakat.

Untuk menjawab pertanyaan di atas sejumlah data sekunder dikumpulkan dari program-program yang dalam dokumen dan data primer didapat dari hasil lokakarya baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota pesisir dan pengamatan lapang. Pelaksanaan lokakarya dikoordinasikan oleh masing-masing Bappeda dengan mengundang seluruh instansi terkait, masyarakat, dan juga LSM. Selain informasi program-program pengelolaan pesisir yang telah diimplementasikan, pengumpulan data telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam proses implementasi Renstra Pesisir.

Metode ini cukup efektif untuk menjaring informasi dan saran dari setiap peserta lokakarya. Lokakarya dilakukan secara bergilir sebanyak 7 kali, yaitu Kabupaten (1) Lampung Barat, (2) Tanggamus, (3) Tulang Bawang, (4) Lampung Timur, (5) Lampung Selatan, (6) Kota Bandar Lampung, dan (7) Propinsi Lampung. Dalam lokakarya ini, masing-masing dinas menyampaikan program-program yang mereka laksanakan pada tahun 2001. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara pengecekan silang (mencocokkan) data pembangunan pesisir yang telah dilakukan dengan program-program yang ada di Renstra Pesisir.

3. RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN PESISIR LAMPUNG

3.1 Pengertian dan Peran Renstra Pesisir Lampung

Renstra Pesisir Lampung merupakan perencanaan strategis untuk mencapai keadaan yang diinginkan di masa datang, yaitu terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir Lampung yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir di Propinsi Lampung. Renstra Pesisir Lampung disusun berbasiskan isu. Oleh karena itu strategi/program disusun berdasarkan isu-isu yang ada di Propinsi Lampung, yang telah diidentifikasi secara partisipatif. Dalam

konteks yang lebih luas, Renstra Pesisir berperan (1) memfasilitasi Pemerintah Daerah Lampung dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional secara menyeluruh, (2) memberikan landasan yang konsisten bagi penyusunan Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi, dan (3) mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari setiap permasalahan serta pemecahannya.

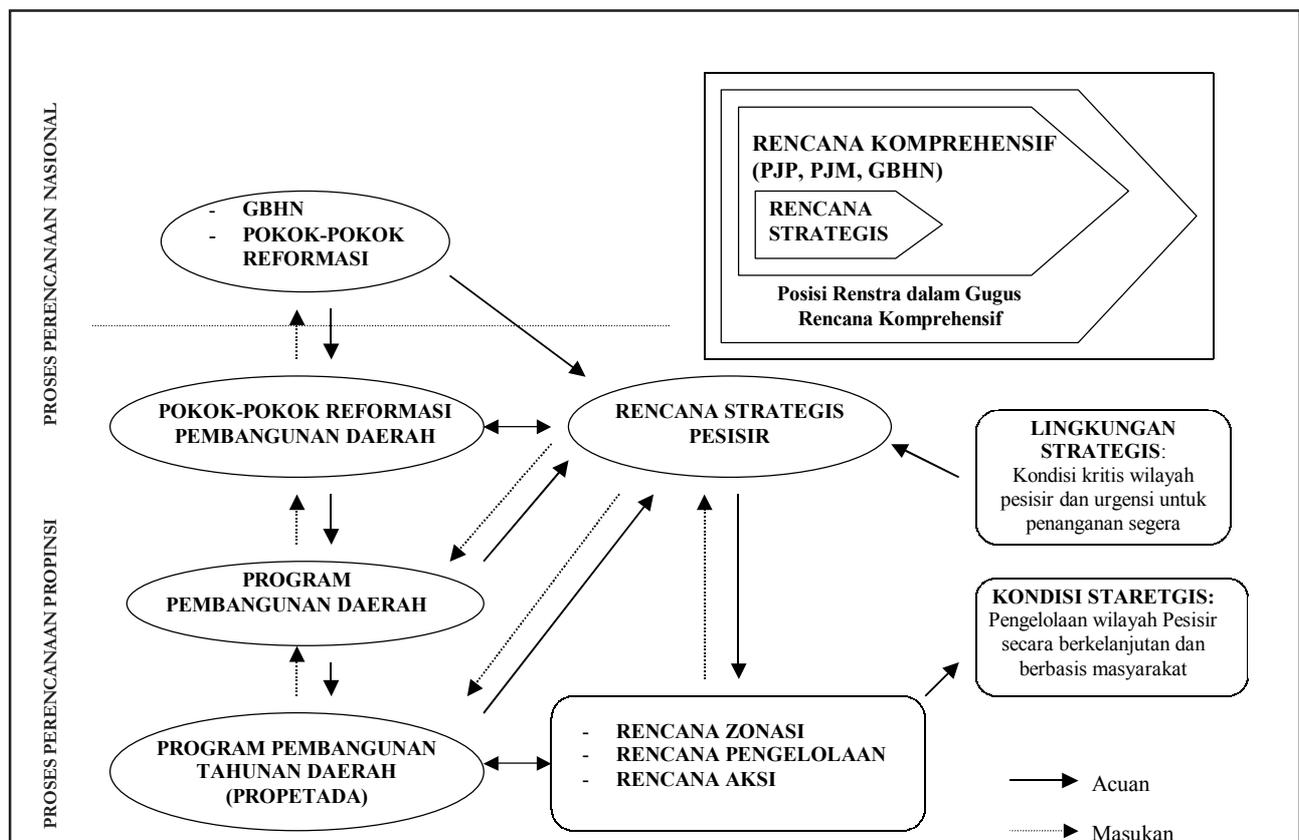
3.2 Proses Penyusunan

Proses penyusunan diawali dengan menggali isu-isu pengelolaan dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Proses pengumpulan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, artinya peran dan keterlibatan setiap komponen *stakeholder* di wilayah pesisir Lampung terlibat secara penuh. Berdasarkan hasil identifikasi isu, kemudian disusun strategi-strategi penanganannya, dan selanjutnya dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan masukan lagi (Handoko, *et al.*, 2001).

3.3 Kedudukan Renstra dalam Pengelolaan Pesisir Lampung

Kehadiran Renstra Pesisir Lampung memiliki arti yang sangat strategis dalam pengelolaan wilayah pesisir di Propinsi Lampung. Hal ini berhubungan erat dengan diimplementasikannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya tercakup pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumberdaya alam pesisir dan laut secara bertanggungjawab bagi kepentingan daerah dan masyarakatnya. Dengan adanya Renstra Pesisir maka pemerintah dan masyarakat Lampung dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut, telah memiliki pedoman yang lebih rinci. Strategi/program yang dimuat di dalam Renstra Pesisir melingkupi isu dan permasalahan yang ada di Propinsi Lampung, sehingga pemerintah dan masyarakat Lampung tinggal berusaha mengimplementasikannya.

Gambar 1 menunjukkan bahwa Renstra Pesisir Lampung disusun dengan mengacu kepada kebijakan baik yang ada pada tingkat nasional



Gambar 1. Kedudukan Renstra Pesisir Dalam Pembangunan Lampung

maupun daerah secara umum, yaitu GBHN dan pokok reformasi (nasional), pokok-pokok reformasi pembangunan daerah, program pembangunan daerah, dan program pembangunan tahunan daerah (daerah). Renstra pesisir menjadi landasan acuan bagi pengembangan program pengelolaan pesisir daerah terutama dalam pengembangan pokok-pokok reformasi pembangunan daerah dan pengembangan Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan Spesifik, serta Rencana Aksi. Sebaliknya pula, Renstra Pesisir menjadi masukan bagi penyusunan perencanaan program pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam program pembangunan daerah dan program pembangunan tahunan daerah. Keberadaan Renstra Pesisir Lampung ini merupakan kondisi yang strategis bagi pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat, karena telah dirancang sedemikian rupa melalui pelibatan segenap komponen *stakeholder*.

3.4 Isu-isu Pengelolaan Pesisir Lampung

Berdasarkan hasil penjarangan isu yang dilakukan dari tingkat yang paling rendah (desa) sampai ke tingkat kabupaten dan propinsi, analisis dan pengelompokan isu, maka didapatkan

sepuluh isu prioritas pengelolaan pesisir Lampung, yaitu (1) rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), (2) rendahnya penataan dan penegakan hukum, (3) belum adanya penataan ruang pesisir, (4) degradasi habitat wilayah pesisir, (5) pencemaran wilayah pesisir, (6) kerusakan hutan, taman nasional, cagar alam laut, (7) belum optimalnya pemanfaatan objek wisata, (8) belum optimalnya pengelolaan perikanan, (9) rawan bencana alam, dan (10) intrusi air laut.

Analisis isu di atas dilakukan secara mendalam dengan melakukan kajian sebab akibat terhadap setiap isu. Dengan demikian, penentuan strategi penanganannya dapat menjadi lebih efektif untuk menangani permasalahan yang muncul. Hubungan sebab akibat dari setiap isu ini dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.5 Implementasi Program Renstra Pesisir

Berdasarkan tahun implementasinya, Renstra Pesisir diprogram untuk diimplementasikan selama empat tahun (2001-2004). Namun demikian terdapat strategi yang telah diimplementasikan pada tahun 2000. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, pada tahun 2001 terdapat 64 strategi yang seharusnya diimplementasikan, atau sekitar 59 % dari total program/strategi yang

Tabel 1. Rincian program berdasarkan tahun implementasi dalam Renstra Pesisir Lampung

No	Nama Isu	Implementasi program			
		2001	2002	2003	2004
1.	Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	9	4	-	-
2.	Rendahnya penataan dan penegakan hukum	5	4	1	3
3.	Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir	1	1	1	1
4.	Degradasi habitat wilayah pesisir	25	2	4	-
5.	Pencemaran wilayah pesisir	7	2	3	-
6.	Kerusakan hutan, Taman Nasional dan Cagar Alam laut	6	2	-	-
7.	Potensi dan obyek wisata belum dikembangkan secara optimal		-	6	-
8.	Belum optimalnya pengelolaan perikanan	6	2	2	-
9.	Rawan bencana alam	-	2	3	-
10	Ancaman intrusi air laut	1	2	-	-
	Jumlah Program	64	21	20	4

Sumber: Disarikan dari Rencana Strategis Pesisir Lampung (2000)

ada dalam Renstra Pesisir Lampung. Sedangkan pada tahun berikutnya 2002 sampai 2004 strategi yang seharusnya dilaksanakan adalah berturut-turut 21 (19%), 20 (18%), dan 4 (4%). Konsekuensi yang harus dialami adalah banyaknya program yang harus diimplementasikan pada tahun 2001. Hal ini menuntut alokasi sumberdaya yang juga lebih besar untuk mendukung program-program tersebut. Padahal, jika dilihat dari aspek pendanaan, hal ini membutuhkan dana yang cukup besar sementara Pemerintah Daerah dan masyarakat Lampung memiliki keterbatasan dalam hal ini. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya untuk menunjang pelaksanaan strategi ini agar Renstra Pesisir yang telah disusun secara partisipatif ini dapat diimplementasikan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah mengkoordinasikan program ini dengan Departemen Kelautan dan Perikanan di tingkat nasional, sehingga apabila Departemen Kelautan dan Perikanan memiliki program pengembangan pesisir dan laut di Propinsi Lampung dapat mengacu kepada Renstra Pesisir Lampung.

Dari segi kompleksitas isu, maka isu degradasi habitat wilayah pesisir sebagai isu yang sangat kompleks dan memerlukan program yang cukup banyak untuk mengatasi isu tersebut. Seperti terlihat pada Tabel 1, pada tahun 2001 penanganan isu degradasi habitat wilayah pesisir akan ditangani melalui implementasi sebanyak 25 program atau sekitar 14 % dari total program yang rencananya akan diimplementasikan pada tahun 2001. Isu lainnya yang juga memiliki strategi penanganan yang cukup banyak adalah isu rendahnya kualitas sumberdaya manusia (9 program), pencemaran wilayah pesisir (7 program), dan kerusakan hutan, taman nasional dan cagar alam laut (6 program).

3.6 Strategi Pelembagaan Renstra Pesisir

Usaha-usaha Proyek Pesisir Lampung dalam pelembagaan pengelolaan pesisir, telah dilakukan dengan cara memfasilitasi pemerintah daerah, masyarakat, LSM, baik dalam penguatan maupun pembentukan lembaga formal pengelolaan pesisir, yaitu:

1. Pada tingkat propinsi, telah dibentuk Tim Pengarah Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Propinsi Lampung (22 Mei 1999) oleh

Gubernur Lampung. Tim ini beranggotakan dinas/instansi terkait, seperti Bappeda, Bapedalda, PMD, Dinas PU Pengairan, Dinas Perikanan dan kelautan, PSL Unila, PKSPL IPB, Gapindo, HNSI, LSM (Watala, Mitra Bentala), Kehutanan, TNI-AL Panjang. Tim ini bertugas untuk memberikan masukan kepada Gubernur Lampung dalam menentukan kebijaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan di Propinsi Lampung.

2. Pada tingkat kabupaten (Kabupaten Lampung Selatan), telah dibentuk Tim Pokja Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Lampung Selatan (24 September 1999), kemudian diperbaharui dengan pembentukan Tim Pengelolaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil (3 Juli 2001) oleh Bupati Lampung Selatan. Tim ini beranggotakan dinas/instansi terkait, seperti Bappeda, Badan Tata Ruang dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Kelautan, BPN, Dinas Pertambangan dan energi, Dinas Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, PMD, Pol PP dan Linmas, dan sekretariat Kabupaten Lampung selata. Tim ini bertugas melakukan koordinasi, penataan pengelolaan dan batas wilayah, serta memberikan saran kepada Bupati tentang pengelolaan wilayah pesisir, dan, dan pulau-pulau kecil di Lampung Selatan.
3. Di tingkat dinas/instansi baik dinas/instansi propinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir, proyek pesisir Lampung memfasilitasi proses pembuatan renstra baik tingkat propinsi, kabupaten dan dinas/instansi dengan cara memberikan masukan program-program pengelolaan pesisir seperti yang tertuang di dalam Renstra Pesisir untuk dapat dimasukkan ke dalam renstra propinsi, kabupaten/kota, dan dinas/instansi. Dengan masuknya program-program pengelolaan pesisir seperti yang tertera dalam renstra pesisir maka untuk jangka waktu lima tahun ke depan (2001-2005), program-program pengelolaan pesisir akan dapat terlaksana.
4. Di tingkat masyarakat, LSM dengan cara mengikutsertakan masyarakat/LSM mengikuti pertemuan-pertemuan, lokakarya, workshop,

dan kursus mengenai pengelolaan pesisir baik di daerah maupun tingkat nasional. Sehingga kader-kader tersebut akan dapat mendukung pelaksanaan rentra pesisir yang telah dibuat berbasiskan masyarakat tersebut.

4. EVALUASI IMPLEMENTASI RENSTRA

4.1 Relevansi Program Kabupaten dengan Program dalam Renstra

Program-program pengelolaan pesisir kabupaten/kota pada tahun 2001 belum sepenuhnya mengacu pada Renstra Pesisir Lampung. Karena substansi pengelolaan pesisir disusun dalam skala propinsi. Dan pada tahun yang sama (2001) seluruh dinas/instansi baik propinsi maupun kabupaten/kota masih dalam proses pembuatan renstranya masing-masing.

Pada saat renstra pesisir diluncurkan bulan Mei 2000, UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, baru mulai disosialisasikan dan berlaku efektif sejak Januari 2001, sedangkan proses penyusunan renstra pesisir telah dilakukan sejak juni 1999, sebagai tindak lanjut penyusunan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung. Oleh karena itu di dalamnya terdapat beberapa strategi yang seharusnya merupakan wewenang kabupaten tertuang sebagai wewenang propinsi, setelah disesuaikan dengan PP 18/2000, tentang Kewenangan Pusat dan Propinsi.

Akan tetapi apabila dicermati dengan seksama strategi yang tertuang di dalam renstra pesisir sangat relevan untuk dilaksanakan oleh kabupaten, dengan cara menyelesaikan isu masing-masing kabupaten. Dari sepuluh isu yang menjadi isu propinsi tidak semuanya berlaku di kabupaten/kota, kecuali untuk Kabupaten Lampung Selatan.

4.2 Program Pengembangan Pesisir Propinsi

Jika melihat proyek pengelolaan pesisir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Lampung pada tahun 2001 seperti tercantum pada Lampiran 2, dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil dari Rencana Implementasi Program Pengelolaan Pesisir tahun 2001 dalam Renstra Pesisir yang telah diimplementasikan. Seperti terlihat pada

Tabel 2, realisasi pelaksanaan program-program dalam Renstra Pesisir untuk tahun 2001 untuk setiap isu pengelolaan yang hendak ditangani masih sangat kecil prosentasinya. Dilihat dari jumlah program pengelolaan, maka pengelolaan terhadap isu degradasi sumberdaya pesisir merupakan isu yang paling banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Lampung, yaitu sebanyak 9 program. Namun jika dibandingkan dengan rencana yang terdapat di dalam Renstra Pesisir, maka pelaksanaan program untuk penanganan isu degradasi habitat wilayah pesisir ini masih sangat kurang, yaitu baru sekitar 36,00 %. Penanganan isu belum adanya penataan ruang wilayah pesisir yang sebenarnya diprioritas untuk tahun 2002 dan seterusnya, justru mendapatkan perhatian dengan pelaksanaan 1 program. Hal ini sesuai dengan rencana implementasi program 2001 dalam Renstra Pesisir. Isu potensi dan objek wisata belum dikembangkan secara optimal dan isu kerusakan hutan, taman nasional dan cagar alam laut juga mendapatkan penanganan isu (implementasi program) dibandingkan isu degradasi habitat lingkungan pesisir. Hal ini terlihat dari prosenstasi realisasi program yang diimplementasikan tahun 2001 dibandingkan dengan rencana implementasi dalam renstra, yaitu masing-masing 75 % dan 66,67 %. Sebaliknya isu rendahnya penataan dan penegakan hukum serts ancaman intrusi air laut pada tahun 2001 belum ditangani.

Sumber pembiayaan untuk implementasi Renstra Pengelolaan Pesisir pada Tahun 2001 berasal dari tiga sumber yaitu APBD, APBN dan dana hibah (Tabel 2). Untuk implementasi pengelolaan pesisir di Propinsi Lampung, Pemda Propinsi Lampung mengalokasikan dana sebesar Rp. 4.303.648.000,- untuk membiayai 24 program pembangunan di wilayah pesisir. Anggaran tersebut belum termasuk anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah di masing-masing Kabupaten/kota pesisir. Implementasi program pengelolaan wilayah pesisir di Propinsi Lampung juga dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, khususnya dari Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Direktorat Jenderal Kelembagaan. Program-program yang diimplementasikan oleh oleh Departemen Kelautan dan

Tabel 2. Realisasi implementasi program pengelolaan Pesisir di Propinsi Lampung

No	Nama Isu	Renstra 2001	Realisasi Implementasi		
			APBD	APBN	Hibah
1.	Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	9	1	-	-
2.	Rendahnya penataan dan penegakan hukum	5	0	-	-
3.	Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir	1	1	1	-
4.	Degradasi habitat wilayah pesisir	25	9	-	1
5.	Pencemaran wilayah pesisir	7	3	-	-
6.	Kerusakan hutan, Taman Nasional dan Cagar Alam laut	6	3	-	-
7.	Potensi dan obyek wisata belum dikembangkan secara optimal		3	-	-
8.	Belum optimalnya pengelolaan perikanan	6	4	-	1
9.	Rawan bencana alam	-	-	-	-
10.	Ancaman intrusi air laut	1	-	-	-
11.	Pulau-pulau kecil	13	-	-	1
Jumlah Program		64	24	1	3

Perikanan adalah (1) Rehabilitasi ekosistem dan pemberdayaan masyarakat di Pulau Tegal dan Puhawang, Lampung Selatan; (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Pesisir Teluk Lampung dan (3) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Lampung Selatan dan Lampung Timur. Total anggaran yang dialokasikan untuk ketiga program di atas adalah Rp. 470.000.000,-. Implementasi Renstra Pesisir di tingkat masyarakat didanai oleh Proyek Pesisir, yaitu pengembangan Daerah Perlindungan Laut di Pulau Sebesi dan Pengembangan Tambak Ramah Lingkungan dan Rehabilitasi Mangrove di Pematang Pasir, Lampung Selatan. Program ini merupakan program lapangan yang dikembangkan oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB. Total anggaran yang dialokasikan untuk implementasi program di dua lokasi ini pada tahun 2001 sebesar Rp. 800.000.000,-.

4.3 Contoh Implementasi Renstra

Dalam menyebarluaskan dan memasyarakatkan Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir di propinsi Lampung, maka pemerintah dan masyarakat dengan difasilitasi oleh Proyek Pesisir Lampung telah melaksanakan percontohan pelaksanaan Renstra dalam skala kecil (*early action* = pelaksanaan pendahuluan) di tingkat desa

dan pulau kecil, yaitu di desa Pematang Pasir dan Pulau Sebesi Kabupaten Lampung Selatan.

Percontohan ini mengacu kepada Renstra dalam menangani isu degradasi habitat wilayah pesisir yaitu rehabilitasi mangrove di desa Pematang Pasir dan perlindungan terumbu karang di Pulau Sebesi. Kegiatan ini sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen Renstra Pesisir Lampung (Pemda Propinsi Lampung, 2000) pada isu poin D1 (mangrove) sasaran D.1.2. dan D.2. (terumbu karang) sasaran D.2.1. (melindungi terumbu karang) dengan prioritas pertama yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001/2002.

Percontohan ini bertujuan untuk: (a) menumbuh-kembangkan kepedulian, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat serta (b) melatih dan memberikan contoh skala kecil kepada masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam di wilayah pesisir (khususnya ekosistem mangrove dan terumbu karang) secara terpadu, berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

Kegiatan utama yang dilakukan dalam percontohan di desa Pematang Pasir adalah melaksanakan rehabilitasi mangrove bersama masyarakat, percontohan tambak ramah lingkungan, peningkatan kapasitas sumberdaya

masyarakat melalui diskusi dan pelatihan, penyusunan peraturan desa oleh pemerintah desa dan masyarakat desa melalui Badan Perwakilan Desa (BPD). Sedangkan kegiatan percontohan di Pulau Sebesi adalah peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat melalui diskusi dan pelatihan, mengembangkan daerah perlindungan laut (*marine sanctuary*) serta membangun sistem monitoring dan evaluasi ekosistem berbasis masyarakat.

5. KENDALA YANG DIHADAPI

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi yang tertuang di dalam renstra adalah:

1. Renstra Pesisir tidak dilegalisasi dalam bentuk SK Gubernur yang menyatakan bahwa renstra pesisir harus menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan wilayah pesisir Lampung.
2. Kemampuan dan kepedulian SDM di dinas/ instansi dalam meterjemahkan isu, strategi, dan program pengembangan yang ada di dalam renstra pesisir masih rendah. Oleh karena itu program-program pembangunan pesisir belum mendapatkan prioritas tinggi, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, penegakan dan penataan hukum.

Usaha-Usaha untuk mengatasi kendala

- Memasukkan program-program dalam renstra pesisir ke dalam program-program renstra propinsi, kabupaten/kota, dan dinas/insatansi propinsi serta kabupaten/kota,
- Melakukan monitoring implementasi dan sosialisasi renstra kepada staf baru dinas/ instansi baik propinsi maupun kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

Bappeda Propinsi Lampung, 2000. Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung.

Handoko, A. , B. Wiryawan, Hermawati, A. Tahir, NP, Zamani, AK. Mahi, M. Ahmad dan T. Dailami, 2001. Proses Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Lampung. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir. Bogor.

Lampiran 1. Deskripsi dan hubungan sebab akibat isu prioritas propinsi dan pulau-pulau kecil di Propinsi Lampung

A. Isu Prioritas Propinsi

No	Nama isu	Sebab	Akibat	Lokasi
1	Rendahnya kualitas sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rendahnya taraf pendidikan masyarakat <input checked="" type="checkbox"/> Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta kurangnya tenaga guru baik di SD maupun SLTP. <input checked="" type="checkbox"/> Rendahnya tingkat kesehatan lingkungan permukiman <input checked="" type="checkbox"/> Minimnya sarana dan prasarana kesehatan, serta kurangnya tenaga medis <input checked="" type="checkbox"/> Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. <input checked="" type="checkbox"/> Masih kurangnya prioritas pemerintah untuk memacu peningkatan kualitas SDM masyarakat pesisir. 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> SDA wilayah pesisir belum dimanfaatkan secara optimal <input checked="" type="checkbox"/> Pola pemanfaatan yang berkembang tidak memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan <input checked="" type="checkbox"/> Kesempatan kerja di wilayah pesisir terbatas <input checked="" type="checkbox"/> Sanitasi lingkungan permukiman masyarakat pesisir masih buruk, limbah rumah tangga justru mencemari pantai, dan rendahnya inisiatif masyarakat memiliki MCK <input checked="" type="checkbox"/> Penguasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir rendah <input checked="" type="checkbox"/> Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pesisir masih rendah <input checked="" type="checkbox"/> Kapasitas instansi terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir masih rendah dan kurang efisien 	
2	Rendahnya penataan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rendahnya kualitas sumberdaya manusia terutama yang berhubungan dengan pengetahuan nelayan tentang hukum. <input checked="" type="checkbox"/> Terlalu diutamakan kepentingan sektoral <input checked="" type="checkbox"/> Tidak transparannya proses pembuatan produk hukum <input checked="" type="checkbox"/> Terbatasnya sarana dan prasarana petugas penegak hukum <input checked="" type="checkbox"/> Masih lemahnya pelaksanaan sosialisasi produk hukum 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Menurunnya keamanan laut <input checked="" type="checkbox"/> Meningkatnya pengeboman dan penggunaan trawl <input checked="" type="checkbox"/> Terjadinya konflik kepentingan antar pengguna <input checked="" type="checkbox"/> Terjadinya konflik kewenangan antar instansi <input checked="" type="checkbox"/> Berkurangnya hutan mangrove karena ulah manusia <input checked="" type="checkbox"/> Reklamasi pantai tidak berwawasan lingkungan, dan tidak dilengkapi studi AMDAL yang baik <input checked="" type="checkbox"/> Pelanggaran proses perizinan oleh petambak besar (perusahaan) <input checked="" type="checkbox"/> Pencemaran air laut 	
3	Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Belum adanya peraturan yang tegas tentang penataan ruang wilayah pesisir, baik pedoman pelaksanaannya maupun peraturan penunjang lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Konflik kewenangan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir semakin tajam, kegiatan yang tumpang tindih <input checked="" type="checkbox"/> Pelanggaran hukum oleh pengguna sumberdaya semakin luas, misalnya dalam perusakan hutan mangrove di jalur hijau, rusaknya terumbu karang karena penangkapan ikan dengan cara pengeboman dan atau menggunakan potas <input checked="" type="checkbox"/> Pemanfaatan wilayah pesisir tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, seperti hilangnya estetika pantai, adanya pola pembangunan yang membelakangi pantai, adanya pembangunan di sempadan pantai, hilangnya akses 	

Lampiran 1. Lanjutan

	<p>Degradasi habitat wilayah pesisir</p> <p>A. Mangrove</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Pembabatan dan penggulian pohon mangrove untuk kayu/pengawet. <input checked="" type="checkbox"/> Konversi lahan mangrove untuk tambak udang. <input checked="" type="checkbox"/> Pengelolaaan pertambakan tidak berwawasan lingkungan <input checked="" type="checkbox"/> Penggunaan tanah timbul menjadi tambak <input checked="" type="checkbox"/> Pencemaran pantai (limbah industri dan minyak) <input checked="" type="checkbox"/> Urbanisasi di Teluk Lampung 	<p>masyarakat, sehingga kawasan pantai menjadi eksklusif</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Penurunan luasan vegetasi mangrove <input checked="" type="checkbox"/> Penurunan kualitas air <input checked="" type="checkbox"/> Penurunan hasil tangkapan, terutama kepiting, kerang, dan udang <input checked="" type="checkbox"/> Penurunan pendapatan pengguna mangrove <input checked="" type="checkbox"/> Erosi pantai meluas karena penurunan fungsi alami perlindungan pantai 	
<p>Degradasi habitat wilayah pesisir</p> <p>B. Terumbu Karang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Penggunaan bom dan potas (di Teluk Lampung, pesisir Lampung Barat dan Teluk Semangka) <input checked="" type="checkbox"/> Penggunaan <i>mini trawl</i> dan sejenisnya <input checked="" type="checkbox"/> Belum adanya pelampung tambak (<i>mooring buoy</i>) dan demaga di pulau-pulau kecil <input checked="" type="checkbox"/> Perusakan oleh wisatawan berupa penginjakan (<i>trampling</i>) <input checked="" type="checkbox"/> Pengambilan rumput laut alami (<i>gleaning</i>) yang merusak di pesisir Lampung Barat <input checked="" type="checkbox"/> Sedimentasi akibat reklamasi pantai di sepanjang 18 km garis pantai Bandar Lampung dan sitansi degradasi DAS, terutama di Teluk Semangka <input checked="" type="checkbox"/> Pencemaran limbah industri, rumah tangga, minyak <input checked="" type="checkbox"/> Gempa bumi dan penyebab alami lain seperti pamanasan global <input checked="" type="checkbox"/> Pengambilan karang untuk bangunan dan hiasan 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Kerusakan habitat dan berkurangnya keanekaragaman hayati <input checked="" type="checkbox"/> Penurunan kunjungan wisata bahari dan penurunan pendapatan sektor pariwisata <input checked="" type="checkbox"/> Penurunan hasil tangkapan ikan <input checked="" type="checkbox"/> Kestabilan pantai berkurang dan bertambahnya erosi/abrasi pantai di Pantai Timur dan Pantai Barat <input checked="" type="checkbox"/> Populasi penyu berkurang, yang diperparah dengan eksploitasi telur penyu di Tampang Belimbing, Tanjung Cina, P. Setrung, dan P. Segamat, serta beberapa lokasi lainnya di Pantai Barat <input checked="" type="checkbox"/> Populasi lobster dan ikan karang berkurang, seperti di pesisir Barat yang saat sekarang "miskin ikan karang akibat rusaknya terumbu karang" (Expedisi Zoosamthellae V, 1999) 		
<p>Degradasi habitat wilayah pesisir</p> <p>C. Padang Lamun, Rumput Laut, dan Pantai Berpasir</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Penurunan kualitas perairan seperti kekeruhan dan pencemaran <input checked="" type="checkbox"/> Pengambilan rumput laut alami secara berlebihan <input checked="" type="checkbox"/> Reklamasi pantai <input checked="" type="checkbox"/> Konstruksi bangunan pantai yang kurang tepat <input checked="" type="checkbox"/> Degradasi DAS dan meluasnya DAS kritis <input checked="" type="checkbox"/> Penambangan batu hiasan (Lampung Barat) dan batu gunung <input checked="" type="checkbox"/> Penggalan pasir pantai untuk bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Fungsi perlindungan alami terhadap erosi pantai menurun <input checked="" type="checkbox"/> Habitat sebagai daerah pemijahan penyu dan biota lainnya hilang <input checked="" type="checkbox"/> Penghasilan nelayan tidak berkelanjutan <input checked="" type="checkbox"/> Hilangnya estetika pantai pasir 		
<p>Pencemaran wilayah pesisir</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Masih rendahnya kepedulian industri sepanjang DAS dan pesisir terhadap sistem pengolahan limbah cair yang masuk ke perairan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Menurunnya daya dukung lingkungan dan kualitas perairan pesisir <input checked="" type="checkbox"/> Kotornya kawasan pantai oleh sampah dan 		

Lampiran 1. Lanjutan

	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Kurang ketatnya pengawasan limbah oleh instansi terkait <input checked="" type="checkbox"/> Belum jelasnya penerapan sanksi terhadap industri yang melanggar isi dokumen Amdal dan peraturan perundangan yang berlaku (PP 27/99 tentang Amdal dan UU 23/97 tentang Pengelolaan LH). <input checked="" type="checkbox"/> Rendahnya kepedulian masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta pola bangunan membelakangi pantai. <input checked="" type="checkbox"/> Sampah dari kegiatan pariwisata massal <input checked="" type="checkbox"/> Penangkapan ikan dengan potas (racun sianida) <input checked="" type="checkbox"/> Buangan minyak kotor dari kapal ikan, nelayan, dsb 	<p>menimbulkan bau yang tidak menyenangkan untuk daerah kunjungan wisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Menurunnya kualitas sumber air tanah dan meningkatnya wabah penyakit menular terhadap kehidupan masyarakat di pesisir <input checked="" type="checkbox"/> Semakin menurunnya tingkat keberhasilan budidaya perikanan (tambak dan <i>mariculture</i>) dan kegiatan ekonomi lainnya (pariwisata) 	
<p>6</p> <p>Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan Cagar Alam Laut</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya konservasi <input checked="" type="checkbox"/> Pengawasan terhadap kawasan konservasi masih terbatas, karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung <input checked="" type="checkbox"/> Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi <input checked="" type="checkbox"/> Belum tertatanya batas kawasan konservasi berupa patok/tanda permanen yang diakui oleh semua pihak <input checked="" type="checkbox"/> Adanya oknum aparat yang tidak disiplin dan menyalahgunakan wewenang 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Adanya tekanan terhadap populasi dan habitat satwa liar yang dilindungi <input checked="" type="checkbox"/> Menurunnya fungsi ekologis kawasan lindung dan cagar alam laut <input checked="" type="checkbox"/> Konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat <input checked="" type="checkbox"/> Masih berlangsungnya eksploitasi sumberdaya alam di dalam kawasan yang dilindungi 	
<p>7</p> <p>Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Usaha pariwisata bahari masih belum memberikan nilai ekonomi yang cukup memadai <input checked="" type="checkbox"/> Atraksi yang ditampilkan masih kurang menarik <input checked="" type="checkbox"/> Belum terpadunya pengembangan paket wisata bahari <input checked="" type="checkbox"/> Kurang tersedianya fasilitas wisata bahari yang terjangkau oleh masyarakat dan penyebaran panduan potensi wisata bahari sangat terbatas <input checked="" type="checkbox"/> Menurunnya kualitas pantai, perairan dan terumbu karang yang menjadi andalan utama untuk pengembangan wisata bahari <input checked="" type="checkbox"/> Adanya dampak krisis ekonomi dan keamanan <input checked="" type="checkbox"/> Belum disepakatinya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah <input checked="" type="checkbox"/> Masih adanya sikap dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung dalam menerima kunjungan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Industri rumah tangga/kerajinan tangan tidak berkembang <input checked="" type="checkbox"/> Potensi dan obyek wisata kurang berkembang <input checked="" type="checkbox"/> Adanya kegiatan pariwisata yang tidak berwawasan lingkungan <input checked="" type="checkbox"/> Salah arah investasi dan kerugian bagi pengembangan pariwisata <input checked="" type="checkbox"/> Pendapatan daerah dan masyarakat dari bidang pariwisata rendah <input checked="" type="checkbox"/> Akses masyarakat ke daerah pantai tertentu terbatas/ tidak ada 	

Lampiran 1. Lanjutan

		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rendahnya kegiatan pembinaan dan sarana pengawasan <input checked="" type="checkbox"/> Tidak terkontrolnya peningkatan jumlah dan jenis alat tangkap <input checked="" type="checkbox"/> Belum tersedianya sarana penampungan dan pengolahan hasil tangkapan <input checked="" type="checkbox"/> Rendahnya kemampuan pengelolaan ekonomi rumah tangga nelayan <input checked="" type="checkbox"/> Tidak dipatuhinya jalur-jalur penangkapan ikan yang telah ditetapkan <input checked="" type="checkbox"/> Program pembangunan sarana/prasarana perikanan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Produktivitas lahan untuk menghasilkan ikan cenderung menurun <input checked="" type="checkbox"/> Adanya konflik sosial dalam pengelolaan Tambak Inti Rakyat (TIR) <input checked="" type="checkbox"/> Menurunnya kualitas perairan untuk budidaya kerang mutiara <input checked="" type="checkbox"/> Konflik pemanfaatan perairan laut antara nelayan dengan usaha budidaya mutiara 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aktivitas penangkapan secara ilegal seperti penggunaan jaring trawl, bahan peledak, potas. <input checked="" type="checkbox"/> Konflik antara nelayan dengan usaha budidaya mutiara, perhubungan dan nelayan lain yang menyalahi jalur penangkapan. <input checked="" type="checkbox"/> Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap sehingga produktifitasnya rendah
8	<p>Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya</p> <p>A. Perikanan Tangkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Kurangnya pengawasan instansi terkait terhadap pengelolaan usaha budidaya perikanan. <input checked="" type="checkbox"/> Kurangnya dukungan analisis data ilmiah yang berkaitan dengan fluktuasi pola arus air laut dan kecenderungan sumber-sumber penyakit dalam budidaya tambak 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Terjadinya gempa, banjir, dan tanah longsor <input checked="" type="checkbox"/> Kerugian material dan jiwa manusia <input checked="" type="checkbox"/> Rasa tidak aman <input checked="" type="checkbox"/> Berjangkitnya wabah penyakit. 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Degradasi kualitas air tanah <input checked="" type="checkbox"/> Korosi konstruksi bangunan pipa logam di bawah tanah
9	<p>Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, dan banjir)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Gempa tektonik di sepanjang patahan Semangka, dan patahan yang terdapat di wilayah Bandar Lampung. <input checked="" type="checkbox"/> Terjadinya proses degradasi DAS (Daerah Aliran Sungai) <input checked="" type="checkbox"/> Adanya pembukaan lahan yang tidak terkendali di daerah hulu 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Penebangan mangrove untuk permukiman dan pertambakan di Pantai Timur <input checked="" type="checkbox"/> Masuknya air laut ke sawah <input checked="" type="checkbox"/> Eksploitasi air tanah berlebihan 	
10	<p>Ancaman intrusi air laut</p>			

B. Isu Prioritas Pulau-pulau Kecil

No	Nama isu	Sebab	Akibat	Lokasi
1	Minimnya sarana dan prasarana transportasi, pendidikan dan kesehatan	<input checked="" type="checkbox"/> Rusaknya atau tidak adanya darмага <input checked="" type="checkbox"/> Kurangnya prioritas pemerintah terhadap pembangunan di pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya <input checked="" type="checkbox"/> Anggaran pembangunan untuk pulau-pulau kecil sangat minim <input checked="" type="checkbox"/> Lokasi geografis pulau-pulau kecil relatif terpencil	<input checked="" type="checkbox"/> Sanitasi pemukiman pesisir buruk <input checked="" type="checkbox"/> Masyarakat menggunakan pantai sebagai WC umum <input checked="" type="checkbox"/> Tidak adanya wisatawan yang berkunjung/ potensi wisata tidak berkembang <input checked="" type="checkbox"/> Rendahnya kualitas pendidikan SDM <input checked="" type="checkbox"/> Rendahnya keterampilan petani/nelayan <input checked="" type="checkbox"/> Komunikasi dengan masyarakat luar tidak lancar <input checked="" type="checkbox"/> Produksi hasil pertanian dan perikanan sulit dipasarkan	
2	Kerusakan lingkungan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya	<input checked="" type="checkbox"/> Penegakan hukum dan perundang-undangan belum berjalan optimal <input checked="" type="checkbox"/> Penangkapan ikan dengan mini trawl dan pengeboman ikan <input checked="" type="checkbox"/> Keterbatasan sarana pengawasan dan aparat	<input checked="" type="checkbox"/> Tangkapan ikan masyarakat pulau semakin sedikit <input checked="" type="checkbox"/> Kerusakan habitat <input checked="" type="checkbox"/> Konflik antara masyarakat pulau dan orang luar yang mengeksploitasi SDA	
3	Belum adanya penataan ruang yang mencakup pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya	<input checked="" type="checkbox"/> Belum ada kebijakan penataan ruang yang mencakup pulau-pulau kecil	<input checked="" type="checkbox"/> Tumpang tindih pemanfaatan <input checked="" type="checkbox"/> Ketidak jelasan status lahan <input checked="" type="checkbox"/> Kepemilikan tunggal terhadap pulau kecil <input checked="" type="checkbox"/> Konflik sosial dengan masyarakat dalam maupun luar pulau	
4	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata rakyat di pulau kecil	<input checked="" type="checkbox"/> Rendahnya frekuensi penyuluhan pengembangan pertanian, perikanan, dan pariwisata di daerah pulau <input checked="" type="checkbox"/> Sulitnya mendapatkan sarana produksi pertanian <input checked="" type="checkbox"/> Keterampilan masyarakat rendah	<input checked="" type="checkbox"/> Produktivitas lahan pertanian rendah <input checked="" type="checkbox"/> Pendapatan petani pulau rendah	
5	Potensi pencemaran minyak di Teluk Semangka	<input checked="" type="checkbox"/> Kebocoran dalam pemindahan minyak di Teluk Semangka (tanki apung) <input checked="" type="checkbox"/> Kebocoran minyak mesin pada kapal nelayan/transpotasi	<input checked="" type="checkbox"/> Penurunan kualitas perairan di sekitar pulau <input checked="" type="checkbox"/> Menurunnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan <input checked="" type="checkbox"/> Kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove)	

Lampiran 2. Ringkasan program pengelolaan pesisir yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Propinsi Lampung pada tahun 2001 dan 2002

No	Proyek/Program	Dana (x Rp1000)		Dinas/instansi	Lokasi	Keterkaitan dengan isu pengelolaan yang ditangani
		2001	2002			
1	Pengembangan usaha kelembagaan perikanan	208.649	276.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	LT, LS	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya
2	Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan	96.400	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	LT	
3	Pengembangan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil	191.262	177.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	LS	Degradasi habitat wilayah pesisir
4	Pemantauan pengawasan dan pengendalian sumber – sumber air	100.000	200.000	Dinas Pengairan	LS, LT, TB	
5	Pengamanan pantai, rehabilitasi dan optimalisasi rawa	2.400.000	675.000	Dinas Pengairan	LT, TB, LS	
13	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan laut	39.000	45.000	Bapedalda	LB, LT, LS, TB	
18	Inventarisasi dan penelitian aset (perairan laut) daerah Lampung	-	75.000	Sistem informasi dan statistik	Lampung	
6	Pengelolaan sumber air dan pengendalian banjir	725.000*	-	Dinas Pengairan	Lampung	Pencemaran wilayah pesisir
14	Rencana induk pengelolaan lingkungan hidup	-	441.000	Bapedalda	Lampung	
15	Pengawasan dan pengendalian pencemaran air (Prokasi)	78.000	126.000	Bapedalda	Lampung	

Lampiran 2. Lanjutan

No	Proyek/Program	Dana (x Rp1000)		Dinas/instansi	Lokasi	Keterkaitan dengan isu pengelolaan yang ditangani
		2001	2002			
7	Pengadaan sarana dan fasilitas wisata pantai Sebalang	132.155	175.000	Dinas Promosi	LS	Potensi dan objek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal
8	Pemasaran pariwisata	75.977	318.899	Dinas Promosi	Lampung	
9	Festival Krakatau	123.600		Dinas Promosi	Lampung	
10	Pengelolaan kawasan lindung Prop. Lampung	171.427	214.456	Dinas Kehutanan	LB, TG	Kerusakan hutan, taman nasional dan cagar alam alut
11	Pengembangan peran serta masy. dalam pengembalian fungsi hutan	400.000	298.800	Dinas Kehutanan	LB, TG	
12	Pengembangan fungsi kawasan konservasi	46.000	58.500	Bapedalda	LB, TG	
16	Penyerasian pengembangan wilayah dan penataan ruang	100.000	200.000	Bappeda	Lampung	Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir
17	Pengembangan sistem informasi pembangunan	100.000	300.000	Bappeda	Lampung	Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
	Jumlah	4.262.470	3.580.655			

Sumber : Bappeda Propinsi Lampung (2001)

Keterangan :

LT = Lampung Timur

LS = Lampung Selatan

LB = Lampung Barat

TB = Tulang Bawang

TG = Tanggamus

PENYIAPAN STRUKTUR KELEMBAGAAN BAGI IMPLEMENTASI RENCANA PENGELOLAAN TELUK BALIKPAPAN

Oleh:

Ary S. Dharmawan, Jacobus J. Wenno, Achmad Setiadi,
Ari Kristiyani, Eka Sri Utami, Ramon, Agus Hermansyah,
Farid Fadillah dan Elisabeth B. Wetik

ABSTRAK

Perencanaan pengelolaan Ekosistem Teluk Balikpapan yang menerapkan siklus proses Pengelolaan Pesisir Terpadu atau PPT (ICM; *Integrated Coastal Management*) saat ini sedang memfokuskan pada tahap penyelesaian dokumen Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan (RPTB). Secara bersamaan juga sedang ditempuh persiapan adopsi formal dan pendanaan bagi implementasi program-program pengelolaan nantinya. Program-program itu telah dirumuskan pihak-pihak terkait yang berkepentingan (*stakeholders*) selama tahap identifikasi isu dan permasalahan serta tahap persiapan program.

Merupakan sebuah realitas bahwa isu pengelolaan sumber daya pesisir, PPT apalagi yang berbasiskan ekosistem daerah aliran sungai (DAS) dan perencanaan partisipatif merupakan hal-hal yang belum populer di kalangan *stakeholders*, khususnya bagi kebanyakan administrator pemerintahan. Sehubungan dengan itu, selama proses perencanaan pengelolaan Ekosistem Teluk Balikpapan yang difasilitasi oleh Proyek Pesisir KalTim hal-hal tersebut secara intensif diperkenalkan kepada *stakeholder* yang secara revolusif melahirkan dukungan *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam penyusunan dokumen RPTB maupun dukungan untuk pengimplementasian program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan diamanatkan oleh RPTB sebagai bentuk pengelolaan Ekosistem Teluk Balikpapan secara terpadu yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Akan tetapi, Fasilitator maupun *stakeholder* sama-sama berpandangan bahwa dukungan atau konstituensi (*constituencies*) tersebut diprediksi tidak akan efektif mewujudkan pengelolaan Ekosistem Teluk Balikpapan secara terpadu, bila, tidak disertai adanya struktur dan mekanisme kelembagaan formal yang pengoperasiannya ditujukan khusus sebagai wadah koordinasi implementasi dan evaluasi terhadap pengimplementasian RPTB nantinya. Selain persiapan aspek kelembagaan dan adopsi formal, sama-sama dipahami pula bahwa sejak sekarang perlu dipersiapkan kepastian rencana pendanaan secara independen dan terutama yang terintegrasi dalam siklus pendanaan pembangunan formal baik bagi pengimplementasian program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan yang diamanatkan RPTB, maupun, pembiayaan bagi pengoperasian mekanisme kelembagaan tersebut. Pelaksanaan persiapan kelembagaan dan persiapan kepastian rencana pendanaan tampaknya tidak bisa menunggu sampai rencana PPT Teluk Balikpapan (RPTB) selesai, sebab asumsi bahwa dua hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama ternyata benar.

Tulisan ini mengedepankan upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka persiapan adopsi formal, khususnya yang menyangkut persiapan struktur dan mekanisme kelembagaan bagi pengimplementasian program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan yang diamanatkan RPTB nantinya. Tulisan ini juga mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, termasuk dampak-dampak positifnya yang mungkin bisa dijadikan bahan pembelajaran.

Kata Kunci: Rencana pengelolaan Teluk Balikpapan, Daerah Aliran Sungai, adopsi formal, rencana pengelolaan, perencanaan partisipatif

ABSTRACT

Planning activities for Balikpapan Bay ecosystem management is still focusing on completion phase of Balikpapan Bay Management Plan. Meanwhile, preparation of formal adoption of management plan and budget allocation for plan implementation are in progress. Programs listed in draft of the plan have been formulated by stakeholder during identification and assessment of bay management issues and program preparation.

At the beginning of the process, local stakeholders, especially staffs of local government agencies, had less limited understandings and awareness on bay management issues, catchment area-based coastal management, and participatory planning and management. Therefore, project's early activities were focused to introduce these issues to local stakeholders. Intensive contact and communication with stakeholder resulted in their strong support and participation during development of management plan and future implementation of the plan.

Proyek Pesisir and local stakeholder are aware that such support will not be sufficient to establish an integrated bay management in the absence of formal institution that is responsible to coordinate implementation of the plan and its evaluation. To ensure and promote an integrated bay management, a certain amount of budget and its sources must be secured or allocated formally for both implementation of the programs and operational cost of such institution. Such budget planning must be fit with formal development planning system. Preparation of formal institution and budget allocation should be done punctually, i.e. it cannot wait until the plan is approved. This paper presents efforts to prepare formal adoption process, especially institutional establishment. Some identified constraints are presented, including positive impacts of the process that can be used as learning materials.

Keywords: Bay management plan; Balikpapan Bay; catchment area, formal adoption of management plan, participatory planning.

1. PENDAHULUAN

1.1 Proyek Pesisir KalTim Sebagai Fasilitator

Proyek Pesisir KalTim merupakan salah satu program lapangan dari Proyek Pesisir atau CRMP-Indonesia (*Coastal Resources Management Project in Indonesia*). Pendanaannya memanfaatkan dana bantuan USAID yang bersifat hibah sejak tahun 1996 hingga tahun 2003.

Proyek Pesisir KalTim memfokuskan kegiatannya untuk memfasilitasi pelaksanaan program Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT atau ICM; *Integrated Coastal Management*) yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. Proses yang diterapkan bersifat partisipatif melibatkan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) sebagai upaya penguatan dan desentralisasi pengelolaan sumber daya wilayah pesisir di KalTim. Selama periode 1998 - 2003, fasilitasi ditujukan bagi upaya perencanaan pengelolaan ekosistem Teluk Balikpapan, yang meliputi perairan laut dan daratan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Teluk Balikpapan. Rencana pengelolaan tersebut disusun berdasarkan isu-isu pengelolaan tertentu yang diprioritaskan oleh para *stakeholders*.

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengakomodasi, mengajak dan membuka keterlibatan *stakeholder*. Hal ini didasari pemikiran bahwa melalui partisipasi aktif *stakeholder* dukungan untuk kemitraan pengelolaan pesisir terpadu dapat diperoleh. Tujuan dari kegiatan Proyek Pesisir adalah memadukan pengelolaan perairan dan daratan melalui strategi kemitraan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat (Proyek Pesisir, 2000). Sehubungan dengan itu, implementasi Proyek Pesisir di KalTim bertujuan strategis untuk menggali dukungan (*building the constituency*) yang diperlukan untuk menyinambungkan inisiatif-inisiatif CRM

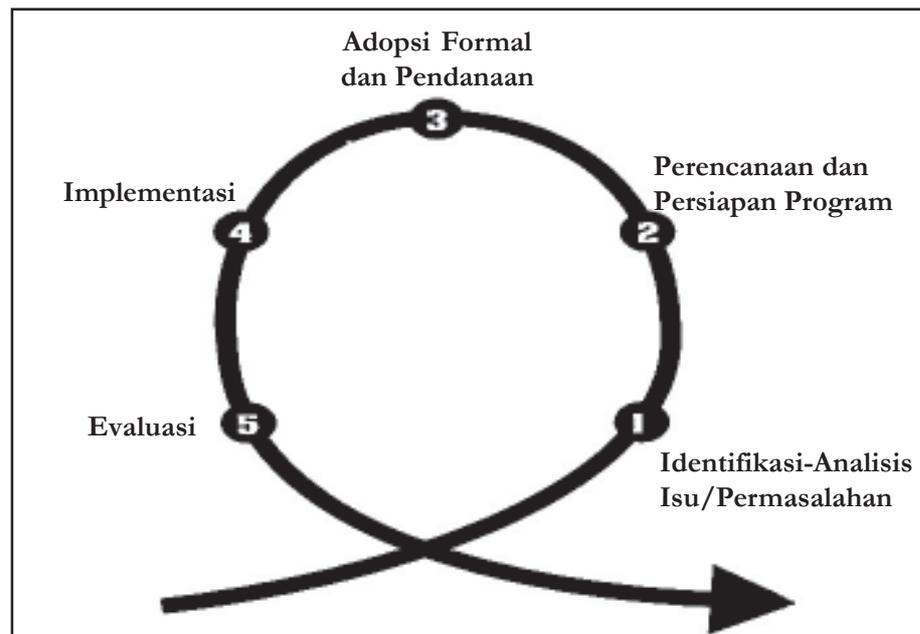
di KalTim pada era milenium selanjutnya, terutama saat setelah dukungan melalui implementasi Proyek Pesisir selesai pada tahun 2003.

1.2 Definisi Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan

Mempertimbangkan bahwa dampak-dampak negatif lingkungan hidup tidak memandang batas-batas daerah administrasi dan berpengaruh kepada *stakeholders*, maka landasan utama Rencana Pengelolaan ini adalah strategi-strategi maupun program-program keterpaduan ekosistem dan keterpaduan kepentingan para *stakeholder* sebagai bentuk-bentuk pengelelolaan yang lebih baik bagi Ekosistem Teluk Balikpapan di mendatang. Sehubungan dengan itu, Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan (RPTB) dapat didefinisikan sebagai perencanaan yang memberikan pedoman bagi pengaturan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut Teluk Balikpapan dan DAS-nya secara terpadu dimasa mendatang, melalui penerapan strategi-strategi, program-program maupun kegiatan-kegiatan pengelolaan sumberdaya dan wilayah yang bersifat tepat sasaran dan berkelanjutan, sesuai dengan kondisi serta kebutuhan lokal yang teridentifikasi dan terprediksi pada tahap perencanaan.

1.3 Fokus Tahapan Siklus Perencanaan Pengelolaan Saat Ini

Saat ini, inisiatif proses perencanaan PPT Teluk Balikpapan sedang memfokuskan kepada tahap adopsi formal dan pendanaan bagi program-program pengelolaan (Gambar 1). Strategi dan program-program yang terformulasikan dalam draft RPTB dirumuskan selama tahap proses persiapan program PPT, yakni proses perencanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut Teluk Balikpapan, yang pada dasarnya dihasilkan secara induktif. Maksudnya, selain pernyataan-pernyataan berupa strategi dan program, keba-



Gambar 1 Siklus perencanaan yang diterapkan dalam perencanaan PPT Teluk Balikpapan. Sejak pertengahan tahun 2001 sampai saat ini sedang memfokuskan pada persiapan adopsi formal dan penyiapan pendanaan.

nyakan usulan-usulan *stakeholder* adalah berupa pernyataan-pernyataan usulan aktivitas atau kegiatan. Dari kegiatan-kegiatan usulan tersebut kemudian dibuat tabulasi dan dilakukan pengklasifikasian ke bentuk strategi dan program. Sehingga struktur isi RPTB intinya terdiri atas strategi-strategi, program-program maupun kegiatan-kegiatan pengelolaan sumberdaya dan wilayah Teluk Balikpapan dan DAS-nya yang bersifat tepat sasaran dan berkelanjutan yang bisa dijadikan pedoman bagi pengaturan pemanfaatan wilayah laut dan pesisir Teluk Balikpapan oleh para *stakeholder* di masa mendatang.

2. METODOLOGI

Studi untuk tulisan ini telah dimulai sejak bulan Desember 2001. Analisis dilakukan oleh Proyek Pesisir KalTim didukung oleh perwakilan *stakeholder* dari kalangan pemerintahan yakni BAPPEDA Kota Balikpapan dan BAPPEDA Kabupaten Pasir atas dasar kedua lembaga tersebut merupakan lembaga kunci di pemerintahan di daerah administrasi masing-masing dalam mengkoordinasikan berbagai program perencanaan pembangunan. Penyusunan tulisan ini dilakukan oleh Proyek Pesisir KalTim dalam kapasitasnya sebagai Fasilitator proses perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan.

2.1 Sumber-sumber Data/Informasi

Tulisan ini disusun berdasarkan pengalaman empiris Proyek Pesisir KalTim sebagai fasilitator proses perencanaan PPT Teluk Balikpapan, didukung oleh pernyataan-pernyataan *stakeholder* kunci yang terlibat.

Selain itu, tulisan ini juga disusun berdasarkan kepada dokumen-dokumen Proyek Pesisir KalTim dan dokumen-dokumen tertulis resmi dari *stakeholder* kunci, terutama dari kalangan pemerintahan yang terlibat secara intensif selama proses perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan, misalnya BAPPEDA Kota Balikpapan dan BAPPEDA Kabupaten Pasir.

2.2 Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis sumber-sumber data/informasi adalah metode *deskriptif-eksplanatoris*. Dengan metode *deskriptif-eksplanatoris* dimaksudkan bahwa setiap data/informasi sumber yang signifikan terhadap inti atau tujuan tulisan dijelaskan baik secara umum maupun detil. Sebagai contoh, sumber informasi berupa hasil wawancara *stakeholder* diurai-jelaskan secara umum dalam arti disarikan intinya, sementara beberapa data/informasi bisa diuraikan lebih detil seperti yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi pemerintahan seperti Surat-surat Keputusan.

3. SUBTANSI RENCANA PENGELOLAAN TELUK BALIKPAPAN

3.1 Alasan Pentingnya Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan

Teluk Balikpapan memiliki fungsi yang sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di pesisir maupun daratan sekelilingnya. Ekosistem Teluk Balikpapan juga merupakan faktor vital dalam mendukung interaksi ekonomi dua daerah administrasi, Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan. Sebaliknya, perkembangan aktivitas masyarakat dan meningkatnya interaksi ekonomi di pesisir barat Kota Balikpapan dan pesisir timur laut Kabupaten Pasir (wilayah Penajam dan Sepaku) selama ini, - juga memberi dampak negatif terhadap kondisi wilayah laut dan pesisir Teluk Balikpapan.

Secara geografis, wilayah pesisir atau pantai di sekeliling Teluk Balikpapan terhubung dengan wilayah-wilayah daratan pedalaman oleh sungai-sungainya yang mengalir ke dan bermuara di Teluk Balikpapan. Di sekeliling Teluk Balikpapan hingga ke daratan-daratan pedalaman DAS-nya, beroperasi banyak kegiatan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam dan jasa yang menyumbang kepada perekonomian regional daerah-daerah administrasi Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir. Valuasi atas nilai produksi ekonomi potensial Ekosistem Teluk Balikpapan saat ini dari sektor-sektor pengolahan minyak dan gas, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan keanekaragaman hayati pesisirnya, per tahunnya minimal diperkirakan mencapai 749 juta dollar Amerika, atau sekitar 7,5 trilyun rupiah. Kegiatan-kegiatan industri pengolahan hasil-hasil kayu hutan seperti penggergajian kayu dan industri yang memproduksi kayu lapis mencirikan sebuah kegiatan industri hilir yang menerima pasokan dari industri hulunya yakni kegiatan perhutanan tanaman industri (HTI) dan perusahaan kayu hutan (HPH atau *logging*) oleh perusahaan-perusahaan swasta yang sebagian besar beroperasi di bagian utara DAS Teluk Balikpapan dan di perbatasan utara DAS Teluk Balikpapan (Gambar 2).

Teluk Balikpapan dan DAS-nya sebagai satu kesatuan ekosistem terletak di bagian tenggara

Propinsi KalTim . Daratan DAS-nya sebagian besar merupakan bagian-bagian dari daerah administrasi Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan yang pada tahun 1998 tercatat dihuni oleh penduduk dengan jumlah mencapai 175.000 orang pada kurang lebih 45.000 keluarga. Penyebaran penduduknya tidak merata. Sebagian besar terkonsentrasi di wilayah pesisir (pantai) bersama lokasi-lokasi industri dan bangunan jasa. Jumlah penduduk di DAS Teluk Balikpapan dalam kurun waktu tiga dekade terakhir (1961 - 1997) lebih banyak dua kali lipat dibandingkan tiga dekade sebelumnya (1930 - 1961).

Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang utama Propinsi KalTim . Selain angka pertumbuhan penduduk alami akibat kelahiran dan kematian, pengaruh perkembangan Kota Balikpapan sebagai kota imigran membuat pertumbuhan penduduk di DAS Teluk Balikpapan secara kuat dipengaruhi oleh peristiwa emigrasi penduduk. Sama karakteristiknya sebagai kota pesisir, Kota Penajam juga memperlihatkan gejala yang serupa. Tumbuh sebagai kota pesisir imigran. Diindikasikan oleh bertambahnya luas permukiman seiring dengan semakin banyaknya aktivitas ekonomi baru di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan penduduk di DAS Teluk Balikpapan dalam kurun waktu tiga dekade terakhir (1961 - 1997) sebesar 1,65 persen per tahunnya. Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, penduduk DAS Teluk Balikpapan diperkirakan akan mencapai lebih dari 200.000 jiwa pada tahun 2015.

Dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk seperti itu, akan semakin banyak lagi pihak yang akan memanfaatkan berbagai sumberdaya pesisir dan laut Teluk Balikpapan. Semakin banyak penduduk akan membutuhkan banyak ruang untuk hidup dan beraktivitas ekonomi serta akan semakin memperbesar kompetisi antar pengguna sumberdaya. Di sisi lain, dari berbagai pengalaman wilayah pesisir lain di mana-mana, semakin banyaknya penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir biasanya disertai dengan meningkatnya dampak negatif terhadap kondisi lingkungan hidup pesisir dan lautnya.

Sebagai wilayah atas (*upland*), DAS Teluk Balikpapan berpeluang memberikan dampak perubahan lingkungan hidup kepada wilayah



Gambar 2 Rangkaian kegiatan industri hulu dan industri hilir merupakan sektor penggerak roda perekonomian di Teluk Balikpapan dan wilayah DAS-nya. Sangat perlu menerapkan metode-metode ramah lingkungan untuk mempertahankan kualitas ekologis lingkungan.

pantai dan laut Teluk Balikpapan sebagai wilayah bawahnya. Berbagai bentuk buangan dari daratan bagian kelurahan-kelurahan yang ada di dalam DAS Teluk Balikpapan, baik buangan di permukaan maupun yang meresap ke dalam tanah, secara gravitasi pada akhirnya bisa sampai di pesisir dan perairan Teluk Balikpapan. Sehingga memiliki pengaruh ekologis kuat yang dapat merubah kualitas lingkungan hidup perairan Teluk Balikpapan. Sebaliknya, wilayah bawah pesisir-pantai Teluk Balikpapan merupakan wilayah konsentrasi penduduk yang secara ekonomi regional membutuhkan pasokan dan respon ekonomi (suplai komoditi atau jual-beli barang dan jasa) dari wilayah belakang sekitarnya (*hinterland*) hingga wilayah daratan pedalaman di wilayah atas (*upland areas*) yang merupakan bagian hilir dan hulu DAS Teluk Balikpapan.

Limbah kegiatan-kegiatan di darat yang terbawa oleh limpasan air, cepat atau lambat,

akan dapat merubah kondisi perairan daerah-daerah pesisir yang merupakan bagian terendah dari sebuah sistem DAS. Oleh karenanya, DAS merupakan hal pokok yang penting dalam pengelolaan pesisir. Sehubungan dengan itu, dibutuhkan sebuah upaya pengelolaan terpadu berbagai sumber daya pesisir dan laut Teluk Balikpapan yang harus memadukan pengelolaan daratan dan perairannya (*integrated land and water management*), antara perairan Teluk Balikpapan dan DAS-nya.

3.2 Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan dan Implementasinya

Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan pada hakekatnya adalah sebuah perencanaan strategi jangka panjang dengan siklus waktu implementasi 10 sampai 15 tahun yang disusun dan diterapkan oleh *stakeholder* dari berbagai kalangan di Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir

khususnya maupun di Propinsi KalTim umumnya, untuk pengelolaan Ekosistem Teluk Balikpapan yang terdiri dari perairan laut Teluk Balikpapan dan daratan daerah aliran sungainya (DAS Teluk Balikpapan). Pelaksanaan periode implementasi secara formal diasumsikan mulai awal tahun 2002. Dipilihnya siklus waktu 10 sampai 15 tahun untuk implementasi Rencana Pengelolaan ini didasari oleh upaya pengadaptasian implementasi Rencana Pengelolaan ini yang bersifat menyokong dan melengkapi pelaksanaan siklus jangka menengah-panjang pembangunan daerah.

3.3 Isu Utama dan Visi Pengelolaan Lingkungan Hidup Teluk Balikpapan

Berdasarkan proses-proses konsultasi dan diskusi bersama *stakeholder* selama tahap identifikasi serta analisis isu, permasalahan-permasalahan sebagaimana ditampilkan Boks 1 merupakan isu-isu utama yang harus ditangani dalam pengelolaan Teluk Balikpapan selanjutnya. Sebagian permasalahan itu diakibatkan oleh konflik antar pengguna sumberdaya alam. Jika permasalahan-permasalahan tersebut tidak ditangani, tidak tertutup kemungkinan kompetisi pengelolaan Teluk Balikpapan akan semakin tidak demokratis di waktu mendatang. Permasalahan-permasalahan tersebut juga bisa menyebabkan konflik lebih lanjut atau konflik baru antar penggunanya. Mempelajari banyak pengalaman yang kurang menguntungkan di waktu lampau dan menuju reformasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang terdesentralisasi dan adil, permasalahan-permasalahan tersebut harus ditangani untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan konflik lama dan mencegah konflik baru antar pengguna Teluk Balikpapan.

Karakter dasar dari pengelolaan yang lebih baik di sini adalah pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Berkenaan dengan itu, suatu keadaan yang ingin dicapai dari implementasi Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan yang merupakan visi pengelolaan Teluk Balikpapan adalah:

Terciptanya masyarakat yang sejahtera dan lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Boks 1.

Isu-isu utama dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Teluk Balikpapan

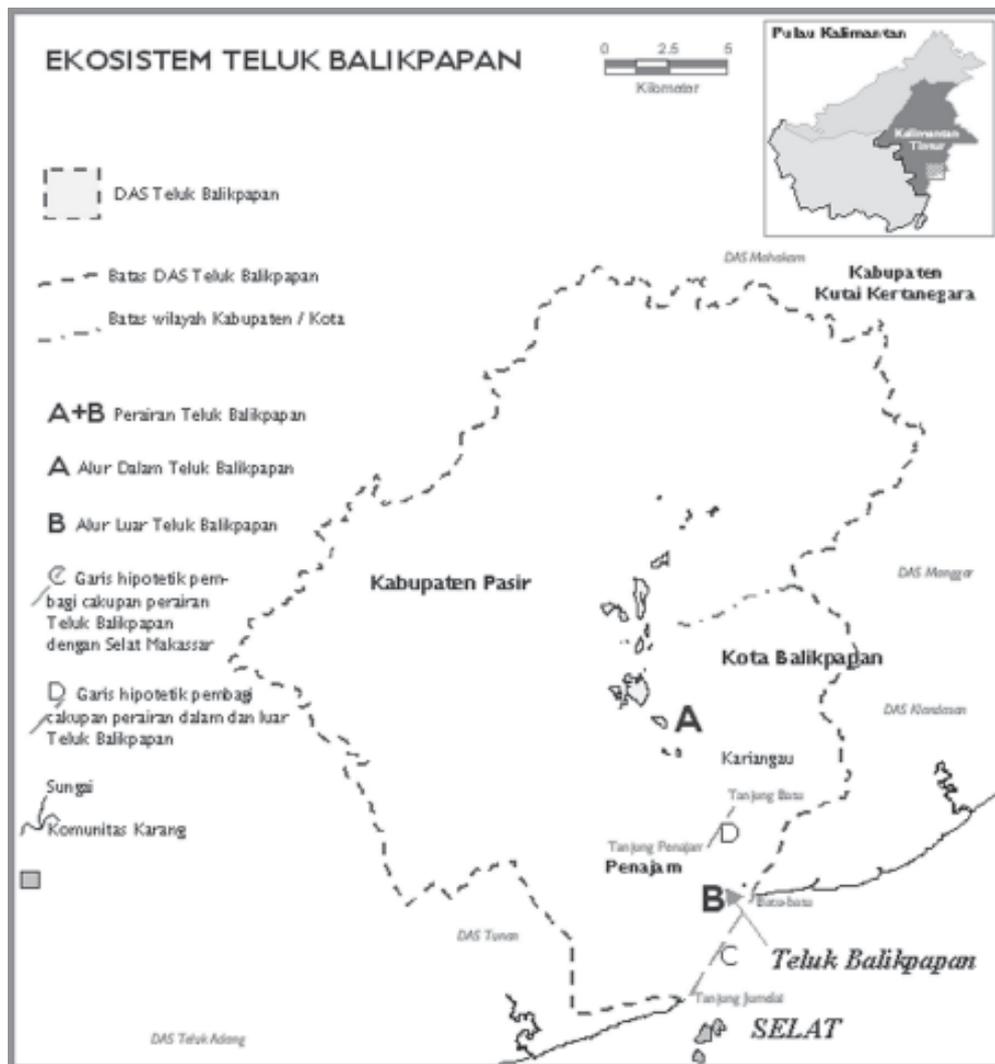
- Terbatasnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat
- Berkurangnya hutan alami
- Rusaknya kawasan lindung (contohnya Hutan Lindung Sungai Wain)
- Perencanaan Tata Ruang yang tidak terkoordinir dan penggunaan tanah yang tidak konsisten
- Meningkatnya laju erosi dan sedimentasi
- Meningkatnya polusi perairan
- Rusaknya ekosistem mangrove
- Potensi ekowisata yang belum dikembangkan secara optimal
- Masih perlu ditingkatkannya partisipasi dan kesadaran masyarakat
- Mekanisme kerja sama antar lembaga belum terpadu dan masih bersifat sektoral

Teluk Balikpapan yang sebat serta lestari melalui pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan

Partisipasi, koordinasi dan kemitraan antar *stakeholder* sesuai dengan relevansi, kapasitas dan lingkup atau bidang masing-masing merupakan kunci pengelolaan terpadu yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan program-program aksi pengelolaan dalam Rencana Pengelolaan untuk mewujudkan Visi Pengelolaan Teluk Balikpapan sebagaimana dimanifestasikan di atas.

3.4 Cakupan Wilayah Pengelolaan dan Tingkat Perencanaan

Wilayah perencanaan yang menjadi fokus Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan adalah ekosistem Teluk Balikpapan yang terdiri atas perairan laut Teluk Balikpapan, wilayah perairan estuari sekeliling perairan laut Teluk Balikpapan, wilayah daratan pulau-pulau di perairan Teluk Balikpapan dan hamparan daratan DAS Teluk Balikpapan dengan total luas mencapai 207.096 hektar (Gambar 3). Komponen-komponen geografis Ekosistem Teluk Balikpapan dapat dilihat pada Tabel 1. Batas-batas terluar dari



Gambar 3. Teluk Balikpapan dan DAS-nya sebagai fokus wilayah perencanaan dalam Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan.

wilayah fokus Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan dapat ditelusuri melalui batas-batas DAS Teluk Balikpapan batas-batas perairan teluk dari Teluk Balikpapan. Perairan Teluk Balikpapan pada dasarnya juga merupakan sistem estuari yang bertemu langsung dengan perairan laut lepas Selat Makassar. Sekitar dua kilometer dari mulut Teluk Balikpapan di lepas pantai Tanjung Jumelai terdapat sebuah ekosistem terumbu karang. Meskipun wilayah fokus pengelolaan bagi Rencana Pengelolaan ini belum meliputi komunitas terumbu karang tersebut, akan tetapi sejumlah program atau kegiatan pengelolaan yang diamanatkan RPTB diarahkan untuk mencegah dampak negatif kepada komunitas terumbu karang tersebut yang merupakan ekosistem khas yang rentan terhadap perubahan lingkungan pesisir dan laut Teluk Balikpapan.

Sebuah DAS pada umumnya mencakup dua hingga lebih daerah administrasi pemerintahan, sebagaimana halnya DAS Teluk Balikpapan yang mencakup bagian-bagian daerah administrasi Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir. Konsekuensi inisiatif PPT Teluk Balikpapan memilih perairan teluk berikut DAS-nya sebagai satu kesatuan unit pengelolaan adalah harus diupayakannya keterpaduan antar daerah dan tingkat pemerintahan terkait, yang dalam PPT merupakan keterpaduan yang dinilai oleh banyak pihak sangat sulit dicapai. Di sisi lain, pengelolaan pesisir terpadu berbasis DAS seperti DAS Teluk Balikpapan merupakan pengelolaan saat mana aktivitas-aktivitas perumusan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan strategi, program dan kegiatannya, yang biasanya dominan terjadi di tingkat kabupaten, tingkat kota atau

tingkat antar kabupaten-kota atau yang lebih tinggi. Sehubungan dengan DAS Teluk Balikpapan mencakup bagian-bagian daerah administrasi Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir, maka perencanaan PPT Teluk Balikpapan ini berada pada tingkat kabupaten/kota, atau level antar kabupaten-kota.

3.5 Prinsip Pendekatan Perencanaan Pengelolaan Teluk Balikpapan

Perencanaan merupakan salah satu bidang yang paling cepat berkembang dalam dekade terakhir, ditandai oleh sangat banyaknya bermunculan metodologi-metodologi baru, istilah-istilah dan sistem, tetapi sedikit saja yang secara langsung sesuai untuk diterapkan (Dutton, 1993). Sejak Oktober 1998, beberapa paradigma baru dicoba untuk diterapkan bagi pembangunan atau pengelolaan Ekosistem Teluk Balikpapan yang tercermin oleh prinsip-prinsip pendekatan yang diterapkan dalam proses perencanaan pengelolannya yang merupakan prinsip-prinsip pendekatan dan metode perencanaan baru yang sampai saat ini kesesuaiannya efektif diterapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Pengelolaan ekosistem pesisir secara terpadu

Penerapan pendekatan, paradigma, konsep, dan proses PPT pada tataran ekosistem yang menuntut pengelolaan keterkaitan ekosistem (perairan laut Teluk Balikpapan dan DAS-nya) untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang tidak memandang batas-batas daerah administrasi.

(2) Berbasiskan isu dan permasalahan lokal serta daya dukungnya

Prinsip pendekatan yang menuntut pengelolaan sesuai dengan isu dan permasalahan setempat serta daya dukung lokal untuk menetapkan aksi-aksi pengelolaan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan *stakeholder* atau pihak-pihak lokal terkait.

(3) Penerapan asas prioritas

Pendekatan yang menuntut pengelolaan berdasarkan isu-isu pengelolaan yang dipriori-

taskan sesuai dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada untuk pengelolaan.

(4) Penerapan metode perencanaan partisipatif

Prinsip pendekatan yang menuntut pengelolaan partisipatif yang tentu harus berdasarkan perencanaan partisipatif untuk mengoptimalkan keterlibatan *stakeholder* atau pihak-pihak lokal terkait dari berbagai kalangan dalam mengelola Teluk Balikpapan dan DAS-nya secara lebih baik lagi. Didasari dengan asumsi bahwa semakin optimal partisipasi *stakeholder*, semakin demokratis kesepakatan-kesepakatan yang dicapai; dan semakin banyak partisipasi *stakeholder*, semakin cepat pengelolaan dan penanganan dilakukan. Prinsip pendekatan ini mengarahkan kepada wujud tingkatan partisipasi *stakeholder* yang tertinggi, yakni pemberian wewenang kepada *stakeholder* untuk menentukan opsi-opsi pengelolaan.

Kalangan-kalangan *stakeholder* yang berpengaruh atau diprediksi nantinya akan memperoleh pengaruh dari Rencana Pengelolaan ini terdiri atas instansi-instansi pemerintahan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok-kelompok usaha milik pemerintah dan kelompok-kelompok usaha swasta, perguruan-perguruan tinggi, serta kelompok dan anggota masyarakat umum yang merasa terpanggil untuk berpartisipasi dalam mengelola Teluk Balikpapan dan DAS-nya secara lebih baik lagi di masa mendatang.

4. PENYIAPAN KELEMBAGAAN BAGI IMPLEMENTASI RENCANA PENGELOLAAN

4.1 Penyiapan Sistem dan Struktur Kelembagaan

Dampak tahap awal yang diharapkan dari dikembangkannya proses PPT adalah terbentuknya kelembagaan formal yang dapat menjalankan fungsi koordinasi pengelolaan sumberdaya dan wilayah pesisir secara terpadu, berikut dengan kelengkapannya seperti alokasi personil, waktu dan dana (Gambar 4). Pendanaan di sini adalah bagian dari konteks pendanaan secara keseluruhan yang diharapkan

mencakup pendanaan implementasi program atau kegiatan pengelolaan yang telah ditetapkan dalam rencana PPT yang telah dihasilkan. Penyiapan lembaga ini tidak selalu harus pembentukan lembaga baru. Tapi paling tidak ada sistem, struktur dan mekanisme kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi pengaturan dan koordinasi PPT selanjutnya yang didukung dengan mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis dan aspiratif (*good coastal governance*).

Menuju terwujudnya dampak tahap awal tersebut, inisiatif perencanaan PPT Teluk Balikpapan telah dan terus mengembangkan beberapa strategi kelembagaan yang sangat mempertimbangkan pandangan dan dilandasi oleh keputusan *stakeholder* baik di Kabupaten Pasir maupun Kota Balikpapan.

Ada sebagian *stakeholder* dari kalangan lembaga pemerintahan di Kota Balikpapan maupun Kabupaten Pasir berpandangan bahwa untuk melembagakan pengimplementasian RPTB maupun program-program pengelolaan pesisir umumnya dirasakan belum perlu untuk membentuk lembaga baru di daerah administrasi

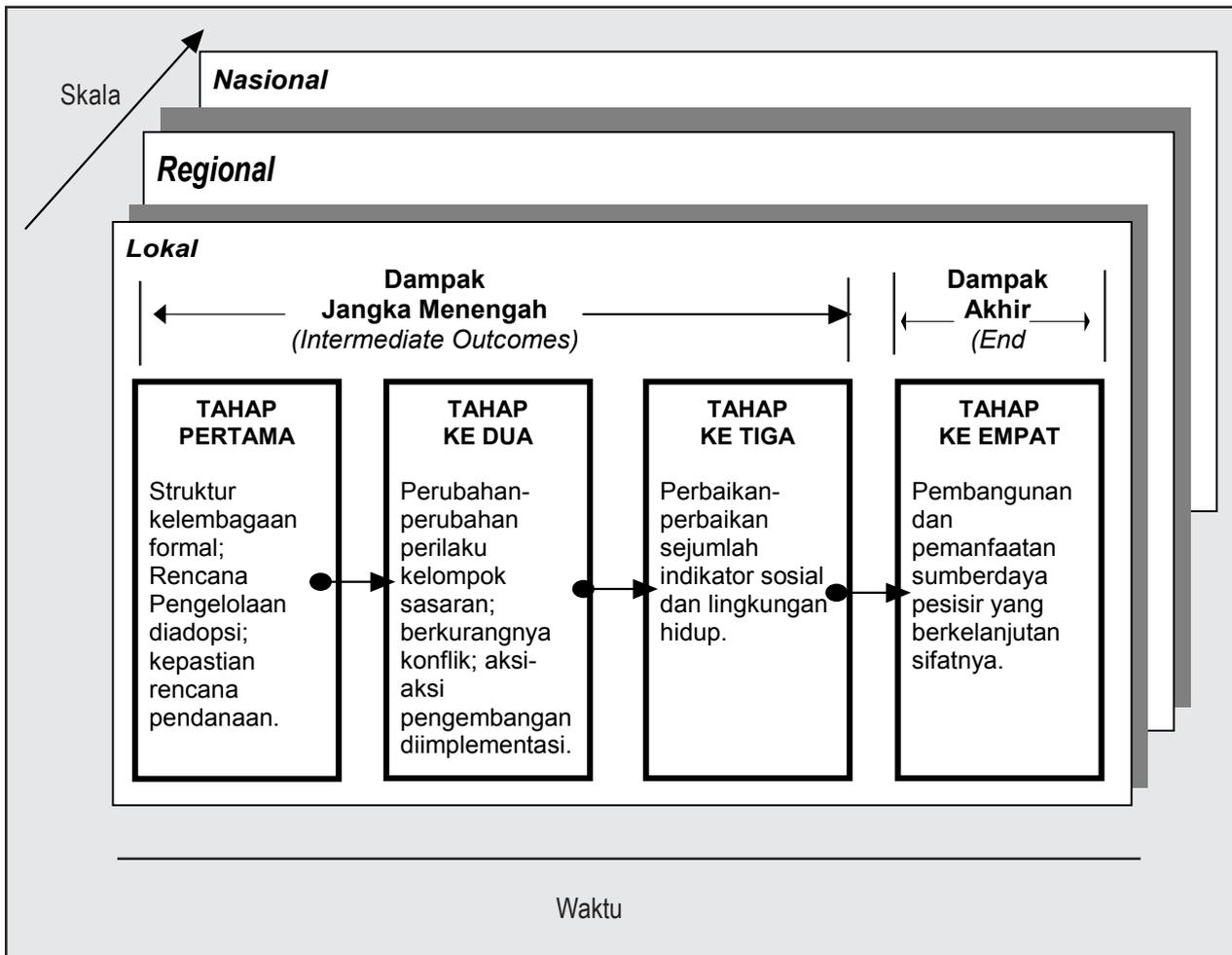
masing-masing. Cukup ditempuh strategi memberdayakan lembaga-lembaga yang ada dan menunjuk salah satu di antaranya sebagai koordinator. Untuk memenuhi kebutuhan perlunya ada lembaga yang memiliki kapasitas pengkoordinasian, bisa saja dipilih satu lembaga yang selama ini memiliki fungsi koordinasi (seperti BAPPEDA atau BAPEDALDA) dan memberikannya mandat untuk mengkoordinir implementasi PPT selanjutnya.

Namun, *stakeholders* Kota Balikpapan maupun Kabupaten Pasir umumnya tidak keberatan bila dikembangkan dulu model uji coba seperti Gugus-gugus Tugas (*task forces*) di masing-masing daerah administrasi maupun Kelompok-kelompok Kerja Gabungan (*joint-working groups*) dan mendukung pengorganisasian gerakan peduli Teluk Balikpapan di tingkat masyarakat Balikpapan dan Pasir (*grass-root organizing movement*). Kesemuanya itu merupakan cikal-bakal yang dipersiapkan bagi struktur dan mekanisme kelembagaan yang bersifat kerja sama antar Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir di masa mendatang untuk pengimplementasian RPTB maupun pengelolaan pesisir terpadu lintas daerah

Tabel 1. Komponen-komponen Ekosistem Teluk Balikpapan sebagai wilayah fokus Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan

Struktur Lingkungan Fisik Utama	Komponen Lingkungan Geografi Fisik		Luas
Lingkungan Perairan	Sistem Marin Teluk Balikpapan	Perairan Dalam Teluk Balikpapan	6.303
		Perairan Luar Teluk Balikpapan	5.393
		<i>Total Wilayah Perairan Laut</i>	11.696
	Sistem Estuari Teluk Balikpapan	Wilayah Perairan Estuari Sisi Barat	3.285
		Wilayah Perairan Estuari Sisi Timur	1.013
		<i>Total Wilayah Perairan Muara</i>	4.298
		<i>Total Lingkungan Perairan</i>	15.994
Lingkungan Daratan/ Terestris	Wilayah DAS Teluk Balikpapan		190.083
	Wilayah Daratan Pulau-pulau di Perairan Teluk Balikpapan		1.019
	<i>Total Lingkungan Daratan</i>		191.102
	<i>Total Ekosistem Teluk Balikpapan dan DAS-nya</i>		207.096

Sumber: Analisis data melalui aplikasi SIG dengan basis peta digital skala 1:50.000



Gambar 4. Tahapan dampak yang diharapkan dari proses PPT yang dikembangkan (Sumber: Adaptasi dari Olsen, et al. 1999).

administrasi seperti untuk ekosistem perairan Teluk Balikpapan.

Sejak Februari 2001, dengan difasilitasi oleh Proyek Pesisir KalTim berlangsung proses-proses pembentukan struktur kelembagaan serta pengembangan mekanisme komunikasi dan interaksinya yang dipersiapkan sebagai cikal-bakal struktur dan mekanisme kelembagaan bagi koordinasi implementasi RPTB dalam konteks PPT. Proses-proses kelembagaan (*institutional processes*) termaksud membentuk komponen-komponen kelembagaan sebagai berikut:

(1) Forum Sahabat Teluk Balikpapan (Forum STB)

Forum Sahabat Teluk Balikpapan (Forum STB) ini keanggotannya bersifat sukarela dari kalangan pribadi atau individu-individu yang berasal dari Kota Balikpapan, Kabupaten Pasir dan juga dari luar ekosistem Teluk Balikpapan,

yakni Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kota Tenggarong.

Kesediaan individu-individu tersebut pertama kali dijangar melalui penerbitan “Profil Teluk Balikpapan” di surat kabar lokal Kaltim Manuntung Post pada September 2000 yang berhasil mengumpulkan pernyataan kesediaan secara tertulis dari hampir 400 orang untuk bergabung dalam wadah “Sahabat Teluk Balikpapan” yang idenya diajukan Proyek Pesisir KalTim. Pembentukan dan pengoperasian Forum STB ini dimaksudkan agar tersedia wadah bagi kalangan anggota-anggota masyarakat umum (*grass-root*) untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Ekosistem Teluk Balikpapan.

Sejak terbentuknya pada Februari 2001, Forum STB telah melakukan sejumlah pertemuan kerja seperti untuk menyusun Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan program serta baru saja beberapa waktu lalu

melaksanakan sebuah “Dialog Publik: Misi Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten Pasir Dalam Pengelolaan Teluk Balikpapan” pada Desember 2001 di Plaza Balikpapan yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Balikpapan (BAPEDALDA Kota Balikpapan) dan Pemerintah Kabupaten Pasir (BAPPEDA Kabupaten Pasir) yang memperoleh dukungan sponsor finansial maupun non-finansial (*in-kind contribution*) dari pihak Manajemen Promosi Plaza Balikpapan, P.T. TOTAL FinaElf Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pasir.

Pertemuan perdana mengundang kesemuanya pada Februari 2001 hanya dihadiri 165 orang yang memutuskan bentuk “Forum” sebagai wadah organisasi yang diinginkan. Namun dalam sejumlah pertemuan berikutnya yang bersifat pleno, jumlah yang hadir hanya 97 orang dan dalam sejumlah pertemuan kerja serta kegiatan, jumlah yang hadir aktif semakin sedikit. Sebagai contoh, pada tingkatan rapat-rapat kerja atau kegiatan kecil (seperti pameran) misalnya, rata-rata anggota Forum STB yang kerap hadir totalnya tidak lebih dari 20 orang. Sementara untuk tingkatan kegiatan besar, seperti pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan dialog publik, jumlah anggota Forum STB yang aktif dalam persiapan dan hadir pada saat kegiatan tidak lebih dari 20 orang. Analisis sementara menyimpulkan bahwa kendala operasional ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Sifat keanggotaan Forum yang murni sukarela sementara tidak sedikit anggota yang memiliki kesibukan rutin (sekolah dan bekerja)
- Faktor geografis, di mana pusat gerakan Forum berlangsung di Balikpapan sementara tidak sedikit anggota Forum yang berdomisili di luar Balikpapan, seperti di Tanah Grogot (ibukota Kabupaten Pasir), Sepaku dan Penajam di seberang Teluk Balikpapan, atau bahkan di Samarinda (ibukota Propinsi Kalimantan yang berjarak 115 km dari Balikpapan) atau Tenggarong yang lebih jauh lagi
- Kepengurusan Forum yang telah terbentuk belum optimal menjalankan fungsi koordinasi karena sejumlah keterbatasan seperti belum memiliki peralatan atau media komunikasi yang efektif (termasuk kapasitas administrasi surat-menyerurat

Mempertimbangkan beberapa kendala teknis seperti pengupayaan dukungan dana, antara Pengurus Forum STB Proyek Pesisir Kalimantan (sebagai pendukung pembentukan dan pengoperasian Forum STB selama Proyek Pesisir Kalimantan masih beroperasi) telah saling menyetujui untuk mendukung pembentukan LSM yang akan membantu Forum STB dalam berbagai hal teknis manajemen dan keorganisasian. Telah saling disepakati untuk membentuk secara formal Yayasan STB, dengan kepanjangan yang berbeda, yakni “Yayasan Selamatkan Teluk Balikpapan” atau “*NGO of Save The Balikpapan Bay*” dalam Bahasa Inggris yang dipersiapkan untuk keperluan go international di masa mendatang. Proses pembentukan formal Yayasan STB saat ini sedang dijajagi bersama antar anggota Pengurus Forum STB didukung Proyek Pesisir Kalimantan.

(2) Gugus Tugas Pengelolaan Pesisir (KTF-CRM)

Pembentukan dan pengoperasian Gugus Tugas di masing-masing daerah administrasi yang khusus berfungsi sebagai *think-tank* untuk mencermati dan menganalisis isu-isu pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir dan laut di masing-masing daerah administrasi agar bisa memberikan masukan kepada pimpinan daerahnya berkenaan dengan penanganan isu-isu pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir dan laut.

Di Kabupaten Pasir, telah dibentuk *Kabupaten Task Force for Coastal Resources Management* (KTF-CRM) Kabupaten Pasir yang bersifat formal dalam arti pembentukan dan pengoperasiannya serta penetapan keanggotaannya didukung oleh perangkat kebijakan pimpinan daerah berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Pasir (SK Bupati Pasir Nomor 445 Tahun 2000). Komposisi keanggotaannya terdiri dari pimpinan-pimpinan lembaga kalangan pemerintahan Kabupaten Pasir seperti BAPPEDA, BAPEDALDA, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Prasarana Wilayah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan, Dinas Perindustrian dan Camat Penajam serta Camat Sepaku) maupun dari kalangan non pemerintahan (perusahaan swasta) seperti PT. ITCI Kartika Utama

(perusahaan HPH) dan PT. Inne Dong Hwa (perusahaan produksi kayu lapis).

Sementara di Kota Balikpapan dibentuk dan beroperasi *Kota Task Force for Coastal Resources Management* (KTF-CRM) Kota Balikpapan, tetapi bersifat informal dalam arti pembentukan dan pengoperasiannya serta penetapan anggotanya tidak didukung oleh perangkat kebijakan pimpinan daerah. Namun, keanggotaan KTF-CRM Kota Balikpapan telah menempuh jalur formal yakni pengajuan permohonan formal kepada pimpinan lembaga-lembaga terkait agar memberikan ijin salah seorang staf atau personilnya aktif di KTF-CRM Kota Balikpapan. Komposisi keanggotaannya terdiri dari perwakilan lembaga-lembaga pemerintahan seperti BAPPEDA, BAPEDALDA, Dinas Kehutanan, BPN, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian maupun lembaga non-pemerintahan seperti LSM (Yayasan Bina Masuia dan Lingkungan) dan Pertamina (perusahaan minyak nasional).

Meskipun KTF di masing-masing daerah administrasi didedikasikan kepada seluruh wilayah pesisir teritori daerah administrasi masing-masing, namun sejak pertengahan tahun 2000 sampai saat ini kinerja KTF baik di Kabupaten Pasir maupun Kota Balikpapan sebagian besar didedikasikan untuk mendukung inisiatif perencanaan PPT Teluk Balikpapan. Akan tetapi berbeda dengan KTF-CRM Kota Balikpapan, KTF-CRM Kabupaten Pasir dengan dukungan perangkat kebijakan formalnya, juga telah menanagani sejumlah isu pengelolaan sumberdaya dan wilayah pesisir di daerah administrasinya di luar ekosistem Teluk Balikpapan. Kinerja yang bersifat kooperatif berupa “Rapat Kerja Bersama” antara KTF-CRM Kota Balikpapan dan KTF-CRM Kabupaten Pasir juga pernah dilakukan, seperti dalam tahapan proses penting, yakni proses menyepakati Visi Pengelolaan Teluk Balikpapan pada Desember 2000, yang pada kesempatan itu juga sempat bersama-sama mengkompilasi lebih lanjut usulan-usulan strategi, program dan kegiatan berkaitan dengan perencanaan PPT Teluk Balikpapan.

Meskipun pada dasarnya tidak bersifat *ad hoc*, terutama KTF-CRM Kabupaten Pasir yang didukung oleh SK Bupati, keberlanjutan pengo-

perasiannya sangat tergantung pada proyek pembangunan yang membiayainya. Selain kendala berupa sulitnya para anggota KTF-CRM Kabupaten Pasir melakukan komunikasi yang intensif, keberlanjutan dan pengupayaan status KTF-CRM agar permanen sifatnya agar tidak tergantung kepada proyek pembangunan yang sifatnya setahun selesai, merupakan permasalahan yang sedang diupayakan pemecahannya. Sementara KTF-CRM Kota Balikpapan yang tidak didukung oleh perangkat kebijakan dari pimpinan daerah, kinerjanya sangat tergantung sekali oleh inisiatif Proyek Pesisir KalTim sebagai Fasilitator seperti untuk mengadakan komunikasi atau pertemuan membahas sesuatu.

(3) Kelompok Kerja Gabungan

Pembentuk dan pengoperasian Kelompok Kerja (*Working Groups*) pada dasarnya didedikasikan untuk mencermati dan menganalisis satu isu pengelolaan pesisir Teluk Balikpapan dan DAS-nya yang spesifik. Karena pembentukan, pengoperasian dan komposisi keanggotaannya menyatukan perwakilan *stakeholder* dari Kabupaten Pasir maupun Kota Balikpapan, Kelompok-kelompok kerja ini diistilahkan dengan “Kelompok Kerja Gabungan” (*Joint-Working Group*). Sampai saat ini, sudah terbentuk dua Kelompok Kerja Gabungan sebagai berikut:

a. Kelompok Kerja Gabungan Isu Kontrol Erosi/Sedimentasi yang terbentuk pada 20 Desember 2001 beranggotakan 18 orang (dua di antaranya perempuan) yang merupakan perwakilan *stakeholder* pemerintahan (Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan) dan LSM (LSM STB; Selamatkan Teluk Balikpapan asal Kota Balikpapan).

Kelompok Kerja Gabungan Isu Kontrol Erosi/Sedimentasi ini memperoleh asistensi teknis dari Pakar Manajemen dan Konservasi Hutan, DAS dan Tanah Fakultas Kehutanan Universitas Mulwarman yang juga Kepala Pusat Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Air Universitas Mulwarman (Dr. Sigit Hardwinarto), dan telah melakukan sebuah survei gabungan antara *stakeholder* Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan mengenai profil kondisi sedimentasi di wilayah estuari Teluk Balikpapan, serta sejumlah rapat kerja.

b. Kelompok Kerja Gabungan Isu Pengelolaan Tambak Ramah Lingkungan yang terbentuk pada 13 Desember 2001 beranggotakan 14 orang (empat di antaranya perempuan) yang merupakan perwakilan *stakeholder* pemerintahan (Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan) dan LSM (LSM STB; Selamatkan Teluk Balikpapan asal Kota Balikpapan).

Kelompok Kerja Gabungan Isu Pengelolaan Tambak Ramah Lingkungan ini memperoleh asistensi teknis dari pakar Budidaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Mulwarman (Prof. Dr. Syafei Sidik), dan telah melakukan sebuah survei gabungan antara *stakeholder* Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan mengenai profil kondisi pengelolaan tambak di wilayah pesisir Teluk Balikpapan, serta sejumlah rapat kerja.

Dari konstelasi kelembagaan tersebut bersama *stakeholder* nanti akan dikaji kemungkinannya mewujudkan sistem, struktur dan mekanisme kelembagaan bagaimana bisa dibakukan yang sesuai untuk mendukung pengimplementasian program-program PPT Teluk Balikpapan yang mengoptimalkan partisipasi *stakeholder* dari Kota Balikpapan maupun Kabupaten Pasir khususnya.

4.2 Pengembangan Model Mekanisme Kelembagaan

Lembaga-lembaga yang telah diuraikan di atas dipersiapkan sebagai cikal-bakal struktur kelembagaan bagi pengimplementasian RPTB dalam konteks PPT di masa mendatang. Mengapa perlu dibentuk tanpa menunggu dokumen RPTB selesai dan diadopsi secara formal, adalah karena saat dokumen RPRB tersebut selesai disusun, adopsi formal atau persetujuan kepada dokumen rencana PPT seperti RPTB tersebut idealnya diberikan oleh pihak-pihak pemerintah yang berwenang dan kelompok-kelompok *stakeholder* lainnya (Olsen *et al.*, 1999).

Akan lebih efektif dan efisien, bila telah terorganisir dalam sebuah forum. Selain itu, sebelum rencana PPT seperti RPTB itu selesai, kewenangan-kewenangan dan struktur kelembagaan yang dibutuhkan untuk pengimplementasian rencana tersebut sudah sebaiknya dinegosiasia-

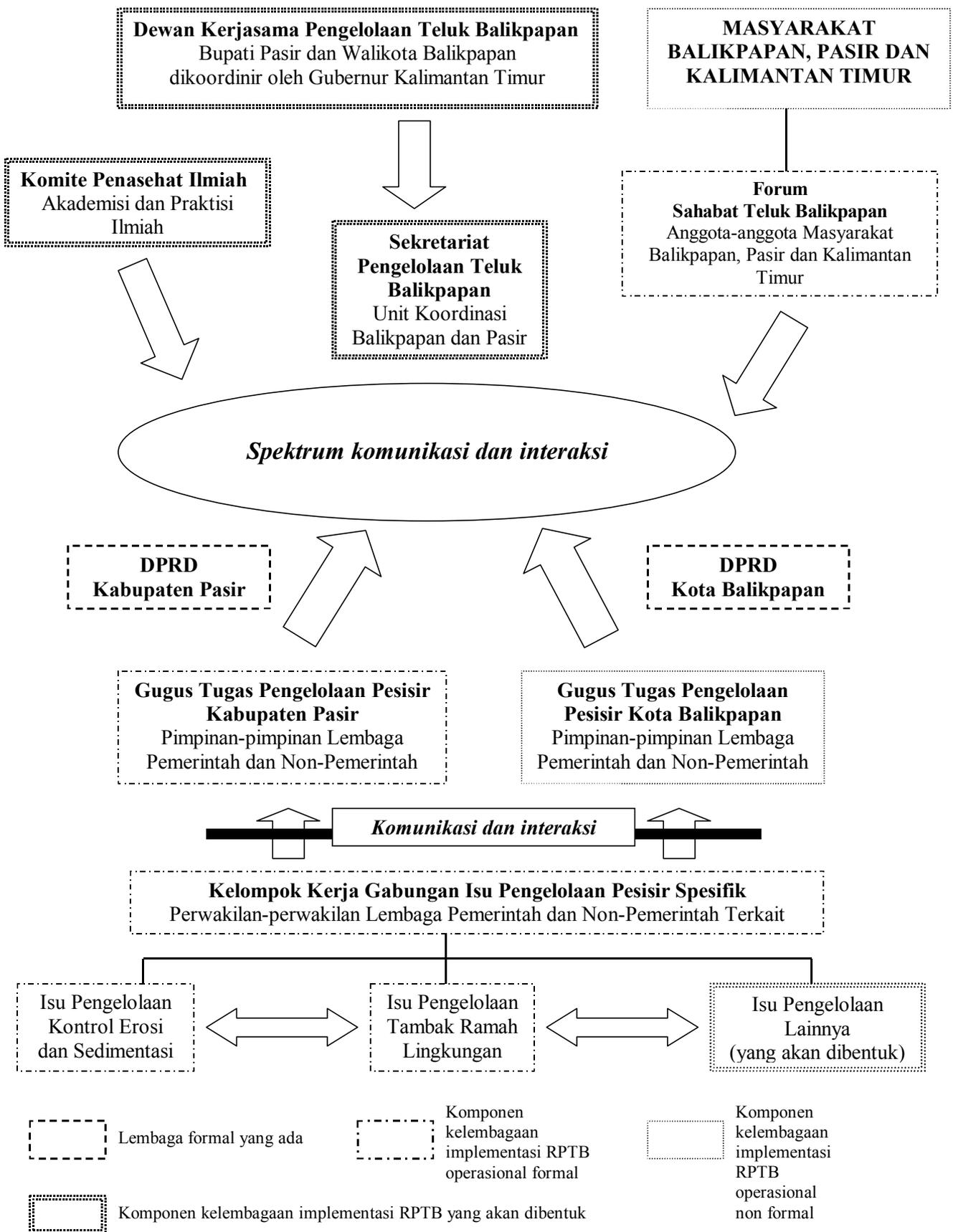
sikan antar *stakeholder* dan diformalkan sebagai cerminan sistem proses pengaturan pengelolaan pesisir yang permanen yang sekaligus menegosiasikan kepastian rencana pendanaan dan pengalokasian sumberdaya lainnya yang dibutuhkan dalam masa implementasi (Olsen *et al.*, 1999).

Sebuah sistem dan struktur membutuhkan mekanisme khususnya untuk komunikasi, interaksi dan hirarki koordinasi. Dari lembaga-lembaga yang telah terbentuk, telah dicoba-kembangkan suatu model mekanisme komunikasi dan interaksi antar lembaga-lembaga tersebut.

Sampai Januari 2002 lalu, suatu model mekanisme komunikasi dan interaksi antara Kelompok Kerja Gabungan dan Gugus Tugas telah dicoba-kembangkan. Kemudian juga diperluas kepada interaksi keduanya dengan komponen parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Meskipun pada uji coba Januari 2002 komponen parlemen hanya direpresentasikan oleh DPRD Kabupaten Pasir dan belum ada partisipasi dari DPRD Kota Balikpapan, namun sebuah mekanisme interaksi yang cukup efektif telah berlangsung (Gambar 5). Model uji coba ini diasumsikan bisa menjadi rujukan bagi pengembangan selanjutnya yang lebih baik lagi dan lebih efektif bagi implementasi RPTB.

Interaksi atau kehadiran bersama-sama, intensitas dan kualitas materi komunikasi serta kesepakatan tindak-lanjut bersama yang tercapai antara pimpinan atau perwakilan instansi-instansi teknis pemerintahan Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan dalam model mekanisme komunikasi dan interaksi Januari 2002 (Gambar 5), memberikan suatu gambaran faktual bahwa kemitraan antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir di masa mendatang untuk bersama-sama mengimplementasikan RPTB sebagai bentuk pengelolaan terpadu Ekosistem Teluk Balikpapan sangat potensial untuk bisa terwujud.

Berkenan dengan komponen-komponen kelembagaan yang sedang dipersiapkan untuk implementasi RPTB, *stakeholder* berharap nantinya ada hirarki koordinasi yang jelas. Hal tersebut sedang dikembangkan dan belum tersirat pada Gambar 5.



Gambar 5. Model mekanisme komunikasi dan interaksi antar komponen-komponen kelembagaan yang dipersiapkan untuk struktur dan mekanisme kelembagaan implementasi RPTB nantinya.

5. PELAJARAN DARI PROSES PENYIAPAN KELEMBAGAAN UNTUK IMPLEMENTASI RENCANA PENGELOLAAN

Perwakilan-perwakilan dari lembaga-lembaga pemerintahan dengan kewenangannya masing-masing untuk mengelola sumberdaya wilayah merupakan *stakeholder* kunci (Olsen and Kerr,2000). Selama ini mungkin sudah ada lembaga yang bertanggung-jawab untuk mengkoordinir perencanaan pembangunan antar program-program sektoral yang ada, tetapi belum optimal menerapkan pendekatan atau metode terpadu. Di samping itu, selain ketersediaan dana yang berkesinambungan, salah satu aspek fungsional dari memantapkan kelembagaan bagi fungsi pengkoordinasian pengelolaan sumberdaya dan wilayah pesisir secara terpadu adalah untuk mengupayakan kepastian keberlanjutan dari inisiatif dan komitmen pengelolaan pesisir itu sendiri.

Dengan adanya struktur dan mekanisme kelembagaan yang jelas dan baik diharapkan terwujud kesamaan kerangka kerja yang paling tidak dalam arti optimalnya, yakni “saling selaras” atau “saling terpadu”. Namun hal tersebut memang tidak mudah. Selama proses penyiapan komponen-komponen kelembagaan bagi implementasi RPTB nantinya sampai saat ini, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Kerjasama yang kondusif antara Fasilitator proses dan *stakeholder* berhasil mengatasi beberapa kendala diantaranya.

Hal-hal yang dikemukakan oleh setiap uraian pembelajaran berikut ini pada dasarnya merupakan pengalaman empiris selama proses PPT Teluk Balikpapan. Namun, ada beberapa yang disajikan berikut ini masih sebagai suatu asumsi karena belum dilakukan. Pada deskripsi berikut, uraian hal pembelajaran yang masih merupakan asumsi ditandai dengan notasi “(Asumtif)” di awal kalimat uraiannya. Disajikan pada kesempatan ini karena asumsi-asumsi tersebut telah dikonsultasikan dengan *stakeholder* sebagai rencana langkah yang disepakati untuk ditempuh pada saatnya tiba.

A. Hal-hal yang sebaiknya dipersiapkan jauh sebelum sebuah Rencana/Program

PPT akan diadopsi secara formal dan diimplementasikan oleh *stakeholder*

1. Menggalang konstituensi dari pihak-pihak yang berwenang bahwa pihak-pihak tersebut berkenan mengadopsi dan mengimplemen tasikan Rencana/Program PPT yang bersangkutan nantinya atas dasar pihak-pihak tersebut pada dasarnya terlibat dalam proses perencanaan PPT termaksud.
2. Memperoleh konstituensi dari pihak-pihak berwenang dan *stakeholder* lainnya yang berpotensi memberikan kepastian rencana pendanaan bagi pengimplementasian nantinya.
3. Menyiapkan (mendesain dan mengembangkan) sistem, struktur dan mekanisme kelembagaan berikut kelengkapan-kelengkapannya (alokasi personil, dana dan jadwal kerja) sebagai media komunikasi, interaksi dan hirarki koordinasi yang mendukung pengimplementasian nantinya.

B. Yang sebaiknya dilakukan sebelum memulai mempersiapkan komponen-komponen kelembagaan bagi koordinasi implementasi sebuah Rencana/Program PPT

1. Mempelajari konstelasi kelembagaan setempat yang sudah ada (baik pemerintahan maupun non-pemerintahan).
2. Mengidentifikasi status, fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing lembaga yang ada.
3. Mempelajari mekanisme hirarki koordinasi pada konstelasi kelembagaan yang ada.
4. Mencermati realitas apakah komponen konstelasi kelembagaan yang telah ada tersebut berminat dan atau telah memahami pendekatan, paradigma, konsep dan proses PPT.
5. Menggalang kesepahaman dan kesepakatan antar *stakeholder* berkenaan dengan penyiapan sistem, struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung pengimplementasian Rencana PPT nantinya.

C. Mengatasi realitas bahwa isu-isu berkenaan dengan PPT, pengelolaan ekosistem berbasis DAS dan perencanaan partisipatif belum populer di kalangan *stakeholder*

1. Melakukan sosialisasi teori-teori ilmiah maupun empirisnya (baik tertulis maupun tidak tertulis) memanfaatkan berbagai bentuk media.
2. Menyediakan pelatihan yang menghadirkan instruktur-instruktur pakar di bidang terkait.
3. Kerap mendiskusikannya (dalam bentuk curah pendapat) dengan *stakeholder*.
4. Bersama *stakeholder* mengidentifikasi hal-hal problematis akibat pengelolaan yang tidak terpadu (tidak terkoordinir dengan baik), akibat kurangnya pemahaman mengenai sistem hidrologis DAS dan akibat tidak adanya atau belum optimalnya keterlibatan pihak-pihak terkait dan unsur masyarakat umum.
5. Melakukan uji-coba sederhana penerapan pendekatan PPT, pengelolaan DAS dan perencanaan partisipatif kepada satu hal problematis untuk memperoleh bukti signifikansinya.
6. Khusus berkenaan pendekatan dan metode perencanaan partisipatif, perlu juga dilakukan penghimbau secara simpatik kepada pihak-pihak yang berwenang dalam perencanaan pembangunan (seperti Perencanaan Tata Ruang) untuk menerapkan atau semakin mengoptimalkan lagi partisipasi *stakeholder* dan publik dalam tahapan-tahapan penting proses perencanaan yang dilaksanakan. Mencermati bahwa umumnya kegiatan perencanaan wilayah memanfaatkan jasa konsultan perencanaan profesional, maka selain pihak-pihak di pemerintahan, penghimbau secara simpatik juga perlu dilakukan kepada konsultan perencanaan profesional yang bersangkutan.

Hal-hal 1 s/d 5 sangat efektif dan efisien bila bisa dilakukan pada tahap awal atau beriringan dengan memulai sebuah siklus perencanaan PPT.

D. Langkah-langkah dalam menggalang kesepahaman dan kesepakatan antar *stakeholder* berkenaan dengan penyiapan sistem, struktur dan mekanisme kelembagaan yang dibutuhkan bagi koordinasi implementasi sebuah Rencana/Program PPT

1. Pra-kondisi untuk ini adalah telah ditempuhnya hal-hal #2 di atas.
2. Sektor kelembagaan bagi koordinasi implementasi PPT pada dasarnya merupakan sektor publik, sehingga untuk proses pengembangannya dibutuhkan adanya Fasilitator atau Tim Fasilitator yang berpengalaman di bidang manajemen, kebijakan dan kelembagaan publik.
3. Tim Fasilitator melakukan eksplorasi mengenai visi dan opini *stakeholder* berkenaan dengan pengembangan konstelasi kelembagaan publik.
4. Tim Fasilitator mendesain model sistem dan struktur (komponen-komponen kelembagaan) serta mekanisme kelembagaan atau “model kelembagaan” bagi koordinasi pengimplementasian Rencana/Program PPT sebagai “pancingan” atau bahan diskusi dan konsultasi dengan *stakeholder*.
5. Melakukan konfirmasi dan memperoleh kesediaan lembaga-lembaga yang ada di kalangan *stakeholder* bila lembaga-lembaganya menjadi bagian dari model kelembagaan yang didesain.
6. Melakukan diskusi dan konsultasi secara intensif dengan *stakeholder* berkenaan dengan konsep model yang telah didesain. Selama diskusi dan konsultasi ini, Tim Fasilitator menjelaskan secara simpatik apa dan bagaimana model yang telah didesain.
7. Mengakomodasi masukan, saran, koreksi, pertimbangan, kritik maupun keberatan *stakeholder* dari diskusi-diskusi dan konsultasi-konsultasi saat memperbaharui desain model kelembagaan yang dikembangkan.
8. Melakukan konfirmasi tentang pembaharuan-pembaharuan yang telah mengakomodasi masukan, saran, koreksi, pertimbangan, kritik maupun keberatan *stakeholder*.
9. Mendiskusikan dan mengkonsultasikan kembali dengan *stakeholder* sampai memperoleh kesepakatan untuk membentuk dan menguji-coba-kembangkan pengoperasian model kelembagaan. Dimulai dengan membentuk dan menguji-coba-kembangkan pengoperasian satu persatu komponen kelembagaan yang memiliki urgensi untuk diuji-coba.

10. Mendesain model mekanisme komunikasi dan interaksi antar komponen-komponen kelembagaan dan menguji-cobanya untuk mengetahui efektifitas dan efisiensinya maupun keunggulan dan kelemahannya. Apakah uji-coba model mekanisme komunikasi dan interaksi sebaiknya dilakukan lebih dulu dibanding uji-coba mekanisme hirarki koordinasi disesuaikan dengan kesiapan situasi dan kondisi yang ada.
11. Melakukan analisa penilaian hasil uji-coba tersebut dan mendiskusikannya dengan *stakeholder* sampai memperoleh kesepakatan untuk ditetapkan sebagai model mekanisme komunikasi dan interaksi yang baku untuk diimplementasikan dalam jangka waktu yang saling disepakati.
12. (Asumtif) Mendesain model mekanisme hirarki koordinasi antar komponen-komponen kelembagaan (siapa bekerja dengan siapa, siapa bekerja untuk siapa, siapa bertanggung-jawab ke siapa, siapa melapor ke siapa, dan lain-lain) dan menguji-coba untuk mengetahui efektifitas dan efisiensinya maupun keunggulan dan kelemahannya.
13. (Asumtif) Melakukan analisa penilaian hasil uji-coba tersebut dan mendiskusikannya dengan *stakeholder* sampai memperoleh kesepakatan untuk ditetapkan sebagai model mekanisme hirarki koordinasi yang baku untuk diimplementasikan dalam jangka waktu yang saling disepakati.
14. (Asumtif) Membuat pertemuan yang menghadirkan semua komponen kelembagaan untuk saling memberikan legitimasi atas model sistem dan struktur serta mekanisme kelembagaan bagi koordinasi pengimplemen tasian Rencana/Program PPT yang telah sepakat dibakukan.

E. Konstelasi kelembagaan yang perlu diciptakan bagi koordinasi dan evaluasi implementasi Rencana/Program PPT

1. Menyadari bahwa sektor kelembagaan bagi koordinasi implementasi PPT pada dasarnya merupakan sektor publik.
2. Konstelasi kelembagaan yang perlu diciptakan bagi koordinasi dan evaluasi implementasi Rencana/Program PPT adalah konstelasi

kelembagaan yang tersusun atas komponen-komponen kelembagaan yang merepresentasikan kelompok-kelompok *stakeholder* dan publik. Konstelasi sebaiknya terdiri atas komponen-komponen lembaga representatif sebagai berikut:

- Representasi lembaga-lembaga pemerintahan,
- Representasi pimpinan-pimpinan lembaga pemerintahan,
- Representasi masyarakat ilmiah,
- Representasi lembaga-lembaga non pemerintahan, dan
- Representasi publik atau anggota-anggota masyarakat umum (mengakomodasi komunitas “akar rumput” atau *grass root*) yang kesemuanya harus diarahkan untuk saling berkomunikasi, berinteraksi dan berkoordinasi secara harmonis.

F. Unsur-unsur yang sebaiknya ada agar sebuah komponen kelembagaan untuk koordinasi PPT dapat beroperasi secara konstan

1. Adanya komposisi keanggotaan yang representatif dan memiliki komitmen yang tinggi.
2. Adanya ketetapan yang jelas mengenai status, fungsi, tugas dan kewenangan komponen kelembagaan yang bersangkutan yang disetujui oleh pihak-pihak berwenang yang lebih tinggi hirarkinya dibandingkan anggota-anggota komponen kelembagaan yang bersangkutan.
3. Sebaiknya didukung oleh legitimasi formal tertulis dari pihak berwenang tertinggi (seperti contohnya legitimasi atau Surat Keputusan Kepala Daerah bagi pembentukan dan pengoperasian komponen kelembagaan yang bersangkutan di daerahnya).
4. Adanya dana pengoperasian lembaga. Sering dijumpai implikasi yang menguntungkan dimana legitimasi formal tertulis seperti diuraikan nomor 3 di atas memberikan pula kepastian pendanaan pengoperasian komponen lembaga yang bersangkutan.
5. Tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan untuk pengoperasian.
6. Bila hal nomor 3, 4 dan 5 di atas tidak tersedia, maka diperlukan pihak yang bisa memfasilitasi

pengoperasian komponen kelembagaan yang bersangkutan secara maksimum di berbagai aspek operasionalnya.

7. Untuk komponen kelembagaan representasi publik atau anggota-anggota masyarakat umum (mengakomodasi komunitas “akar rumput” atau *grass root*) biasanya hanya efektif menerapkan metode sukarela (*voluntir*) dalam sistem keanggotaannya.
8. Untuk komponen kelembagaan representasi publik atau *grass root* yang (berpotensi) memiliki jumlah anggota yang sangat banyak (seperti “Forum” yang anggotanya lebih dari 30 orang dan bersifat *voluntir*), sebaiknya memiliki “Dewan Pengurus” untuk berfungsi sebagai “dinamisator” atau dilengkapi dengan “unsur pelaksana” yang terdiri atas individu-individu yang berkomitmen sangat tinggi dan bila memungkinkan profesional, serta sebaiknya berhasil memenuhi hal-hal nomor 2, 3, 4, 5 dan atau 6 di atas.

G. Manfaat adanya komponen-komponen kelembagaan yang pembentukannya dilakukan jauh sebelum sebuah Rencana/Program PPT akan diadopsi secara formal dan diimplementasikan oleh *stakeholder*

1. Pengoperasian komponen-komponen kelembagaan ini bisa menjadi eksperimen untuk memprediksi efektifitas dan efisiensi aspek-aspek PPT termasuk dari keterlibatannya dalam proses penyusunan Rencana/Program PPT yang bersangkutan.
2. Pengoperasian komponen-komponen kelembagaan ini bisa memberikan kontribusi dalam memperbaharui dan semakin mempertajam materi Rencana/Program PPT hingga saat produksi dokumen formalnya.
3. Komponen-komponen kelembagaan ini bisa menjadi “katalisator” untuk memperoleh konstituensi dari pihak-pihak yang berwenang untuk berkenan mengadopsi secara formal dan mengimplementasikan Rencana/Program PPT nantinya.
4. Komponen-komponen kelembagaan ini bisa menjadi “katalisator” untuk memperoleh konstituensi dari pihak-pihak yang berwenang dan *stakeholder* lainnya yang berpotensi memberikan kepastian rencana pendanaan bagi pengimplementasian nantinya.
5. Pengoperasian komponen-komponen kelembagaan ini jauh sebelum Rencana/Program PPT diimplementasikan dan pelibatannya dalam penyusunannya semakin mematangkan kapasitas komponen-komponen kelembagaan ini untuk pada saatnya siap mengimplementasikan Rencana/Program PPT.

DAFTAR PUSTAKA

Bappeda Kabupaten Pasir. 2000. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Proyek Coastal Resources Management Planning (CRMP) Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 1999/2000. Bappeda Kabupaten Pasir. Tanah Grogot, Indonesia.

Bappeda Kota Balikpapan. 2000. Laporan Kegiatan Proyek Coastal Resources Management Planning (CRMP) T.A. 1999/2000 Di Kota Balikpapan. Bappeda Kota Balikpapan. Balikpapan, Indonesia.

Dutton, I. M. 1993. Guidelines for the Preparation and Assessment of Management Plans. Indonesian Marine Science Education Project - Universitas Diponegoro. Lismore, Australia.

Haryanto, B., A. Tahir, R. Malik, A. S. Dharmawan, A. Setiadi, A. J. Siahainenia, A. Yani, Kasmawaty dan R. Erwinadi. (2000). Proses Penyusunan Profil Teluk Balikpapan Berdasarkan Isu Pengelolaan. Paper dalam Sondita *et al.* 2000. Pelajaran Dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 2000. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumen- tasian Kegiatan Proyek Pesisir di Bogor, 21 - 24 Maret 2000. Kerjasama Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor dengan Proyek Pesisir - Coastal Resources Management Project dan Coastal Resources Center - University of Rhode Island. Bogor, Indonesia.

Olsen, S. B., K. Lowry and J. Tobey. 1999. A Manual for Assessing Progress in Coastal Management. Coastal Management Report #2211 - January 1999. The University of Rhode Island, Coastal Resources Center,

- Graduate School of Oceanography. Narragansett, RI, USA.
- Olsen, S. B., and M. Kerr. 2000. Building Constituencies for Coastal Management: A Handbook for the Planning Phase. Coastal Management Report #2214. The University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Graduate School of Oceanography. Narragansett, RI, USA.
- Proyek Pesisir. 2000. Year Four Workplan (April 2000 - March 2001). Proyek Pesisir Publication AR-00/01-E. Coastal Resources Center, University of Rhode Island. Jakarta, Indonesia.
- Proyek Pesisir KalTim. 2000a. Dokumen Kompilasi PMP Data Proyek Pesisir KalTim 1998/1999 & 1999/2000. Proyek Pesisir KalTim. Balikpapan, Indonesia.
- Proyek Pesisir KalTim. 2000b. Dokumen Kompilasi PMP Data Proyek Pesisir KalTim 2000/2001 & 2001/2002. Proyek Pesisir KalTim. Balikpapan, Indonesia.
- Proyek Pesisir KalTim, Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten Pasisir. 2000. Isu-isu Kajian Dalam Rencana Pengelolaan. Bahan “Lokakarya Partisipatif-IV: Penyusunan Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan” yang diselenggarakan oleh Proyek Pesisir KalTim bekerjasama dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan Kabuapten Pasisir di Balikpapan, 11-12 Oktober 2000. Proyek Pesisir KalTim. Balikpapan, Indonesia.
- Dharmawan, A.S., A. Setiadi, R. Malik, dan A. J. Siahainenia, 2001. Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan dalam Sondita, *et.al.* 2001. Pelajaran Dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 2001. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir di Bogor, 28 Maret - 3 April 2001. Kerjasama Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor dengan Proyek Pesisir - Coastal Resources Management Project dan Coastal Resources Center - University of Rhode Island. Bogor, Indonesia.

IMPLEMENTASI RENCANA PENGELOLAAN TINGKAT DESA DI KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA

Oleh:

**Maria Dimpudus, Meidiarti Kasmidi, Christovel Rotinsulu,
Noni Tangkilisan, J. Johnnes Tulungen dan Asep Sukmara**

ABSTRAK

Proyek Pesisir telah memfasilitasi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara untuk menyiapkan rencana pembangunan desa dan pengelolaan sumberdaya pesisir. Setelah dua tahun kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan awal, setiap lokasi proyek telah memiliki rencana pengelolaan yang disetujui oleh masyarakat desa dan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Rencana pengelolaan desa tersebut memiliki keistimewaan dalam beberapa hal. Pertama, rencana tersebut merupakan contoh dari proses perencanaan partisipatif yang diterapkan di tingkat desa, dan terintegrasi dengan perencanaan berbagai tingkat wilayah/pemerintahan hingga tingkat propinsi. Kedua, strategi dan kegiatan yang direncanakan mencakup prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kondisi lingkungan, seperti terumbu karang, serta kualitas masyarakat melalui perbaikan suplai air minum, pengembangan mata pencaharian alternatif (ekoturisme) dan perbaikan prasarana pedesaan. Ketiga, rencana tersebut menempatkan masyarakat sebagai penanggungjawab utama pengelolaan pesisir yang dijalankan oleh sekelompok relawan anggota masyarakat setempat dengan bantuan dinas-dinas terkait melalui proses perencanaan, pengalokasian dana dan pelaksanaan program yang sesuai dengan mekanisme pemerintahan setempat.

Beberapa pengalaman dalam pelaksanaan rencana yang cukup inovatif melalui penyediaan dana langsung kepada masyarakat dalam bentuk *'block grant'* telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Proyek Pesisir untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana pengelolaan. Saat ini sedang direncanakan program replikasi pengelolaan pesisir tingkat desa untuk tempat-tempat lain. Pemerintah Kabupaten akan menyiapkan dukungan teknis dan dana untuk pemerintahan dan masyarakat desa.

Upaya-upaya awal di atas adalah cara baru bagaimana pemerintahan lokal melaksanakan tugasnya. Rencana-rencana tersebut dapat dipandang sebagai percontohan dari program pengelolaan pesisir yang terdesentralisasi, sekaligus sebagai model dari program pembangunan yang bersifat partisipatif dan transparan serta mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat. Makalah ini menyajikan proses dan pelajaran dari implementasi rencana pengelolaan tingkat desa di lokasi proyek.

Kata kunci: Rencana pengelolaan tingkat desa; pengelolaan pesisir; Minahasa, Sulawesi Utara; adopsi formal rencana pengelolaan; adopsi best practices; perencanaan partisipatif.

ABSTRACT

Proyek Pesisir has been assisting provincial government to establish some examples of village level plans for community development and management of coastal resources. After two years of extensive community participation, capacity building and implementation of field early activities, village coastal management plans were established and approved by local communities and ratified at the regency level.

These village level plans are significant in many ways. First, they are among the first examples of results of participatory planning process implemented at the village level, but integrated with multiple levels and sectors of government (up to the provincial level). Second, the strategies and actions in the plans embrace the principles of sustainable development that aim to protect and sustain healthy environments, such as coral reefs, as well as to improve quality of human life through improvement in drinking water supply, development of alternative livelihoods (e.g. ecotourism) and improvement of village infrastructure. Third, they place primary responsibility for coastal management on the hand of local community through a committee of volunteer village members with assistance provided by sectoral agencies through the existing planning, budgeting and implementation mechanisms of local government.

A strategy to support village communities through annual block grants has been made by local government and Proyek Pesisir directly to the communities for actions that are consistent with the plans. Planning is also underway to replicate from pilot sites to a regency program that provides technical and financial support services to village government and communities coast-wide. These initial effort are representing a new way of how local government can conduct its responsibility. These plans are viewed both as

pilots for a decentralized coastal resources management program, and as models of how other development programs implemented can become more participatory and transparent, as well as better meet the aspirations of local communities. This paper describes the process and initial lessons learned of the village level plan implementation at Proyek Pesisir pilot sites.

Keywords: Village level management plan; coastal management; Minahasa, North Sulawesi; formal adoption of management plan; adoption of best practices; participatory planning.

1. PENDAHULUAN

Proyek Pesisir Sulawesi Utara secara formal telah mengembangkan contoh-contoh pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat. Bagi Proyek Pesisir, pengelolaan berbasis masyarakat adalah pengelolaan secara bersama (*co-management*) antara masyarakat, pemerintah setempat dan *stakeholder* di desa. Contoh-contoh pengelolaan yang dikembangkan di Sulawesi Utara diharapkan merupakan contoh yang baik dalam rangka “...desentralisasi dan penguatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Indonesia” sebagaimana tujuan strategis dari Program Pengelolaan Sumberdaya Alam II (Natural Resources Mangement II - NRM II) USAID-BAPPENAS bahwa misi ini dapat dicapai dengan model-model desentralisasi,

partisipasi dan kegiatan pengelolaan berbasis-masyarakat (Crawford, 1999).

Sejak bulan Juli 1997 tiga lokasi lapang (*field sites*) dipilih dan ditetapkan di Sulawesi Utara (Gambar 1) melalui konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat setempat, pemerintah desa (lokal) dan propinsi serta didukung oleh suatu survei awal secara cepat di 20 desa pesisir di Kabupaten Minahasa.

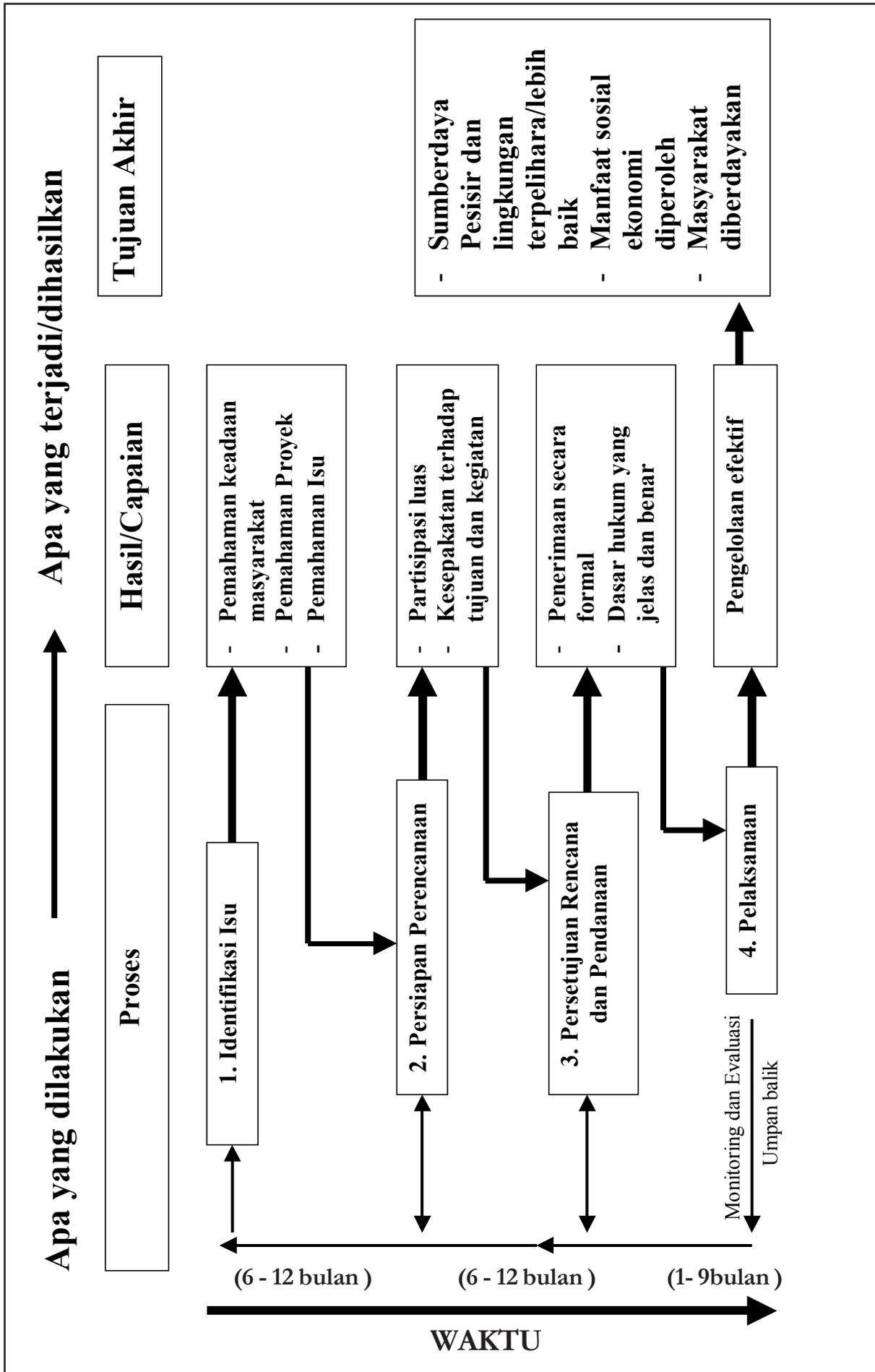
Penetapan lokasi ini dilaksanakan oleh Tim Kerja Propinsi yang terdiri dari instansi dan lembaga terkait di Sulawesi Utara dan Minahasa yang dikoordinasi oleh BAPPEDA Sulawesi Utara. Kemudian penetapan lokasi ini diikuti proses sosialisasi dengan masyarakat desa setempat untuk menjelaskan tujuan, harapan dari kegiatan Proyek Pesisir.

Bersama dengan kegiatan ini juga dilakukan identifikasi pendekatan pengelolaan yang akan diterapkan di masing-masing desa dan penempatan penyuluh lapangan Proyek Pesisir secara tetap di masing-masing lokasi untuk memfasilitasi pelaksanaan program sejak Oktober 1997 (Tulungen *et al.*, 1998).

Tujuan Proyek Pesisir di lapangan (*field sites*) adalah untuk mengembangkan contoh-contoh dari cara/metode yang baik dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir lewat penerapan metode-metode, strategi, kegiatan, aturan lokal dan rencana. Contoh-contoh ini diharapkan dapat mendorong untuk memperbaiki atau mempertahankan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir, dan mempertahankan atau memperbaiki kondisi sumberdaya wilayah pesisir dimana banyak orang menggantungkan kehidupan mereka.



Gambar 1. Lokasi Proyek Pesisir di Sulawesi Utara



Gambar 2: Model Program Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara

Adapun kerangka kerja konsep proses perencanaan dan pelaksanaan berbasis-masyarakat di Sulawesi Utara secara ringkas mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Isu
2. Persiapan Perencanaan
3. Persetujuan Rencana dan Pendanaan
4. Pelaksanaan
5. Pengawasan dan Evaluasi

Model program bagi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelolaan berbasis masyarakat alurnya dapat dijelaskan dalam Gambar 2. Model ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh program menyangkut kegiatan yang dilakukan dan hasil dari tiap kegiatan. Rincian kegiatan, hasil dan indikator pada tiap tahapan secara rinci lihat Lampiran 1. Setiap langkah dalam proses memiliki sejumlah capaian antara yang dihasilkan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Proses dan kegiatan serta capaian ini akan mengarah pada tujuan akhir atau dampak yang dihasilkan.

Paper ini mendokumentasikan tahap pelaksanaan dari rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan di desa. Pelaksanaan rencana pengelolaan ini merupakan bagian dari siklus perencanaan atau kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat. Pada tahap pertama telah dilakukan pengidentifikasian isu yang ada di desa, yaitu permasalahan dan potensi wilayah pesisir yang dapat dikembangkan dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan oleh masyarakat. Tahap selanjutnya adalah penyusunan rencana pengelolaan berdasarkan isu dan permasalahan yang ada. Rencana pengelolaan ini, diusulkan dan direncanakan oleh masyarakat untuk dilaksanakan dengan melihat potensi dan kemampuan masyarakat. Setelah rencana pengelolaan ini disepakati maka pelaksanaan rencana pengelolaan ini diharapkan dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan. Untuk mendorong pelaksanaan rencana pengelolaan ini maka Proyek Pesisir membantu masyarakat menyusun rencana kerja tahunan dengan memberikan dana *Block Grant* yang disediakan oleh Proyek Pesisir dan oleh Bappeda Kabupaten Minahasa.

Untuk melihat kemajuan yang sudah diperoleh setelah rencana pengelolaan ini ditetapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta dalam rangka pembelajaran baik kepada masyarakat, pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi maupun swasta dalam pengelolaan sumberdaya pesisir maka implementasi (pelaksanaan) rencana pengelolaan perlu didokumentasikan.

2. METODOLOGI

Paper ini ditulis oleh Staf Proyek Pesisir Sulawesi Utara yang didasarkan pada pengalaman dari staf dalam melakukan pendampingan dan memfasilitasi masyarakat dan pemerintah setempat dalam pelaksanaan rencana pengelolaan desa. Selain pengalaman, dokumen-dokumen dan laporan masyarakat dalam rangka implementasi rencana pengelolaan baik proposal, rencana tahunan desa, laporan pelaksanaan dan laporan keuangan dari pelaksana rencana pengelolaan dan pemerintah desa. Catatan dan tambahan hasil evaluasi bersama antara masyarakat, kelompok-kelompok pengelola, pemerintah desa, Kabupaten, DPRD Minahasa dan Proyek Pesisir, adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar penulisan dokumentasi ini. Periode waktu implementasi rencana pengelolaan ini adalah pada Tahun anggaran 2000 dan 2001.

3. RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR DESA

3.1 Pengertian

Rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa (Rencana Pengelolaan Desa) adalah rencana terpadu yang disusun oleh masyarakat dalam rangka mengelola sumberdaya yang ada khususnya yang berhubungan dengan wilayah pesisir di desa untuk dimanfaatkan atau dilestarikan demi menjaga dan mempertahankan kondisi sumberdaya wilayah pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Rencana pengelolaan desa diperlukan agar pengelolaan sumberdaya pesisir di desa dapat terlaksana secara efektif serta diharapkan menjadi pedoman untuk kegiatan pengelolaan secara terpadu dan berbasis masyarakat sesuai

dengan visi dan misi masyarakat. Rencana Pengelolaan desa secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Sebagai pedoman bagi masyarakat desa, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya penyelesaian dan penanganan isu-isu/masalah yang diprioritaskan melalui rencana kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu.
- Memperjelas tanggung jawab dan peran masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam Rencana Pengelolaan desa.
- Sebagai pedoman dalam menetapkan aturan-aturan dari masyarakat dan pemerintah sehubungan dengan penanganan isu dan penyelesaian masalah.

Dokumen rencana pengelolaan desa akan menjadi pedoman dan mendorong adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan dalam rencana pengelolaan, terutama yang menyangkut pengelolaan sumberdaya terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, hutan, rawa, sungai, pantai, satwa yang dilindungi dan sebagainya sebagai satu kesatuan ekosistem.

Isi dokumen rencana pengelolaan bervariasi di setiap desa berdasarkan kondisi desa masing-masing, tapi secara umum berisi sebagai berikut: Keputusan Desa tentang pelaksanaan, visi pengelolaan oleh masyarakat, isu-isu pengelolaan pesisir, strategi dan kegiatan, monitoring & evaluasi, dan kelembagaan (Badan Pengelola, Pemerintah Desa, kecamatan dan dinas-dinas terkait di kabupaten).

Rencana pengelolaan disetujui secara formal oleh pemerintah dan masyarakat di masing-masing desa melalui penandatanganan surat keputusan desa oleh Kepala Desa dan perwakilan masyarakat dalam suatu forum musyawarah desa. Persetujuan ini juga ditandatangani oleh Wakil Bupati, Ketua Bappeda, Camat, dan perwakilan dari dinas terkait yang merupakan anggota Tim Kerja Kabupaten Minahasa Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu. Alokasi pembiayaan dalam rencana pengelolaan disusun oleh masyarakat setempat dengan mempertimbangkan sumber-sumber anggaran seperti APBN,

APBD, Pihak Lain dan Swadaya Masyarakat walaupun belum mencantumkan jumlah anggaran dari setiap kegiatan.

Lewat pembuatan rencana pengelolaan ini maka diharapkan terjadi perubahan perilaku baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat mengenai bagaimana proses membuat dan merencanakan pembangunan dan pengelolaan di desa secara partisipatif, transparan dan *bottom up*. Pelaksanaan rencana pengelolaan di desa ini juga diharapkan menjadi proses pembelajaran dari masyarakat mengenai bagaimana mengelola secara bersama (*co-management*) dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa. Perubahan perilaku juga dapat diperoleh lewat pemahaman masyarakat dan pemerintah desa bahwa kegiatan pembangunan di desa dapat dilaksanakan oleh masyarakat desa sendiri secara swadaya dan partisipatif. Tabel 1 merinci perubahan perilaku dari *stakeholder* beserta indikator perubahan perilaku tersebut.

3.2 Proses Penusunan

Sebelum dilakukan proses penyusunan diawali dengan pengumpulan data dasar (sosial-ekonomi, lingkungan dan sejarah ekologis), survei dan kajian teknis untuk menunjang penggambaran dan analisis isu secara mendalam, memadukan hasil kajian teknis dan sistematis dengan hasil kajian partisipatif untuk penyusunan rencana terpadu yang difasilitasi oleh Proyek Pesisir. Sejalan dengan itu dilaksanakan orientasi program di desa dan penyiapan masyarakat melalui berbagai kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH), pelatihan, lokakarya, seminar, dan studi banding yang didampingi oleh seorang pendamping masyarakat untuk ditempatkan di desa.

Tahap pertama yang dilakukan adalah identifikasi isu-isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di desa oleh masyarakat. Identifikasi isu mencakup penentuan sebab dan akibat permasalahan pengelolaan yang membutuhkan penanganan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Isu dapat berupa masalah kerusakan, ketidakteraturan, kekurangan yang dapat mengancam kelestarian dan pemanfaatan sumberdaya yang berkesinambungan; masalah

Tabel 1. Perubahan perilaku *stakeholder* dan indikator

Stakeholders	Perubahan Perilaku	Indikator
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dan swadaya masyarakat • Perubahan kepedulian dan kesadaran • Dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan • Pengelolaan sumberdaya semakin baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah masyarakat yang berpartisipasi • Jumlah kontribusi masyarakat dalam bentuk fisik dan non fisik • Pelaksanaan rencana pengelolaan • Penegakan aturan yang dilakukan kepada pelanggar
Pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi dalam pengelolaan • Kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan • Koordinasi pelaksanaan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan lembaga lain di desa • Kemampuan dalam menformulasikan peraturan desa • Pengelolaan keuangan yang terbuka • Pelayanan kepada masyarakat semakin baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terbuka • Rencana yang dilaksanakan dengan baik • Pertemuan-pertemuan koordinasi antara Pemdes dengan BPD dalam rangka koordinasi • Jumlah peraturan desa yang dibuat dan ditetapkan • Laporan-laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman
B a d a n Perwakilan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas dalam pembuatan rencana dan aturan • Kontrol dan tinjauan dalam pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah aturan yang dibuat dan disepakati • Jumlah masukan dan tinjauan yang dilakukan/ diberikan oleh BPD
Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas dalam perencanaan • Bantuan teknis dan dana dapat diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan • Kebijakan yang mendukung pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perencanaan yang mengakomodasi rencana pengelolaan desa • Jumlah bantuan teknis dan dana yang diberikan langsung kepada masyarakat • Adanya peraturan daerah dan kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pelaksanaan
Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan teknis diberikan langsung kepada masyarakat • Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang terfokus pada pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bantuan teknis yang diberikan kepada masyarakat • Jumlah desa yang diberikan bantuan teknis • Jumlah program pengabdian yang telah diberikan di desa
LSM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program terpadu dan berkelanjutan • Pendampingan kepada masyarakat desa semakin baik dalam konservasi pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program terpadu dengan berbagai sektor dalam program • Jumlah program dan desa yang didampingi

hukum/aturan, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar pihak yang berwenang; ataupun potensi-potensi yang dalam pengembangannya perlu pengaturan dan pengelolaan. Hasil pengidentifikasian isu tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa. Profil Sumberdaya Desa Blongko dan Talise telah dipublikasikan dalam bentuk dokumen terpisah dari rencana pengelolaan desa. (Kasmidi *et al.*, 1999; Tangkilisan *et al.*, 1999).

Tahap kedua adalah perencanaan yang merupakan satu tahapan untuk penyusunan strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dan akan dilakukan dalam menjawab dan mengatasi isu-isu dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Tahap perencanaan terdiri dari: penyusunan konsep awal rencana pengelolaan desa, penentuan isu prioritas yang disepakati oleh masyarakat, konsultasi tingkat masyarakat untuk merevisi konsep rencana pengelolaan desa, konsultasi tingkat pemerintah kecamatan maupun instansi sektoral atau dinas-dinas terkait di kabupaten dan persetujuan pendanaan. Tahap terakhir adalah penyelesaian dokumen Rencana Pengelolaan Desa dan peluncuran dokumen Rencana Pengelolaan Desa Blongko, Talise dan Bentenan-Tumbak telah dipublikasikan. (Kasmidi, 1999b; Tangkilisan, 1999b; Dimpudus *et al.*, 1999).

3.3 Hubungan Rencana Pengelolaan Desa dengan Rencana Pembangunan Kabupaten dan Propinsi

Dengan disusunnya rencana pengelolaan desa secara khusus maka program pembangunan umum di tingkat Kabupaten dan Propinsi dapat didesentralisasikan ke desa melalui perencanaan pengelolaan terpadu di tingkat desa. Dengan demikian Renstra pengelolaan wilayah pesisir yang lebih besar (makro) di tingkat kabupaten dan propinsi dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan rencana pengelolaan yang dibuat di tingkat desa.

Relevansi rencana pengelolaan tingkat desa dengan rencana pengelolaan tingkat kabupaten dan propinsi dapat

dicapai dengan memperhatikan prioritas dan Renstra tingkat kabupaten dan propinsi. Ditingkat propinsi dapat menyusun Renstra dan pedoman pembuatan rencana pembangunan dan pengelolaan yang akan menjadi dasar pembuatan rencana pengelolaan di tingkat desa.

Keterlibatan dari instansi terkait dalam proses pembuatan rencana pengelolaan serta memberikan bantuan teknis (pelatihan, konsultasi teknis dan dana) kepada masyarakat dan pemerintah di tingkat desa merupakan bentuk dukungan dari pemerintah kabupaten. Hal ini dapat diadopsi oleh pemerintah setempat serta sejalan dengan kebijakan pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun propinsi.

3.4 Strategi Melembagakan Rencana Pengelolaan Desa

3.4.1 Kelembagaan

Dalam melembagakan pengelolaan pesisir di tingkat desa, Proyek Pesisir berupaya untuk mengoptimalkan peran pemerintah desa dan lembaga formal di desa (lihat Boks 1) meskipun lembaga-lembaga formal di desa-desa belum berfungsi sebagaimana diharapkan masyarakat. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai lembaga perencana dan pelaksana

Boks 1.

Peran pemerintah desa

- Bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui BPD atas pelaksanaan rencana pengelolaan pesisir desa.
- Bersama dengan BPD menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa dan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di desa.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Peran Badan Perwakilan Desa (Legsilatif)

- Bersama dengan Pemerintah desa menyusun dan menetapkan rencana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa serta peraturan-peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan rencana pengelolaan

Boks 2 :

Peran Badan Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir

- Bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah desa
- Mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan RPTD dengan instansi terkait dan masyarakat lewat musbangdes dan rapat koordinasi lainnya.
- Membentuk kelompok pengelola isu dan memilih koordinator isu sesuai dengan kebutuhan pengelolaan.
- Melakukan monitoring dan peninjauan pelaksanaan rencana pengelolaan termasuk menetapkan anggaran dan melakukan musyawarah tahunan.
- Merekomendasikan revisi dan perubahan rencana pengelolaan sesuai dengan peraturan dan disepakati masyarakat
- Mendorong kerjasama dan koordinasi di antara masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk menetapkan prioritas pelaksanaan rencana pengelolaan dan mengembangkan rencana aksi tahunan
- Melakukan pertemuan kelompok pengelola secara rutin atau sesuai dengan kebutuhan
- Membuat laporan tahunan berupa laporan kegiatan, laporan keuangan dan hasil capaian kepada pemerintah dan masyarakat.
- Mendorong dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat.
- Melaporkan pelanggaran terhadap rencana pengelolaan yang akan dibuat dalam satu amandemen dan dilampirkan dalam surat keputusan pemerintah desa.
- Melakukan revisi terhadap rencana pengelolaan yang dibuat dalam satu amandemen dan dilampirkan dalam rencana pengelolaan sebagaimana dimandatkan dalam Surat Keputusan Pemerintah Desa.
- Melaksanakan tugas selama 3 tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

pembangunan di desa merupakan suatu lembaga yang sudah ada di desa yang dapat melaksanakan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir di Tingkat Desa. Namun melihat fungsi dan peranan LKMD yang belum optimal maka atas kesepakatan masyarakat desa dan konsultasi dengan pemerintah ditingkat kabupaten dibentuklah sebuah Badan Pengelola yang melaksanakan pengelolaan sumberdaya pesisir melalui program Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) sebagai penjabaran dari Rencana Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa. Lembaga ini juga merupakan manifestasi dari UU No. 22/99 pasal 106 yang menyatakan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dalam mengoptimalkan pelayanan

dalam mengakomodasi kepentingan umum masyarakat. Hal ini diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 6 Tahun 2000 Tentang Peraturan Desa.

Oleh pemerintah desa Badan Pengelola ini ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah desa untuk memberikan dukungan secara hukum kepada lembaga dan personil yang akan melaksanakan tugas (lihat Boks 2).

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Rencana Pengelolaan, pemerintah desa, BPD, serta Badan Pengelola di desa terlibat secara aktif dan melakukan fungsi dan perannya sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pengelolaan sebagai panduan dalam pelaksanaan. Untuk membangun sistem koordinasi yang akomodatif antara desa dan kabupaten rapat konsultasi dan koordinasi dilakukan secara berkala. Tim Kerja Kabupaten (KTF - *Kabupaten Task Force*) yang terdiri dari dinas-dinas teknis di Kabupaten Minahasa yang

berkaitan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir disepakati untuk memberikan rekomendasi serta kajian teknis atas usulan kegiatan desa dalam RPTD sekaligus memasukkan usulan kegiatan ke dalam usulan kegiatan dinas teknis yang akan dibiayai melalui APBD/APBN atau bantuan luar negeri jika memungkinkan.

Boks 3:

Peran Perguruan Tinggi :

- Memberikan pelatihan teknis tentang system agroforestri
- Memberikan pelatihan teknis tentang budidaya perikanan.
- Memberikan pelatihan tentang penyusunan peraturan desa
- Memberikan penyuluhan hukum lingkungan
- Memberikan pelatihan teknis tentang pengukuran profil pantai.
- Menyediakan tenaga konsultan
- Menyediakan tenaga ahli dalam monitoring lingkungan

Boks 4:

Peran LSM

- Memberikan pelatihan tentang pemetaan partisipatif desa
- Memberikan pelatihan tentang pengembangan usaha percetakan dan sablon
- Memberikan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir

Dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan lembaga-lembaga yang bertanggungjawab ditingkat desa secara desentralisasi menjalankan wewenangnya dalam pelaksanaan pengelolaan. Di tingkat kabupaten, pemerintah daerah melalui KTF melakukan kontrol melalui kunjungan dinas untuk melakukan supervisi dan kunjungan lapangan saat implementasi berjalan (Lihat Boks 5).

Disamping keterlibatan lembaga resmi pemerintah di desa, kabupaten dan pihak swasta, Universitas dan LSM juga berperan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan di desa. Universitas sebagai perwujudan dari tridarma perguruan tinggi untuk memberikan pelayanan kepada

Boks 5:

Peran KTF dan dinas teknis kabupaten :

- Memberikan bantuan teknis dan pelayanan teknis dalam penanganan dan penyelesaian isu.
- Mengalokasikan anggaran pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang bersumber dari APBD / APBN atau dana bantuan luar negeri lewat pemerintah.
- Mengesahkan dan menyetujui rencana kegiatan tahunan dalam penanganan dan penyelesaian isu.
- Membina dan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dan memberikan kontribusi nyata dalam penanganan dan penyelesaian isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
- Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan di Desa.

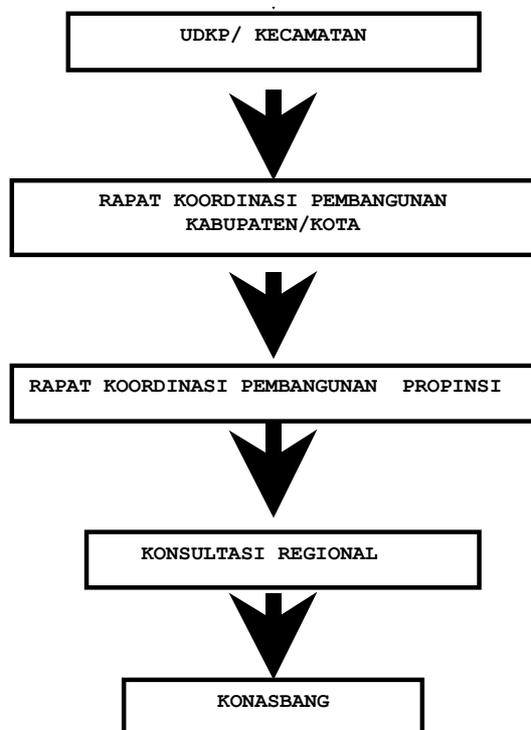
masyarakat melalui penyuluhan, bantuan teknis berupa konsultasi serta pelatihan teknis lainnya (Boks 3). Hal yang sama juga diperankan oleh LSM dengan idealismenya memberikan penguatan kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan untuk penguatan kapasitas masyarakat (Boks 4) .

Dalam pelaksanaan rencana pengelolaan desa keterlibatan lembaga donor mendorong dan mempercepat proses kepedulian masyarakat akan pengelolaan sumberdaya pesisir desa. Kontribusi langsung dari pemerintah dalam pelaksanaan juga memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa pemerintah mengambil peran langsung dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di desa.

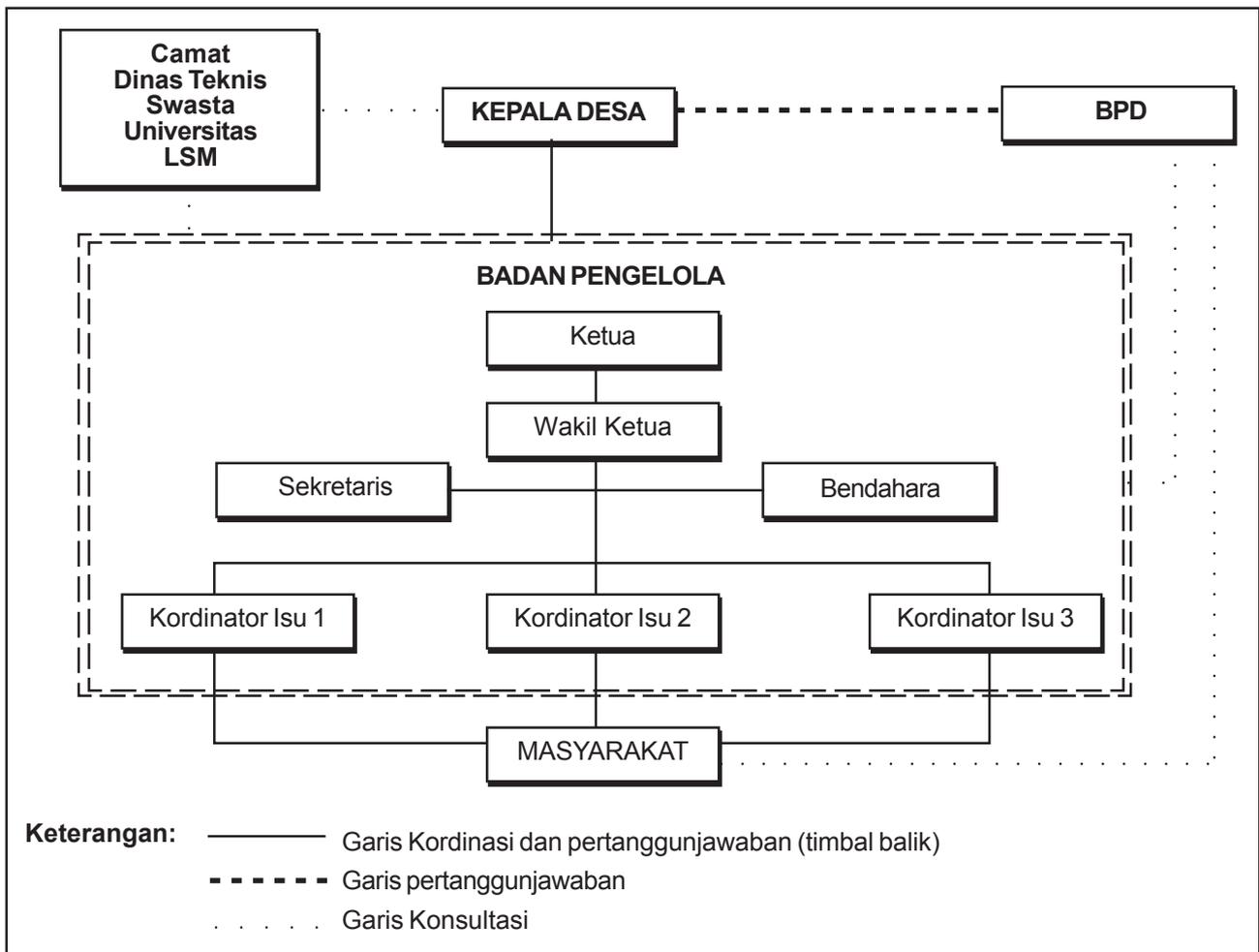
Masyarakat sebagai pendukung utama juga berperan dalam setiap kegiatan dengan aktif memberikan dukungan tenaga, pikiran sekaligus melakukan kontrol langsung atas pelaksanaan masing-masing kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana penanganannya.

3.4.2 Biaya

Sebagai konsekuensi dari Rencana Pengelolaan maka didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPTD perlu diwujudkan melalui kegiatan nyata. Kegiatan-kegiatan tersebut mutlak memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Pembiayaan tersebut dapat berupa kontribusi langsung melalui dana dan tenaga dari masyarakat maupun kontribusi dana pelaksanaan dari pemerintah



Gambar 2. Mekanisme pengusulan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD)



Gambar 3. Struktur Badan Pengelola

daerah melalui pengalokasian APBD/APBN, atau dari lembaga donor lainnya.

Penyusunan anggaran ditetapkan melalui rapat Pemerintah Desa dan Badan Pengelola dengan membuat rincian biaya pelaksanaan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok-kelompok isu sesuai RPTD. Dalam penyusunan rencana anggaran, sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan berdasarkan sumber pembiayaan kegiatan yang memungkinkan seperti APBN/APBD, swadaya masyarakat dan donatur. Selanjutnya rencana anggaran tersebut dipresentasikan dan diusulkan ke pemerintah Kabupaten Minahasa. Waktu pengusulan RPTD tahun anggaran 2000/2001 belum sesuai dengan Rakorbang, mekanisme pengusulan RPTD dapat dilihat pada Gambar 3.

Meskipun dana APBN/APBD sangat minim tetapi pemerintah kabupaten melalui Bappeda memberikan dukungan dana melalui dana APBN untuk Kabupaten Minahasa yang diberikan ke 4

desa sebesar Rp 20 juta tiap-tiap desa untuk pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir di tingkat desa. Selain dana APBN tersebut masyarakat Desa Talise juga memperoleh dana sebesar 2, 4 juta dari swasta yaitu PT. Horigucci Sinar Insani, melalui pengusulan proposal untuk pengembangan Daerah Perlindungan Laut Desa Talise.

Untuk pemanfaatan sumber keuangan lain seperti swadaya masyarakat, umumnya di setiap desa mengalokasikan anggaran swadaya masyarakat sebagai kontribusi langsung meskipun tidak perlu direalisasikan dalam bentuk dana tapi tenaga atau material. Namun demikian, dalam pelaksanaannya hal tersebut sangat sulit diwujudkan oleh Badan Pengelola. Kecenderungan menggunakan dana non-swadaya untuk membiayai tenaga cukup besar. Mengingat dana dari APBD/APBN diperoleh nilainya hanya 20 juta karena alasan kekurangan dana pembangunan maka dalam rangka mendorong pelaksanaan rencana

Boks 6:

Tahapan persiapan dan persetujuan RPTD

1. Lokakarya dan Pelatihan Pembuatan RPTD
2. Pemilihan dan penetapan pengurus dan anggota Badan Pengelola
3. Sosialisasi *draft* RPTD dan konsultasi masyarakat
4. Musyawarah desa untuk penentuan skala prioritas & persetujuan RPTD
5. Pengajuan usulan/proposal dan presentasi RPTD oleh Badan Pengelola kepada Bupati dan dinas-dinas terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir (KTF)
6. Persetujuan kegiatan dan alokasi dana oleh dinas-dinas terkait, dana *Block Grant* Proyek Pesisir dan Bappeda, dan
7. Pelaksanaan

Tahapan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat desa :

1. Pelatihan pengelolaan dana *Block Grant*
2. Penyusunan rencana kerja bulanan dari masing-masing kelompok atau koordinator isu
3. Pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing kelompok isu Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pengelolaan, Proyek Pesisir mengalokasikan dana *block grant* sebesar Rp 35 juta yang diberikan langsung kepada Pemerintah Desa dan Badan Pengelola.

4. IMPLEMENTASI RENCANA PENGELOLAAN

4.1 Lembaga Pelaksana

Pelaksana dan penanggung-jawab Rencana Pengelolaan di tingkat desa adalah Badan Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa, sedangkan implementasi kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing koordinator isu atau kelompok pengelola isu di dalam Badan Pengelola. Adapun struktur lembaga Badan Pengelola dapat dilihat pada Gambar 4.

Peran Pemerintah Desa sebagaimana dipaparkan di depan adalah untuk memonitor pelaksanaan kegiatan sekaligus meminta pertanggung-jawaban dari Badan Pengelola. Pada tahap penyusunan rencana tahunan desa, Pemerintah Desa mengkoordinasikan semua komponen desa untuk mengadakan Musyawarah

Pembangunan Desa (Musbanges) RPTD bersama dengan Badan Pengelola.

4.2 Tahapan Kegiatan Implementasi

4.2.1 Persiapan dan Persetujuan Rencana Tahunan

Tahapan awal untuk implementasi Rencana Pengelolaan Desa adalah menyusun rencana tahunan dalam bentuk format Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) dan untuk mempersiapkannya dilakukan pelatihan dan lokakarya penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD). Materi lokakarya dan pelatihan yaitu mengenai penyusunan RPTD, perencanaan partisipatif, format dan mekanisme pengusulan proposal dan mekanisme pelaporan. Dari pelatihan ini dihasilkan draft RPTD Tahun anggaran 2000/2001

untuk Desa Blongko, Tumbak, Bentenan dan Talise, dan suatu kesepakatan model format RPTD yang dimodifikasi dari format pemerintah dan disesuaikan dengan format Rencana Pengelolaan Desa. RPTD memuat rencana tahunan dalam bentuk tabel yang berisi kegiatan, sifat kegiatan (lama, baru atau lanjutan), kegiatan tersebut termasuk isu dan strategi nomor berapa dalam Dokumen Rencana Pengelolaan, biaya, dan siapa pelaksana. (Lampiran 2 contoh RPTD Desa Bentenan).

Setelah pelaksanaan lokakarya, ditingkat desa dilaksanakan pemilihan dan penetapan pengurus dan anggota Badan Pengelola. Pemilihan dan penetapan Badan Pengelola dikordinir dan disahkan oleh pemerintah desa melalui surat keputusan kepala desa. Berbeda dengan tiga desa lainnya, pembentukan Badan Pengelola Desa Blongko telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan lokakarya.

Tahapan selanjutnya yaitu sosialisasi draft RPTD yang dihasilkan lewat lokakarya. Pemerintah desa bersama dengan pengurus dan anggota Badan Pengelola membahas lagi draft

RPTD yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Desa. Draft RPTD kemudian disosialisasikan kepada masyarakat lewat pertemuan-pertemuan masyarakat baik secara formal maupun informal oleh pemerintah desa dan Badan Pengelola. Setelah dilakukan perbaikan atau perubahan sesuai dengan masukan dari masyarakat, draft RPTD dimusyawarahkan lagi dalam rapat desa untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh masyarakat dan Pemdes.

RPTD kemudian dipresentasikan dan diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten dan dinas-dinas terkait serta Proyek Pesisir yang dapat membantu dalam hal pendanaan dan bantuan teknis. Setelah mendapatkan persetujuan dan dukungan pendanaan, implementasi kegiatan dilaksanakan oleh Badan Pengelola melalui koordinator-koordinator isu atau kelompok pengelola isu.

4.2.2 Pelaksanaan Rencana Tahunan

Setelah RPTD yang diusulkan mendapatkan persetujuan dan dukungan dana, yang diawali oleh Proyek Pesisir lewat pemberian Block

Grant, di tingkat desa dilaksanakan latihan pengelolaan keuangan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Proyek Pesisir sebagai bagian dari penguatan lembaga pengelolaan untuk mempersiapkan Badan Pengelola termasuk koordinator atau kelompok isu untuk mengelola kegiatan dan keuangan setiap bulan. Masing-masing koordinator isu menyusun rencana kerja dan anggaran bulanan, sehingga Ketua dan Bendahara Badan Pengelola dapat mengetahui dan mengatur pengalokasian dana untuk setiap koordinator isu secara baik. Pengelolaan keuangan oleh Badan Pengelola dilaksanakan secara terbuka dan tercatat, sehingga pemakaian keuangan dapat dipertanggung-jawabkan kepada Pemerintah dan masyarakat. Pada pertengahan dan akhir kegiatan, Badan Pengelola dan Pemerintah desa melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan. Secara garis besar mekanisme pengelolaan dana atau keuangan oleh Badan Pengelola dan koordinator isu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Secara garis besar tahapan yang telah dilakukan dalam persiapan dan persetujuan RPTD serta implementasinya dapat dilihat pada Boks 6.

Tabel 2. Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2000/2001

Bentenan	Blongko	Talise	Tumbak
<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan sarana air bersih • Penghijauan di daerah sumber air • Pembuatan MCK (Mandi Cuci Kakus) • Pembuatan papan himbauan pelestarian sumber air • Demplot <i>agroforestry</i> • Penetapan kawasan pelestarian laut • Pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (Program PPK) • Pengerasan jalan desa (Bappeda) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan tanggul dan gorong-gorong • Pengadaan lahan pusat informasi permanen • Kursus bahasa Inggris • Pelatihan <i>snorkling</i> • Pelatihan Sablon • Penanaman bakau (Dinas Perikanan) • Penanaman pohon pelindung pantai & sungai (ketapang) oleh pemuda desa • <i>Restocking</i> ikan Goropa (Departemen Kelautan dan Perikanan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan aturan-aturan desa tentang pengelolaan lingkungan pesisir serta zonasinya • Penanaman pohon di sekitar sumber air • Pelatihan dan percontohan ladang sistem <i>agroforestry</i> • Pengadaan material tanda batas DPL dan pengembangan DPL Kinabuhutan (Horiguci Sinar Insani). • Pengembangan potensi perikanan (sistem karamba) • Mengembangkan mata pelajaran muatan lokal • Perbaikan pusat informasi (gambar, lukisan dinding & poster) • Studi banding ekowisata ke Cagar Alam. Tangkoko, Taman Nasional Bunaken 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembersihan sasanay • Pengadaan sarana pengawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL) • Zonasi pengelolaan SD. Pesisir • PLH dan penyuluhan hukum • Perbaikan BPU untuk pusat informasi • Rehabilitasi pagar areal bakau • Pengadaan sarana penangkapan kepiting • Instalasi air bersih (PPK)

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD serta Pemerintah Daerah melalui tim KTF. Pemerintah desa secara langsung terlibat dalam pengawasan keuangan yaitu dengan turut menanda-tanganinya setiap aplikasi penarikan uang di bank bersama dengan Ketua Badan Pengelola. BPD menampung masukan atau keluhan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan dan meminta Pemerintah Desa dan Badan Pengelola untuk melakukan rapat pemecahan masalah. Di lapangan, tim KTF dan Proyek Pesisir juga melakukan kunjungan di desa untuk melihat dan mengawasi sejauh mana kegiatan dan pemakaian keuangan dilaksanakan. Setelah akhir kegiatan dilakukan evaluasi bersama antara Badan Pengelola, pemerintah desa dan masyarakat. Pelaksanaan masing-masing kegiatan dari kelompok/koordinator isu dilaporkan oleh kelompok kepada Badan Pengelola. Badan Pengelola melaporkan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada pemerintah desa. Setelah evaluasi di setiap desa, dilakukan juga evaluasi bersama yang dihadiri oleh BPD, Badan Pengelola dan Pemerintah Desa dari keempat desa serta pihak KTF.

4.3. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana secara umum dari Rencana Pengelolaan Desa Blongko, Tumbak, Talise dan Bentenan untuk Tahun 2000-2001 didukung dengan dana dari APBN/APBD (Bappeda), *Block Grant* Proyek Pesisir dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) maupun program lain seperti dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Universitas, Swasta (Horiguci Sinar Insani) dan kontribusi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2 Kegiatan yang dilaksanakan di desa untuk Tahun 2000/2001.

4.4 Hasil dan Dampak Kegiatan

Hasil implementasi Rencana Pengelolaan Desa untuk Tahun 2000/2001 dapat dilihat dalam Lampiran 4 tentang penanganan isu berdasarkan Rencana Pengelolaan Desa yang telah dilaksanakan. Belum semua kegiatan-kegiatan di dalam Rencana Pengelolaan dilaksanakan karena pertimbangan prioritas kebutuhan atau keterdesakan penyelesaian masalah, kemampuan masyarakat serta waktu yang ada. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Desa akan

terus dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahun melalui RPTD.

Beberapa dampak atau hasil yang dirasakan oleh masyarakat lewat implementasi kegiatan dalam rencana pengelolaan di empat desa model Proyek Pesisir adalah sebagai berikut :

Fisik

- Meningkatnya kesejahteraan umum dengan adanya perbaikan dan penambahan beberapa sarana umum seperti penambahan pipa air bersih, dan sarana air bersih, MCK, pusat informasi/Balai Pertemuan Umum.
- Banjir dapat dicegah dengan adanya tanggul pencegah banjir di Desa Blongko.
- Perbaikan teknik pertanian dengan pengembangan Demplot Agroforestry
- Penanaman pohon di lokasi sumber mata air untuk melindungi daerah resapan air.
- Kelestarian terumbu karang terjaga melalui pengangkatan sasanay di Tumbak dan peningkatan sarana pengawasan untuk DPL.
- Perbaikan pagar pelindung bakau di Tumbak melindungi bakau muda dari kambing dan penanaman bakau di Blongko dan Talise.
- Adanya peraturan desa mengenai perlindungan lingkungan pesisir

Non-Fisik

Masyarakat :

- Kesadaran dan tanggung-jawab terhadap pengelolaan sumberdaya yang berada di lingkungannya meningkat
- Adanya partisipasi dan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan
- Kemampuan dan ketrampilan masyarakat meningkat dalam pengelolaan sumberdaya
- Peningkatan pengetahuan untuk bertani dengan teknik agroforestry.
- Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola DPL
- Meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk melakukan koordinasi kegiatan dengan pihak terkait

Pemerintah Desa :

- Pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa yang berbasis masyarakat menjadi lebih baik

- Adanya koordinasi dan transparansi pelaksanaan kegiatan pembangunan
- Mengakomodasi masukan dari masyarakat dan berperan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
- Meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait untuk implementasi rencana pengelolaan.

Badan Pengelola:

- Kemampuan mengelola keuangan dalam pelaksanaan program pembangunan lebih baik
- Pengetahuan bahasa asing (Inggris) meningkat sehingga dapat mempergunakannya walaupun sangat terbatas dan secara sederhana
- Kemampuan mengelola kelompok sehingga dapat bekerja dengan baik
- Meningkatnya pengetahuan atau wawasan mengenai pengembangan ekowisata di Desa Talise
- Kemampuan pengawasan dan pemeliharaan DPL, bakau, pantai, pasir semakin baik
- Dorongan untuk membuat peraturan desa tentang perlindungan dan pengelolaan sumberdaya pesisir semakin tinggi
- Kemampuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan pihak terkait semakin meningkat.

4.5 PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

Beberapa permasalahan dan kendala yang ditemukan dalam implementasi kegiatan Rencana Pengelolaan Desa baik lewat dana Block Grant maupun dana-dana atau bantuan lainnya, dapat dilihat pada Lampiran 5.

Pengelompokan/kategori masalah :

1. Kelembagaan Badan Pengelola : Intervensi pengurus inti Badan Pengelola kepada kelompok pengelola/koordinator isu, kurang kerjasama antar pengurus dan anggota Badan Pengelola, beberapa koordinator isu tidak melaksanakan tugas/perannya, belum ada pengelolaan konflik, kurang diakui keberadaannya oleh beberapa dinas di pemerintah kabupaten dan kurang kepercayaan masyarakat terhadap fungsi Badan Pengelola.
2. Mekanisme Implementasi : RPTD kurang disosialisasikan, bantuan yang diberikan tidak melalui Badan Pengelola, pelaksanaan tidak sesuai waktu yang direncanakan, pengelolaan keuangan kurang terbuka dan belum sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Hubungan antar lembaga : Kurang kerjasama/koordinasi antar Badan Pengelola dan Pemerintah Desa, partisipasi masyarakat minim dan kurang partisipasi pihak swasta (belum optimal) dalam pelaksanaan kegiatan. kurang perhatian pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan, kontradiksi keberadaan Badan Pengelola dan LKMD,
4. Implementasi kegiatan : kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RPTD dan hasil/ kualitas kerja kurang baik.

Berdasarkan masalah yang telah ditemukan dalam implementasi Rencana Pengelolaan Desa Blongko, Talise, Bentenan dan Tumbak, maka untuk solusinya telah difasilitasi oleh Proyek Pesisir kecuali untuk masalah hubungan antar lembaga belum dibicarakan lebih lanjut. Sebelumnya dibuat workshop dengan tujuan spesifik melatih Badan Pengelola dan Pemerintah Desa untuk dapat melakukan evaluasi sendiri hasil

Tabel 3. Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan

Permasalahan	Solusi
Kelembagaan Badan Pengelola	Restrukturisasi/penyegaran kelompok
Mekanisme Implementasi	Kesepakatan ulang Pelatihan lanjutan pengelolaan keuangan
Hubungan antar lembaga	-
Implementasi kegiatan	Block grant tidak dilanjutkan tetapi melalui pengajuan proposal untuk setiap kegiatan

implementasi Rencana Pengelolaan dan solusi apa yang akan dilakukan walaupun tanpa Proyek Pesisir (Lihat Tabel 3.)

5. PELAJARAN YANG DIPEROLEH

Beberapa pelajaran yang dapat diperoleh dari pengalaman implementasi rencana pengelolaan tingkat desa ini :

- Langkah-langkah penting yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan Rencana Pengelolaan dilaksanakan adalah antara lain, koordinasi dalam menentukan prioritas utama yang perlu dilaksanakan lewat workshop antara Pemerintah Desa dan Badan Pengelola; pembuatan rencana tahunan yang mencantumkan sumber dan besarnya biaya; sosialisasi rencana tahunan kepada masyarakat untuk mendapatkan persetujuan (terutama mengenai prioritas pelaksanaan, pendanaan karena dalam pelaksanaan berbagai kegiatan membutuhkan partisipasi dan kontribusi masyarakat); kesepakatan dan persetujuan bersama terhadap rencana tahunan; presentasi rencana tahunan kepada masyarakat, pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten; pelatihan kelompok pengelola mengenai pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan dan kegiatan. Selain itu sebelum pelaksanaan dilaksanakan informasi secara transparan kepada masyarakat desa mengenai rencana dan alokasi dana dan sumber dana harus dilakukan lewat pusat informasi, pertemuan-pertemuan masyarakat, rumah-rumah ibadah, dan sarana informasi lainnya.
- Faktor yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan rencana pengelolaan antara lain: dukungan dan komitmen (tenaga dan kontribusi) dari mayoritas masyarakat; koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Pengelola (termasuk kelompok pengelola); dukungan dan pengawasan dari pemerintah setempat (termasuk BPD) dan pemerintah Kabupaten/propinsi dalam pelaksanaan kegiatan; isu/masalah pembangunan yang dilaksanakan adalah berdasarkan kebutuhan

masyarakat setempat; pelaksana kegiatan adalah masyarakat desa.

- Faktor-faktor yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan: kurangnya koordinasi antara pemdes dan pelaksana; lemahnya kapasitas dalam pengelolaan keuangan; kesadaran masyarakat bahwa program yang dilakukan adalah kebutuhan mereka bukan kebutuhan “proyek”; pemerintah desa dan pelaksana kurang transparansi dalam melaporkan keuangan dan kegiatan; kurangnya dukungan pemerintah kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional dalam pelaksanaan dan pengawasan program.
- Dalam pelaksanaan rencana pengelolaan yang di danai oleh dana Block grant dari Proyek Pesisir dan Bappeda bertujuan untuk pembelajaran, perubahan Perilaku, dan peningkatan kapasitas (transparansi, demokratisasi, tanggungjawab). Selain itu pelaksanaan ini juga merupakan ujicoba untuk melihat apakah proses yang dilakukan bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pelaksanaan selanjutnya.
- Transparansi Pemanfaatan keuangan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan antara pengelola, Pemdes dan masyarakat.
- Pelaksanaan kegiatan umumnya terlambat dilaksanakan dan besarnya rencana anggaran tidak sesuai dengan dana yang diperoleh sehingga hasil kurang maksimal.
- Kegiatan pembangunan dari dana baik dari Proyek Pesisir dan dana dari sumber lain (Bappeda) belum terintegrasi dengan baik.
- Kesiapan masyarakat, Badan Pengelola dan Pemdes untuk mengelola dana yang cukup besar yang diberikan secara langsung masih kurang serta masih perlu pendampingan dari luar secara intensif.
- Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan awal (proposal per kegiatan) masih lebih baik/efektif daripada pelaksanaan secara umum dan terpadu program di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Crawford, B.R., J.J. Tulungen. 1999. Scaling-up Initial Models of Community-Based Marine Sanctuaries into a Community Based Coastal Management Program as a means of promoting Marine Conservation in Indonesia. Working Paper. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development. Jakarta.
- Dimpudus, M., E. Ulaen, C. Rotinsulu dan Wakil Masyarakat Desa Bentenan-Tumbak. 1999. Profil serta Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Bentenan dan Desa Tumbak, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA dan Bappeda Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. 114 halaman.
- Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos dan N. Mangampe. 1999. Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Penerbitan Khusus Proyek Pesisir. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. 32 halaman.
- Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos dan N. Mangampe, P. Kapena dan M. Mongkol. 1999 b. Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. University of Rhode Island. Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA dan Bappeda Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. 59 halaman.
- Pollnac, R.B., C. Rotinsulu and A. Soemodinoto. 1997. Rapid Assesment of Coastal Management Issues on the Coastal of Minahasa. Coastal Resources Management Project-Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, and the US Agency for International Development, pp.60.
- Tangkilisan, N., V. Semuel, F. Masambe, E. Mungga, I. Makaminang, M. Tahumil, S. Tompoh. 1999. Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Talise. Proyek Pesisir Sulawesi Utara. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. 29 halaman.
- Tangkilisan, N., V. Semuel, V. Kirauhe, E. Mungga, I. Makaminang, B. Damopolii, W. Manginsihi, S. Tompoh dan C. Rotinsulu. 1999b. Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Talise, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. University of Rhode Island. Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA dan Bappeda Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. 73 halaman.
- Tulungen, J.J., P. Kussoy, B.R. Crawford. 1998. Community Based Coastal Resources Management in Indonesia: North Sulawesi Early Stage Experiences. Paper presented at Convention of Integrated Coastal Management Practitioners in the Philippines. Davao City. 10 - 12 Nopember.

Lampiran 1. Kerangka kerja konsep pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat di Sulawesi Utara

Langkah	Kegiatan	Hasil di Harapkan	Indikator
Identifikasi isu	<ul style="list-style-type: none"> • Survei data dasar • Identifikasi Kelompok Inti, Kelompok Fokus dan stake-holders • Pertemuan informal/formal untuk menggali info dan isu • Pelatihan Kelompok Inti untuk mengidentifikasi dan analisa isu • Penyusunan draft profil • Sosialisasi, konsultasi isu-isu kepada masyarakat, Pemerintah Desa, KTF, dan secara teknis kepada Proyek Pesisir • Perbaikan dokumen profil • Desiminasi profil • Pelaksanaan awal dilaksanakan • PLH dan pelatihan masyarakat serta studi banding 	<ul style="list-style-type: none"> • Data dasar mengenai desa (sejarah, lingkungan, sosial ekonomi) • Terbentuknya Kelompok Inti • Diperoleh konsesus tentang isu dan tingkat kesadaran masyarakat • Diperoleh info mengenai <i>stakeholder</i> di desa dan keaktifan kelompok inti • Isu-isu dapat diidentifikasi • Masyarakat dan kelompok inti memahami program • Kapasitas masyarakat untuk pengelolaan ditingkatkan • Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup meningkat • Penanganan awal isu-isu 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada laporan data dasar • Kelompok Inti terbentuk • Dokumen profil diselesaikan dan disepakati • Jumlah pendidikan lingkungan hidup dan pelatihan, jumlah rapat, studi banding, pertemuan tingkat desa dan KTF • Jumlah peserta • Jumlah pelaksanaan awal yang telah dilaksanakan dan jumlah peserta yang terlibat dalam pelaksanaan awal • Laporan pelaksanaan awal dan pertanggungjawaban keuangan • Frekuensi pemanfaatan destruktif jadi berkurang • Meningkatnya frekuensi kegiatan pengawasan dan penindakan kegiatan merusak
Persiapan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya dan pelatihan Pengelolaan Pesisir terpadu (ICM) • Pelatihan Kelompok Inti untuk penyusunan rencana • Penyusunan draft Rencana pengelolaan • Sosialisasi, konsultasi isu-isu prioritas kepada masyarakat, pemerintah dan instansi terkait • Perbaikan dokumen Rencana Pembangunan dan pengelolaan • Desiminasi Rencana Pembangunan dan Pengelolaan • Pelaksanaan awal dilanjutkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya visi, strategi, tujuan strategi dan kegiatan serta kelembagaan dalam pengelolaan • Adanya konsensus rencana pengelolaan • Diketahui dan ditetapkannya isu-isu prioritas oleh masyarakat, pemerintah dan instansi-instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya draft Rencana Pengelolaan • Jumlah pertemuan dan konsultasi, lokakarya dan sosialisasi masyarakat desa • Banyaknya input-input dari masyarakat dan instansi terkait mengenai Rencana Pengelolaan.
Persetujuan Rencana dan pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah desa untuk persetujuan • Pertemuan/lokakarya KTF untuk membahas draft dan persetujuan rencana pembangunan dan pengelolaan • Review dari pemerintah Kabupaten untuk kegiatan dan sumber dana • Penandatanganan dan launching Rencana Pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masukan, koreksi dan tambahan dari pihak-pihak terkait • Kesepakatan akhir yang bersifat formal dari masyarakat dan pemerintah di semua tingkatan • Persetujuan tujuan, strategi, kegiatan, kelembagaan dan sumber dana • Dukungan penuh dari pemerintah/ instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah umum persetujuan Rencana pengelolaan dan pembangunan • Ditandatanganinya Rencana Pengelolaan melalui SK Desa oleh pemerintah setempat • Kegiatan pelaksanaan Rencana Pengelolaan akan teranggarkan dalam RAPBD/RAPBN
Pelaksanaan dan Penyesuaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan rencana tahunan • Bantuan dana (grant) pelaksanaan • Pengusulan kegiatan tahunan lewat musbang/rakorbang 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana tahunan disepakati • Kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat • Kegiatan didanai 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rencana tahunan • Pelaksanaan efektif • Jumlah dana yang dianggarkan disepakati

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN (RPTD) TAHUN 2000
DESA BENTENAN KECAMATAN BELANG

Kegiatan	Acuan Rencana Pengelolaan		Penanggungja wab/ pelaksana	Perkiraan Anggaran (rupiah)				Total
	Bagian Isu	Strategi		Kegiatan	APBN/D	USAID/PP	Sumber lain	
1. Kawasan Pelestarian Laut	3.2							
<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Kawasan Pelestarian Laut : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Musyawarah zonasi dan aturan ▪ Pembuatan aturan dan sosialisasi di dalam dan luar desa ▪ Pembuatan papan-papan info, selebaran ▪ Pembuatan tanda batas ▪ Sarana pengawasan (motor tempel 2 PK) ▪ Peresmian 		1	2	-	250.000	-	100.000	350.000
		2	2	-	1.000.000	-	500.000	1.500.000
			3	-	2.000.000	-	750.000	2.750.000
		1	5	-	5.000.000	-	2.000.000	7.000.000
		2	5	-	3.000.000	-	1.000.000	4.000.000
				-	500.000	-	500.000	1.000.000
Sub Total				-	11.750.000	-	4.850.000	16.600.000

2.	Perbaikan Sarana Air Bersih dan Perlindungan Sumber Mata Air/Penghijauan	3.3	3	6	BPPD, PKK GMPLH	-	5.000.000	-	2.000.000	7.000.000
	▪ Perbaikan pipa/kran		1	1		-	2.000.000	-	1.000.000	3.000.000
	▪ Penghijauan sumber air (sengon, kemiri)			3		-	1.000.000	-	250.000	1.250.000
	▪ Papan informasi					-				
	Sub Total					-	8.000.000	-	3.250.000	11.250.000
Kegiatan						Perkiraan Anggaran (rupiah)				
			Acuan Rencana Pengelolaan		Penanggung-jawab/pelaksana	APBN/D	USAID/PP	Sumber lain	Swadaya Masyarakat	Total
			Bagian Isu	Kegiatan						
3.	Sanitasi Lingkungan Pesisir dan Pemukiman	3.6	1		BPPD/PKK	-				
	▪ Pembuatan bak sampah umum (15 buah)		4	2		-	2.250.000	-	1.000.000	3.250.000
	▪ Pembuatan gerobak sampah (5 buah)					-	1.000.000	-	500.000	1.500.000
	▪ Pembuatan WC umum (5 buah)			4		-	4.000.000	-	1.000.000	5.000.000
	Papan aturan kebersihan					-	800.000	-	100.000	900.000
	Sub Total					-	8.050.000	-	2.600.000	10.650.000
4.	Program Demploet Agroforestry	3.11	3	1,2,3	BPPD, Kelompok tani	-	7.200.000	-	2.000.000	9.200.000
	Sub Total					-	7.200.000	-	2.000.000	9.200.000
TOTAL ANGGARAN							35.000.000,-	-	12.700.000,-	47.700.000,-

Hukum Tua Desa Bentenan

Perwakilan Masyarakat

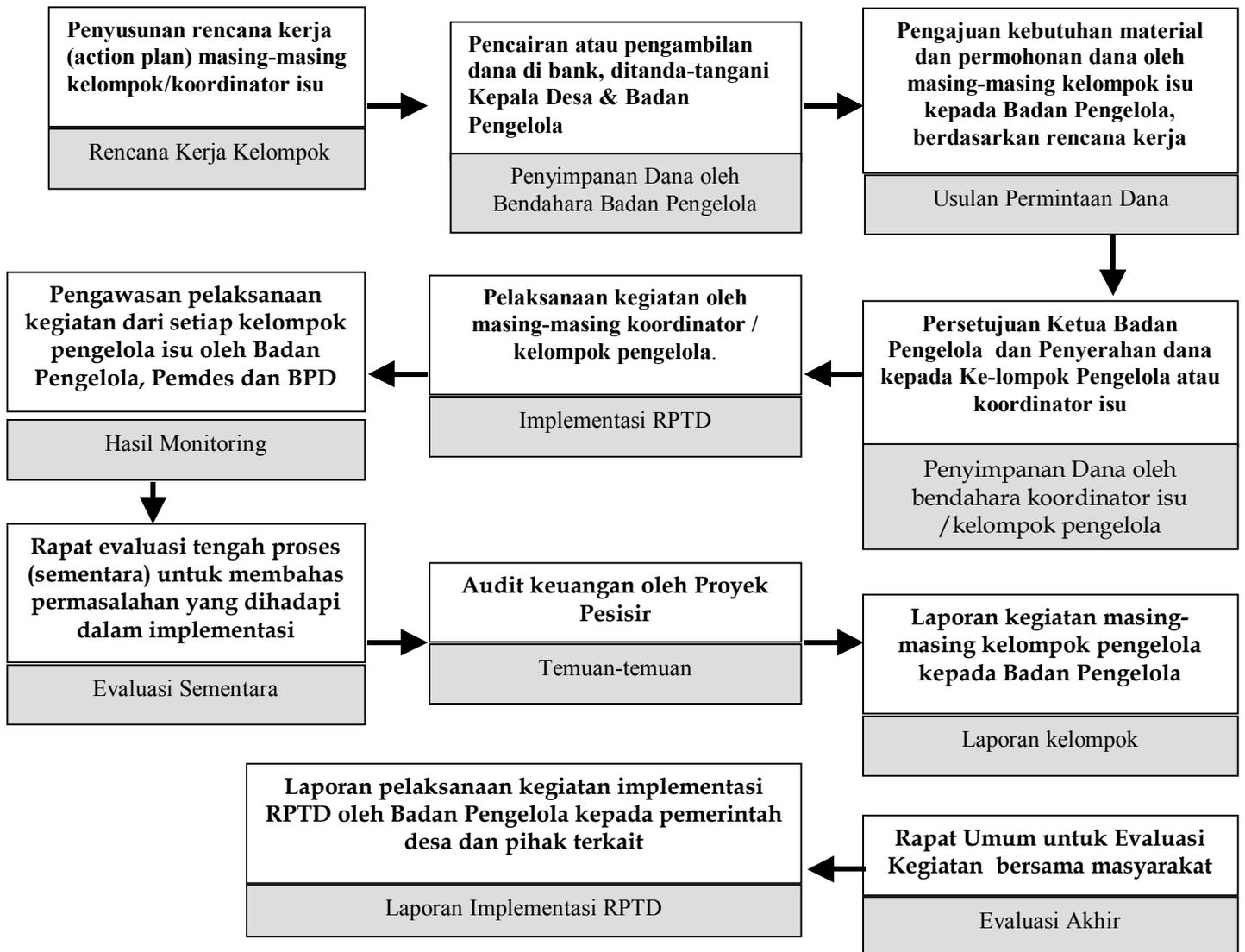
Badan Pengelolaan & Pembangunan Desa

Albert J. Lowongan

Jafar Mokoagow
Anggota BPD

Julius Powa
Ketua

Lampiran 3. Mekanisme Kerja Badan Pengelola.



Lampiran 4. Penanganan Isu berdasarkan Rencana Pengelolaan Desa yang dilaksanakan

Isu	Blongko	Bentenan	Tumbak	Talise
Pengelolaan terumbu karang/DPL	6/9	3/19	1/19	5/16
Penyediaan air bersih	1/3	3/14	6/14	1/11
Infrastruktur jalan	-	1/9	0/9	-
Penanganan erosi dan banjir	3/9	1/17	0/17	3/13
Sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat	2/10	2/18	0/18	0/12
Ekowisata	-	1/29	-	1/14
Pendidikan dan kesadaran masyarakat	1/15	1/15	2/15	2/21
Pengelolaan bakau	0/3	1/3	2/19	1/9
Perlindungan satwa yang dilindungi/langka	0/2	0/11	0/11	0/9
Peningkatan produksi perikanan	-	4/6	3/6	-
Pengelolaan areal budidaya rumput laut	-	1/9	0/9	-
Peningkatan peranan wanita	0/2	0/4	0/4	-
Pengelolaan hutan	1/3	-	-	0/12
Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	0/2	3/4	-	2/11
Legalitas status tanah	-	-	-	1/10
Konflik daerah penangkapan ikan	-	-	-	1/6

Keterangan:

a/b: a: jumlah kegiatan yang dilaksanakan; b: jumlah kegiatan yang direncanakan

Lampiran 5. Permasalahan dalam Implementasi Rencana Pengelolaan

PERMASALAHAN /KENDALA	BENTENAN	BLONGKO	TALISE	TUMBAK
▪ Keberadaan Badan Pengelola kurang diakui oleh beberapa dinas di Pemerintah Kabupaten.	√	√	√	√
▪ Pengelolaan keuangan kurang terbuka	√	√	√	√
▪ Penyimpangan mekanisme pengelolaan	√	√	-	√
▪ RPTD kurang disosialisasikan	√	√	√	√
▪ Bantuan dari luar desa ada yang belum melalui Badan Pengelola	√	√	√	√
▪ Pengelolaan keuangan belum sesuai dengan kesepakatan bersama	√	√	√	√
▪ Pelaksanaan tidak sesuai waktu yang direncanakan	√	√	√	√
▪ Hasil/ kualitas kerja kurang baik	-	√	-	-
▪ Kurang koordinasi dan kerjasama antara Badan Pengelola dan Pemdes	√	√	-	√
▪ Kurang kerjasama antar pengurus dan anggota Badan Pengelola	√	√	√	√
▪ Kurang perhatian Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan	√	-	-	-
▪ Partisipasi masyarakat minim	√	-	-	√
▪ Intervensi pengurus inti Badan Pengelola kepada kelompok pengelola/koordinator isu	√	√	-	√
▪ Partisipasi pihak swasta (belum optimal) dalam pelaksanaan kegiatan	√	-	-	√
▪ Beberapa koordinator isu tidak melaksanakan tugas/perannya	-	-	√	-
▪ Belum ada pengelolaan konflik	√	√	√	√
▪ Kurang kepercayaan masyarakat terhadap fungsi Badan Pengelola	√	-	√	-
▪ Kontradiksi keberadaan Badan Pengelola dan LKMD	√	√	-	√

PELAJARAN DARI PENERAPAN PENGELOLAAN PESISIR DI LAPANG: MAKALAH RANGKUMAN

Oleh:

M. Fedi A. Sondita, Neviaty P. Zamani, Amiruddin Tahir dan Burhanuddin
Learning Team – Proyek Pesisir IPB, Bogor
email: learningtm@bogor.indo.net.id

1. PENDAHULUAN

Proyek Pesisir telah menerapkan beberapa *'working example'* pengelolaan pesisir secara terpadu di tiga propinsi, yaitu Sulawesi Utara, Lampung dan KalTim. *Working example* tersebut bersifat *pilot project* sehingga 'berskala' relatif kecil namun dilaksanakan secara lengkap dalam arti semua tahapan dari proses perencanaan hingga implementasi dan monitoring serta evaluasi dilakukan. Salah satu alasan diterapkannya pendekatan ini adalah masih jaranganya praktek-praktek pengelolaan pesisir terpadu di lapang sementara kebijakan-kebijakan di tingkat nasional yang mengatur pengelolaan di tingkat propinsi, kabupaten bahkan tingkat desa, masih terbatas dalam bentuk konsep.

Mengangkat pengalaman dari lapang sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan nasional adalah salah satu strategi Proyek Pesisir untuk memberikan kontribusi bagi pengelolaan pesisir nasional. Jargon yang dipakai adalah *'Bringing up lessons from field experience to national track'*. Untuk itu Proyek Pesisir melaksanakan program pendokumentasian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Pendokumentasian ini bukan sekedar untuk mendeskripsikan jalannya suatu kegiatan, tetapi juga untuk menggali pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran atau *lessons learned* bagi berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, perencana kegiatan pengelolaan pesisir, masyarakat dan akademisi.

Makalah ini menyajikan rangkuman *lessons learned* dan diskusi dari laporan pendokumentasian yang disusun oleh staf lapangan Proyek Pesisir di tahun 2001/2002 yang difokuskan pada implementasi rencana pengelolaan yang dilakukan oleh *stakeholder* di setiap lokasi proyek. Secara khusus, makalah ini akan membahas permasalahan yang dijumpai dalam implementasi rencana pengelolaan antar skala wilayah penge-

loalan yang berbeda (desa, kawasan ekosistem dan propinsi), khususnya aspek kelembagaan dan pendanaan. Implikasi dari pengalaman ini terhadap program-program pengelolaan pesisir dan kebijakan nasional disajikan sebagai penutup makalah ini.

2. LEMBAGA PENGELOLA

Terlepas dari skala geografi wilayah pesisir yang dikelola ataupun cakupan isu, faktor kejelasan adanya lembaga pengelolaan pesisir merupakan persyaratan untuk kelancaran pelaksanaan program dan *sustainability* pengelolaan pesisir. Di ketiga lokasi proyek, pendirian cikal bakal lembaga pengelolaan merupakan hal penting yang perlu dimulai untuk mendukung kelancaran proses penerapan pengelolaan di lapang. Dalam prosesnya, cikal bakal tersebut melibatkan sejumlah orang yang merupakan perwakilan instansi atau unit kerja yang diperkirakan relevan untuk menangani permasalahan yang ada di wilayah pesisir. Di tingkat propinsi dan kabupaten, lembaga ini bersifat koordinatif dengan arahan pimpinan Badan Perencanaan Daerah setempat dengan keanggotaan yang cukup beragam. Sebagai contoh adalah *Provincial Working Group* di Sulawesi Utara dan KalTim, *Kabupaten Task Force* di Kabupaten Minahasa, *Provincial Steering Team* di Lampung dan *Kabupaten Task Force* di Kabupaten Lampung Selatan. Di desa-desa lokasi proyek di Minahasa, pengelolaan ini dilaksanakan oleh suatu badan pengelola mengingat LKMD saat ini dianggap belum memiliki kemampuan yang cukup. Proses pendirian lembaga-lembaga tersebut difasilitasi oleh Proyek Pesisir. Aktivitas yang dilakukan mencakup upaya-upaya penguatan kelembagaan berupa kegiatan pelatihan, program magang, pendampingan, lokakarya, kunjungan studi banding dan lain-lain.

Salah satu peran yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh sebuah *working group* adalah memfasilitasi keterpaduan antara perencanaan yang bersifat *top-down approach* dan *bottom-up approach*. Keterpaduan ini dapat disebut juga sebagai *dual-track approach*. *Top-down approach* merupakan representasi dari upaya penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya berjenjang, yang dimulai dari pengambil kebijakan yang tertinggi di tingkat nasional hingga tingkat daerah (pemerintah tingkat kabupaten dan propinsi) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. *Bottom-up approach* merupakan representasi dari proses pengusulan ataupun masukan untuk perencanaan yang dimulai dari individu anggota masyarakat dan tokoh-tokohnya, kelompok-kelompok *stakeholder*, pimpinan pemerintahan setingkat desa, dan seterusnya 'ke atas' hingga pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan kabupaten dan propinsi.

Berbagai kalangan di pemerintahan daerah dapat saja mengklaim bahwa proses perencanaan yang bersifat *dual-track approach* tersebut sudah diterapkan. Adanya proses perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang), Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) adalah contoh forum dimana *dual track approach* tersebut diterapkan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kepentingan atau kebutuhan yang muncul dari bawah, yaitu masyarakat, terjamin sehingga dapat terakomodasi dalam pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Dominasi pihak-pihak yang berada dalam hierarki yang lebih tinggi dalam forum-forum tersebut menyebabkan kecenderungan bahwa *top-down approach* menjadi lebih signifikan dalam proses perencanaan pesisir.

Keberhasilan pengintegrasian usulan-usulan dari 'bawah' ke dalam suatu rencana pembangunan, baik di tingkat nasional ataupun daerah, sangat tergantung pada waktu. Pengalaman menunjukkan bahwa proses penyusunan rencana pengelolaan memakan waktu relatif panjang karena berbagai kegiatan yang sifatnya mempersiapkan kapasitas staf pemerintahan, *stakeholder*, masyarakat dan *working group* berjalan secara simultan. Akhir dari proses perencanaan itu sendiri adalah tersusunnya dokumen rencana

pengelolaan yang disepakati oleh para *stakeholder*, lengkap dengan komitmen mereka masing-masing. Namun program-program yang dimuat dalam rencana tersebut belum tentu secara langsung segera terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini karena rencana program pengelolaan tersebut terlambat diusulkan. Namun, keterlambatan ini hanya berdampak pada program-program yang memerlukan dana signifikan dari pemerintah. Untuk program-program yang dapat didanai secara swadaya oleh para *stakeholder*, keterlambatan tersebut bukanlah masalah penting.

Working group dapat berperan dalam mengkoordinasikan 'proyek-proyek' pembangunan yang ada di wilayah kerjanya dalam rangka keterpaduan antar proyek. Hal ini penting untuk memaksimalkan manfaat dan dampak positif proyek sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan, termasuk untuk pengelolaan pesisir. Tidak jarang proyek-proyek yang ada bertujuan untuk melaksanakan percontohan atau demonstrasi penerapan dalam skala kecil dengan maksud contoh penerapan tersebut dikemudian hari diterapkan dalam skala sesuai dengan kebutuhan setempat. Oleh karena itu *working group* juga diharapkan dapat berperan sebagai 'lembaga' yang siap menerima transfer pengalaman sehingga setelah proyek-proyek percontohan tersebut usai, upaya yang diperkenalkan proyek dapat berlanjut sebagai program-program pembangunan.

Perlunya *working group* dalam rangka pelaksanaan suatu proyek pengelolaan pesisir terpadu sempat dipertanyakan. Dalam konteks tidak berfungsinya secara optimal lembaga koordinasi, *working group* yang dibentuk merupakan suatu percontohan bagi kalangan pemerintahan tentang penerapan koordinasi tersebut. Dengan *working group*, para staf pemerintahan memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas koordinasi untuk pengelolaan pesisir. Untuk suatu daerah mungkin koordinasi bukanlah merupakan masalah namun pengalaman mempraktekkan koordinasi untuk pengelolaan pesisir mungkin masih baru. Dari aspek kepentingan proyek, kelancaran kegiatan proyek di lapangan memerlukan dukungan resmi. Pendirian *working group* di suatu

tempat dapat saja tidak diperlukan jika lembaga koordinasi yang ada telah mapan dalam arti memiliki pemahaman tentang pengelolaan pesisir, dapat menjalankan fungsi koordinasi dengan baik dan efektif serta memiliki pengalaman yang dapat diandalkan di bidang pengelolaan pesisir.

Agar suatu *working group* dapat bekerja dengan baik, ada usulan bahwa *working group* tersebut perlu diresmikan oleh pimpinan pemerintahan setempat, misalnya dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Terbitnya perda ini memberikan landasan bagi *working group* tentang susunan *working group*, tugas dan fungsinya, serta sumber pembiayaan untuk kegiatannya. Perda semacam ini diperlukan jika pemerintah setempat memerlukan adanya lembaga 'khusus' untuk menangani proyek pengelolaan pesisir, atau karena kelembagaan yang ada dianggap belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani permasalahan yang baru.

Dalam masa pasca proyek, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh *working group* dapat diadopsi oleh pemerintah setempat. Pengalaman yang diperoleh para anggota *working group* merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga koordinasi yang sebenarnya. Persoalan berikutnya adalah bagaimana pengalaman tersebut dapat dipelajari dan disampaikan kepada pimpinan dan staf lembaga tersebut.

3. PELEMBAGAAN PENGELOLAAN PESISIR DI TENGAH MASYARAKAT/STAKEHOLDER

Upaya melembagakan pengelolaan pesisir tidak cukup hanya dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga koordinatif, tetapi juga pendirian kelompok-kelompok kerja khusus dan forum-forum serta pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi/penyuluhan kepada masyarakat luas. Hal ini perlu dilakukan agar pengelolaan pesisir tersosialisasi atau melembaga di tengah masyarakat umum dan para *stakeholder* lainnya. Jika masyarakat dan para *stakeholder* tersebut memiliki pemahaman akan pentingnya sumberdaya pesisir dikelola dengan baik, maka mereka akan memberi perhatian terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah ataupun pihak-pihak lain. Perhatian ini kemudian dapat diaktualisasikan dalam bentuk

keprihatinan mereka terhadap permasalahan yang ada, peran serta aktif mereka dalam proses perencanaan, implementasi dan monitoring program-program pengelolaan pesisir. 'Popularitas' pentingnya pengelolaan pesisir di tengah masyarakat secara langsung dan tidak langsung akan menentukan dukungan terhadap pengambilan kebijakan (*policy*) yang memprioritaskan program pengelolaan pesisir dalam agenda pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan setempat yang melibatkan wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Upaya untuk 'mempromosikan' pentingnya pengelolaan pesisir memerlukan strategi '*outreach communication*' yang dapat menjangkau berbagai jenis kelompok sasaran. Promosi ini secara umum hendaknya bertujuan agar masyarakat umum menyadari permasalahan yang ada di sekitarnya, membangkitkan kebutuhan penanganan permasalahan-permasalahan tersebut, memikirkan cara-cara pemecahannya, dan seterusnya. Promosi kepada kelompok-kelompok *stakeholder* tertentu, selain hal-hal di atas juga dimaksudkan untuk mengajak bagaimana mereka secara berkelompok dapat memberikan kontribusi terciptanya kondisi pesisir yang ideal yang dapat menguntungkan semua pihak oleh semua pihak. Promosi akan lebih efektif jika pelakunya adalah anggota masyarakat atau *stakeholder* yang mengalami langsung dalam praktek atau proses pengelolaan.

Dalam konteks umur Proyek Pesisir, salah satu isu yang perlu dibahas lebih lanjut adalah seberapa jauh fungsi yang diperankan oleh lembaga-lembaga *working group*, baik di tingkat desa, kabupaten maupun propinsi, yang ada akan berkembang selanjutnya setelah proyek ini selesai. Hal ini penting untuk dipikirkan karena pemerintah daerah dan *stakeholder lokal* serta masyarakat di lokasi proyek diharapkan secara mampu mandiri melaksanakan pengelolaan program-program pengelolaan pesisir selanjutnya.

4. PENDANAAN UNTUK IMPLEMENTASI RENCANA PENGELOLAAN

Sukses implementasi rencana pengelolaan tidak terlepas dari kesediaan sumberdaya, yaitu sumberdaya manusia, dana dan material. Dalam

konteks *governance*, pernyataan resmi tentang diterimanya suatu rencana pengelolaan sebagai dasar untuk mewujudkan rencana pengelolaan pesisir secara terpadu sangat diperlukan. Adopsi formal tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sumberdaya pesisir untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Namun komitmen tersebut tidak cukup hanya dengan pernyataan. Komitmen tersebut harus juga dibarengi dengan kesungguhan, termasuk komitmen berupa pengalokasian dana pembangunan untuk program-program implementasi rencana pengelolaan tersebut.

Selain adopsi formal terhadap rencana pengelolaan tersebut, alokasi dana yang jelas untuk implementasi rencana pengelolaan merupakan salah satu indikator kesiapan tahap ke 3 dalam siklus perencanaan. Alokasi dana yang bersumber dari pemerintah tampaknya masih merupakan sesuatu yang relatif sulit untuk direncanakan mengingat belum terintegrasinya perencanaan pengelolaan pesisir kedalam proses perencanaan pembangunan yang secara kebetulan masih dalam tahap penyesuaian. Akibat belum terintegrasinya perencanaan tersebut menyebabkan kesulitan dalam pengalokasian dana. Namun persoalan ini tidak berlaku untuk program-program pengelolaan yang memerlukan dana yang relatif besar.

Dalam proses perencanaan yang berjenjang dari bawah, dalam arti masukan atau usulan, tentu diperlukan interaksi antara pemerintah dan pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) serta jajaran pemerintahan lainnya. Proses perencanaan pengelolaan pesisir yang diperkenalkan sudah menerapkan *bottom-up approach* dimana para *stakeholder* telah diberi kesempatan berperan aktif, mulai dari tahap identifikasi permasalahan dan mengkaji setiap permasalahan tersebut, memberikan masukan terhadap rencana pengelolaan dan lain-lain.

Dana untuk implementasi program-program dalam rencana pengelolaan pesisir dapat berasal dari berbagai sumber, tidak hanya berasal dari dana pembangunan yang akan dikelola langsung oleh pemerintah. Sumber dana lain adalah dana yang merupakan kontribusi langsung masyarakat dan kelompok-kelompok *stakeholder*, termasuk dida-

lamnya adalah unit-unit usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam secara langsung. Dana yang berasal dari pemerintah atau dana pembangunan dapat berasal dari APBN maupun APBD. Hal yang perlu secara cermat diperhatikan adalah koordinasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan sumber dana yang berbeda. Jenis kegiatan dan sumberdana yang beragam inilah yang perlu diidentifikasi dalam menyusun rencana pengelolaan. Proses pengintegrasian ini semestinya dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai rencana yang pada awalnya terpisah kemudian membahasnya secara terbuka dengan para penggagas kegiatan-kegiatan. Pentingnya pembahasan ini merupakan indikasi bahwa komunikasi antar para pengambil keputusan, baik di tingkat nasional maupun daerah, perlu dilakukan. Kunci keberhasilan terjadinya pengintegrasian ini terletak pada peran lembaga yang bertugas mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan. Efektivitas lembaga tersebut dapat dilihat sejauh mana informasi yang ada dapat ditindak-lanjuti dan dipadukan sehingga mengarah pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara efisien dan efektif serta berdampak luas dan jangka panjang.

5. KELANJUTAN PENGELOLAAN PESISIR

Seperti dikatakan di atas, banyak proyek 'hanya' dapat melakukan 'percontohan' mengingat keterbatasan sumberdaya proyek dan waktu. Dengan percontohan-percontohan tersebut, pemerintah setempat diharapkan dapat menindak-lanjuti percontohan tersebut dengan menerapkan program-program yang dicontohkan. Penerapan dalam program-program tersebut inilah merupakan salah satu indikator kelanjutan (*sustainability*) atau keberlanjutan dari upaya-upaya dan metodologi yang diperkenalkan oleh proyek-proyek tersebut.

Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelanjutan dari model proses dan praktek pengelolaan pesisir yang diperkenalkan oleh suatu proyek adalah:

- Keberadaan *working group* dan kapasitasnya
- Komitmen serta dukungan dari pemerintah (pusat dan daerah) dan DPR/DPRD untuk memasukkan program pengelolaan pesisir

kedalam rencana pembangunannya. Komitmen ini berupa ketegasan bahwa rencana pengelolaan yang dibuat akan dijadikan pedoman untuk pembangunan di wilayah pesisir.

- Terciptanya kelompok-kelompok masyarakat yang secara terus-menerus mendukung terwujudnya pengelolaan pesisir.
- Kemandirian masyarakat dan *stakeholder* dalam menerapkan substansi rencana strategi ataupun rencana pengelolaan pesisir. Kontribusi yang besar dari masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan upaya-upaya pengelolaan. Kemandirian ini merupakan indikator bahwa masyarakat tidak semata-mata sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

6. IMPLIKASI TERHADAP PROGRAM-PROGRAM PENGELOLAAN PESISIR

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa catatan yang mencakup bagaimana sebaiknya pengelolaan pesisir secara terpadu dipraktekkan. Catatan-catatan tersebut adalah:

- Program pengelolaan pesisir harus dibarengi dengan program penguatan kelembagaan yang mencakup peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang ada dan melembagakan atau mensosialisasikan pengelolaan pesisir di tengah masyarakat umum, staf pemerintahan dan *stakeholder-stakeholder*. Indikator dari adanya pengelolaan yang sudah melembaga adalah komitmen pemerintah yang didukung oleh para wakil rakyat untuk mengalokasikan dana.
- Pemerintah dalam proses pembangunan diharapkan dapat memfasilitasi terwujudnya proses perencanaan pengelolaan pesisir yang menerapkan *top-down approach* dan *bottom-up approach* secara bersamaan.
- Pengalaman kerjasama instansi dan LSM dalam *working group* yang ada perlu dimanfaatkan. Oleh karena itu suatu *working group* yang baru tidak selalu perlu dibentuk untuk setiap proyek.
- Adanya perkembangan karier dan restrukturisasi menyebabkan *working group* yang ada memerlukan program penyegaran untuk menjaga *awareness* dan kapasitasnya. Program seperti ini sangat diperlukan untuk menjaga *sustainability* dari upaya-upaya yang diperkenalkan proyek.

- Semua pihak yang pernah bekerjasama dan terbina oleh aktifitas proyek merupakan *critical mass* yang dapat mendorong kelancaran proses penerapan pengelolaan pesisir secara terpadu.
- Proses pengelolaan pesisir terpadu memerlukan pendekatan *adaptive management*. Hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan dan kapasitas untuk pemahaman terhadap permasalahan pesisir yang dinamis. Pendekatan ini memberikan konsekuensi teknis yang terkait dengan proses pengelolaan yang perlu diakomodasi oleh sistem pertanggung-jawaban program/proyek yang biasa diterapkan oleh pemerintah.
- Program pelatihan untuk penguatan kelembagaan diperlukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia untuk pengelolaan.

7. IMPLIKASI TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Secara umum, hal-hal di atas menggaris-bawahi bahwa pengelolaan pesisir hendaknya mengutamakan keterpaduan, kesempatan kepada *stakeholder* di bawah untuk berperan aktif dalam proses perencanaan, perencanaan yang berdampak positif dalam jangka panjang (*ecologically sustainable*), sistem perencanaan yang bersifat terbuka dan bersifat partisipatif, kejelasan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat. Hal-hal tersebut sudah tercakup dalam dokumen Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu yang disusun oleh Ditjen Pengelolaan Pesisir, Departemen Kelautan dan Perikanan. Dalam aspek keterpaduan, secara tegas pedoman tersebut mencantumkan bahwa keterpaduan tersebut mencakup keterpaduan perencanaan antar sektor pembangunan, keterpaduan perencanaan secara vertikal mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga nasional, keterpaduan antara batas ekologis dan batas administratif untuk menentukan wilayah pengelolaan, keterpaduan antara obyektivitas ilmiah dengan kebijakan yang diambil oleh para pengambil keputusan, dan keterpaduan antar negara untuk isu-isu yang bersifat lintas batas negara.

Dengan adanya pedoman umum tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan penerapan pengelolaan pesisir yang

terpadu antara lain adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang handal yang diperlukan untuk tataran pengambilan kebijakan, penelitian, perencanaan, dan tataran praktek di lapang yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Penyediaan sumberdaya manusia ini dapat dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Berbagai forum untuk berbagi pengalaman, misalnya lokakarya dan pelatihan-pelatihan, dapat mempercepat penyediaan sumberdaya manusia tersebut. Upaya-upaya penggalan *lessons learned* hendaknya dilakukan oleh semua pihak, baik para praktisi maupun akademisi, dalam upaya menyiapkan ‘materi’ berbagai ragam bentuk pendidikan tersebut. Pendekatan penggalan *lessons learned* dan bertukar pengalaman ini sangat strategis mengingat keragaman pesisir dan karakteristik sosial yang ada di Indonesia memerlukan berbagai pendekatan khusus. Oleh karena itu, setiap program-program pengelolaan pesisir perlu mencakup program pembelajaran yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kapasitas pelaksana program, masyarakat dan para *stakeholder* lainnya.

AGENDA INTERNAL

LOKAKARYA HASIL PENDOKUMENTASIAN PROYEK PESISIR 1997 - 2002

BOGOR, 15 - 16 JANUARI 2002

Hari/Tgl	Jam	Acara	Keterangan
Senin,14 Januari 2002	12.00	Semua peserta lokakarya internal chek in di Hotel New Mirah, Bogor	Hotel New Mirah Bogor
Selasa,15 Januari 2002	08.00-08.30 08.30-09.00 09.00-10.30 10.30-10.45 10.45-12.15 12.15-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.00 17.00-18.30 18.30-19.00 19.00-21.00	Pembukaan Pengantar diskusi lokakarya internal Presentasi dan diskusi paper hasil pendokumentasian Proyek Pesisir Sulawesi Utara Istirahat Presentasi dan diskusi hasil pendokumentasian Proyek Pesisir Lampung Makan siang Presentasi dan diskusi paper hasil pendokumentasian Proyek Pesisir Kalimantan Timur Presentasi dan diskusi paper hasil pendokumentasian <i>Learning Team</i> PKSPL IPB Rangkuman diskusi hari pertama Istirahat Makan malam Revisi paper berdasarkan hasil diskusi terakhir	D.G. Bengen F. Sondita N. Tangkilisan - Amiruddin A S. Darmawan (Alm.) F. Sondita F. Sondita - All All
Rabu,16 Januari 2002	08.00-08.30 08.30-09.00 09.00-09.30 09.30-10.00 10.00-10.15 10.15-12.15 12.15-13.00 13.00-15.30 15.30-16.00 16.00-18.30 18.30-19.00	Pengantar diskusi hari kedua Penyampaian hasil perbaikan paper Proyek Pesisir Sulawesi Utara Penyampaian hasil perbaikan paper Proyek Pesisir Lampung Penyampaian hasil perbaikan paper Proyek Pesisir Kalimantan Timur Istirahat Diskusi dan persiapan untuk lokakarya eksternal Makan siang Diskusi dan persiapan untuk presentasi lokakarya eksternal (lanjutan) Istirahat Pembahasan agenda lokakarya eksternal Penutupan Peserta PP Kaltim dan Sulut berangkat ke Jakarta	<i>Learning Team</i> PP Manado PP Lampung PP Kaltim - <i>Learning Team</i> dan staf lapangan <i>Learning Team</i> dan staf lapangan - <i>Learning Team</i> dan staf lapangan
Kamis,17 Januari 2002	12.00	Peserta PP Lampung <i>chek out</i>	

DAFTAR ACARA EKSTERNAL
LOKAKARYA HASIL PENDOKUMENTASIAN PROYEK PESISIR
1997 - 2002
BOGOR, 14 FEBRUARI 2002

Jam	Acara	Keterangan
07.30-09.00	Pendaftaran peserta	Panitia
09.00-09.15	Sambutan Koordinator Program Proyek Pesisir PKSPL IPB	D.G. Bengen
09.15-09.30	Sambutan <i>Chief of Party</i> Proyek Pesisir	M. Knight
09.30-09.45	Pengantar dari Koordinator Learning Team	F. Sondita
09.45-10.00	Istirahat	-
Panel Pertama (Moderator: Dietriech G. Bengen, Notulis: Achmad Rizal)		
10.00-10.20	Presentasi paper hasil pendokumentasian Proyek Pesisir Kalimantan Timur	B. Wenno
10.20-10.40	Presentasi hasil pendokumentasian Proyek Pesisir Sulawesi Utara	J. Tulungen/C. Rotinsulu
10.40-11.00	Presentasi paper hasil pendokumentasian Proyek Pesisir Lampung	B. Wiryawan
11.00-12.00	Diskusi Panel Pertama	-
12.00-13.00	Istirahat	-
Panel Kedua (Moderator: Ali Kabul Mahi, Notulis: Neviaty P. Zamani)		
13.30-13.45	<i>Summary Paper Learning Team</i>	F. Sondita
13.45-14.00	Presentasi paper <i>National Policy</i>	W. Siahaan
	Presentasi paper hasil pendokumentasian Learning Team	F. Sondita
14.00-15.00	Diskusi Panel Kedua	-
15.00-15.15	• Membahas hasil diskusi panel • Pembelajaran (<i>national learning</i>) • Agenda selanjutnya	- F. Sondita/ D.G. Bengen
15.15-16.30	Penutupan	Panitia

**DAFTAR PESERTA LOKAKARYA INTERNAL
LEARNING TEAM PROYEK PESISIR PKSPL IPB
BOGOR, 15 – 16 JANUARI 2002**

No	Nama	Instansi
1	Dr. Ir. Dietriech G. Bengen DEA	Proyek Pesisir PKSPL IPB
2	Dr. Stacey Tighe	Proyek Pesisir Jakarta
3	Prof. Dr. Jacob Rais	Proyek Pesisir Jakarta
4	Prof. Dr. Ali Kabul Mahi	Proyek Pesisir Lampung
5	Johnnes Tulungen, MSi	Proyek Pesisir Sulawesi Utara
6	Nonny Tangkilisan	Proyek Pesisir Sulawesi Utara
7	Dr. Neviaty P Zamani, MSc	<i>Learning Team</i> PKSPL IPB
8	Ary Setiabudy D	Proyek Pesisir KalTim
9	Achmad Setiadi	Proyek Pesisir KalTim
10	Dr. Fedi A. Sondita, MSc	<i>Learning Team</i> PKSPL IPB
11	Bambang Haryanto	<i>Learning Team</i> PKSPL IPB
12	Burhanuddin	<i>Learning Team</i> PKSPL IPB
13	Irdez Azhar	Proyek Pesisir Sulawesi Utara
14	Amiruddin	<i>Learning Team</i> PKSPL IPB
15	Nana Anggraeni	Proyek Pesisir PKSPL IPB
16	Ahmad Husein	Proyek Pesisir Jakarta
17	Kun Hidayat	Proyek Pesisir Jakarta

DAFTAR PESERTA LOKAKARYA
HASIL PENDOKUMENTASIAN PROYEK PESISIR 1997 - 2002
BOGOR, 14 FEBRUARI 2002

No	Nama	Instansi
1	Achmad Rizal	PKSPL-IPB
2	Agus Setiawan	SEAWATCH BPPT
3	Agustinus	PP Kaltim
4	Ahmad Baehaqi	Global Environment Forum (GEF)
5	Ahmad Husein	PP Jakarta
6	Amiruddin	Learning Team
7	Arif Aliadi	LATIN
8	Ary S Suhandi	Conservancy International
9	Aslan	WCS Indonesia Program
10	Bambang Haryanto	Learning Team
11	Bob Wenno	FPM Kaltim
12	Burhanuddin	Learning Team
13	Chris Rotinsulu	PP Manado
14	Dedy Supriadi	YABSHI
15	Denny Boy Mochran	Yayasan Puter
16	Dr. Budy Wiryawan	FPM Lampung
17	Dr. Ety R. Agoes, SH, LLM	Staf Ahli Menteri DKP Bidang Hukum
18	Dr. Ir. Awal Subandar, MSc	BPPT Jakarta
19	Dr. Ir. Dietriech G Bengen	PKSPL – IPB
20	Ery Damayanti	IMA Indonesia
21	Fahmi, SPi	P2O LIPI Ancol
22	Dr. Ir. Fedi A Sondita	Learning Team
23	I Wayan Adi	Yayasan Bina Usaha Lingkungan
24	Idwan Suhardi	BPPT Jakarta
25	Imran Amin	Telapak Indonesia
26	Ir. Agung Triprasetyo	Ditjen Bangda, DEPDAGRI
27	Ir. Asminarsih, MSc	Ditjen Bangda, DEPDAGRI
28	Ir. Edyanto, MSi	Bappeda Propinsi Lampung
29	Ir. Faisal	Bappeda Propinsi Lampung
30	Ir. Julianto	Bakosurtanal
31	Ir. Syahrir Hadi, MSi	Direktur Bina Manajemen Pemerintahan Daerah, DEPDAGRI
32	Ir. Trini Hastuti	Bakosurtanal
33	Johnnes Tulungen	FPM Manado
34	Kun Hidayat	PP Jakarta
35	M. Khazali	PP Kaltim
36	M. Nurdin M	Mahasiswa S2 SPL IPB
37	Maurice Knight	PP Jakarta
38	Meyland Sirait	Yayasan KEHATI
39	Dr. Ir. Neviaty P Zamani	Learning Team
40	Noor Nedi	Mahasiswa S2 SPL IPB
41	Priyanto Santosa	USAID
42	Prof. Dr. Ali Kabul Mahi	PP Lampung
43	Prof. Jacub Rais	PP Jakarta
44	Sari Suryadi	Conservancy International
45	Setia Lesmana	Suara Pembaruan Jakarta
46	Silvianita	Yayasan TERANGI
47	Slamet Tarno	Mahasiswa S2 SPL IPB
48	Sudibyo	Wetland International
49	Tusy A. Adibroto, MSi	BPPT Jakarta
50	Usman Mochtar	Ditjen Bangda, DEPDAGRI
51	Wilson Siahaan	PP Jakarta
52	Yunia Witasari	P2O LIPI Ancol Jakarta